



LAPORAN KEGIATAN



Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2022

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur disampaikan kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan laporan kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Maksud dan tujuan dari kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Tahun 2022 adalah untuk meningkatkan meningkatkan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang ekonomi di Provinsi Sumatera Barat.

Ucapan terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada seluruh Fungsional Perencana Ahli Muda dan pelaksana Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang telah membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan ini pada tahun 2022. Untuk penyempurnaan laporan dimasa mendatang, diharapkan masukan dan kritikan yang bersifat membangun.

Padang, Desember 2022

**KEPALA BIDANG EKONOMI
DAN SUMBER DAYA ALAM**



Ir. Benny Sakti, MM.

Pembina TK I,
NIP. 19670927 199403 1 008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. 1. Latar Belakang	1
1. 2. Dasar Pelaksanaan.....	2
1. 3. Tujuan dan Sasaran Kegiatan.....	3
1. 4. Uraian Kegiatan	3
1. 5. Waktu Pelaksanaan	4
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	5
2. 1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026	6
2.1.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026	6
2.1.2. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022	84
BAB III PELAKSANAAN KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	107
3. 1. Rapat-Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah.....	107
3. 2. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Daerah dan Luar Daerah .	125
BAB IV PERMASALAHAN.....	169
BAB V PENUTUP.....	173

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1.Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan hal krusial terkait dengan tujuan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan aspek keberlanjutan (sustainable development). Perencanaan sendiri merupakan salah satu dari aspek manajemen disamping pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan pengawasan (controlling), sedangkan pembangunan secara umum menganut tiga paradigma, yaitu pertumbuhan, perbaikan, dan perubahan. Dengan demikian pada dasarnya perencanaan pembangunan adalah upaya untuk eksploitasi dan eksplorasi sumberdaya secara optimal untuk mencapai pertumbuhan, perbaikan dan perubahan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan, Pemerintah telah mengatur tata cara perencanaan sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan periode 20 tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan periode 1 (satu) tahun. Dokumen perencanaan pembangunan memuat arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam periode 20 (dua puluh), 5 (lima) dan 1 (satu) tahun. Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta merupakan breakdown dari RPJP tahun 2005 – 2025. Sedangkan penjabaran dari rencana tahunan pada RPJMD 2021-2026 dibreakdown pada RKPD 2023. Dokumen tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan dan isu yang berkembang saat ini sekaligus memberikan arahan untuk pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan Pemerintah.

Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perlu diperhatikan tahapan dan mekanisme perencanaan yang sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang telah ditetapkan. Penyusunan dokumen perencanaan dilakukan dengan melibatkan seluruh stakeholder termasuk masyarakat dan pihak swasta yang dilaksanakan melalui berbagai Forum mulai dari tingkat terendah sampai tingkat Pusat. Dalam proses perencanaan juga dibutuhkan data dan

informasi yang akurat untuk mendukung perencanaan. Disamping itu juga harus mengakomodir kebijakan pusat serta mempertimbangkan kebijakan ditingkat kabupaten/kota, sehingga dapat terwujud sinkronisasi, kesesuaian dan konsistensi perencanaan ditingkat Pusat dan Daerah.

Dari tahun 2020, seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, telah terjangkit penyebaran pandemi Coronavirus-2019 (Covid-19). Pandemi Covid-19 telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan di hampir seluruh wilayah di Indonesia juga cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor perdagangan dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan koreksi yang cukup dalam terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.

1. 2. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat 2005-2025;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 203-52-2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Dan Bendahara Pengeluaran Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022.
14. Surat Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor : 020/09/I/Set/Bappeda-2022 tanggal 24 Januari 2022, tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Provinsi Sumatera Barat TA. 2022, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Nomor DPA-SKPD : 5.01.0.00.0.00.01.0000, kegiatan

5.01.03.1.02. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), Sub kegiatan 5.01.03.1.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD).

1. 3. Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Barat jangka menengah dan jangka pendek serta terlaksananya koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian, adapun sasaran dari kegiatan ini adalah:

- a. Tersusunnya dokumen perencanaan tahunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2023.
- b. Terkoordinirnya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2023
- c. Terlaksananya koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik dengan Kabupaten/Kota, Provinsi maupun dengan Pusat.

1. 4. Uraian Kegiatan

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, telah dialokasikan dana melalui APBD Awal tahun 2022 Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. dan pada APBD Perubahan 2022 sebesar Rp. ,- yang digunakan untuk:

- a. Melaksanakan pembahasan dokumen perencanaan lingkup Bidang Ekonomi
- b. Melakukan pengumpulan data/Informasi penunjang perencanaan pembangunan bidang ekonomi.
- c. Melaksanakan koordinasi terkait lingkup Bidang Ekonomi dengan OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- d. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian/Lembaga lingkup Bidang Ekonomi.
- e. Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi perencanaan Bidang Ekonomi ditingkat nasional, dan regional.
- f. Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan, harmonisasi perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi ke Kabupaten/Kota.
- g. Pelaksanaan rapat-rapat
- h. Pengadaan alat tulis
- i. Penggandaan laporan pelaksanaan kegiatan.

1. 5. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) selama 12 bulan terhitung mulai Januari - Desember 2022

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Tahun 2022 adalah terhitung mulai Januari sampai dengan Desember 2022 atas dasar pelaksanaan koordinasi baik di tingkat pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, dibutuhkan pendanaan, dimana pada Tahun 2022 ini melalui APBD Provinsi Sumatera Barat dialokasikan dana sebesar Rp. 149.880.353 dan pada APBD Perubahan tahun 2022 pagu anggaran menjadi Rp. 150.815.750 dengan uraian kegiatan :

- a. Pelaksanaan Rapat-Rapat
- b. Belanja Makanan dan Minuman kegiatan
- c. Belanja perjalanan dinas dalam rangka koordinasi/ pengumpulan data perencanaan dan penganggaran ke Kabupaten/Kota;
- d. Belanja cetak laporan ;
- e. Belanja penggandaan/Foto Copy

Adapun ruang lingkup dari Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Tahun 2022 adalah :

- a. Melaksanakan rapat Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dengan OPD dan Instansi Vertikal Provinsi Sumatera Barat.
- b. Melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dengan 9 OPD, 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat
- c. Melaksanakan Pra Musrenbang OPD 1 kali;
- d. Melaksanakan koordinasi bidang ekonomi dengan Pusat, Kementerian dan Lembaga ;
- e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan lingkup bidang Perekonomian

Seluruh uraian kegiatan dimaksud, dituangkan dalam bentuk laporan dengan perincian sebagai berikut :

2.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat

2.1.1. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2023

Penyusunan Rencana Kerja perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 merujuk pada RPJMD 2021 – 2026. Dokumen ini bersifat rencana pembangunan jangka pendek dalam selang waktu satu tahun. Isi dari dokumen RKPD ini adalah penjabaran kebijakan tahunan, target capaian program unggulan dan program kerja pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam satu tahun kedepan (2023). Dimana hal tersebut telah tertuang dengan jelas didalam RPJMD 2021-2026.

Penulisan dokumen RKPD memakan waktu selama enam bulan dengan beberapa kali perbaikan. Tahapan tersebut meliputi penulisan draft rancangan awal RKPD tahun 2023 yang dilanjutkan dengan pembahasan rencana kerja OPD terkait terlebih dahulu. Selanjutnya dilakukan perbaikan dengan penyesuaian target capaian yang harus merujuk pada RPJMD Tahun 2021 – 2026. Dokumen ini akan menjadi draft rancangan akhir RKPD 2023 dengan pembahasan lebih lanjut terkait rencana kerja OPD lingkup Provinsi Sumatera Barat yang sesuai dengan target capaian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan RPJMD 2021-2026. Selanjutnya dilakukan pembahasan dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat terkait rencana kerja OPD lingkup Provinsi Sumatera Barat. Hingga akhirnya dilakukan penetapan dokumen RKPD 2023 Provinsi Sumatera Barat pada 30 Juni 2022 dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022.

RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 disusun dengan maksud agar terwujudnya kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, sinergitas dan sinkronisasi pembangunan antar wilayah dan antar sektor serta terciptanya efektifitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. RKPD dijadikan pedoman saat menjabarkan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan pendekatan *money follows program* dan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS)

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 antara lain:

- a. Terwujudnya penjabaran tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi dan prioritas pembangunan jangka panjang (RPJPD tahun 2005 – 2025) dan RPJMD Tahun 2021-2026.

- b. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan.
 - c. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan.
 - d. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- b. Sebagai dasar dan pedoman dalam penyusunan KUA PPAS Tahun 2023.

Adapun isi pembahasan dokumen RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 pada **lingkup bidang perekonomian** yang telah ditulis oleh tim lingkup bidang ekonomi adalah sebagai berikut :

1. **BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah**

A Potensi Pengembangan Ekonomi Wilayah

Analisis potensi pengembangan ekonomi wilayah diperlukan untuk dapat mengetahui secara konkrit tentang kategori dan subkategori yang mempunyai potensi pengembangan yang baik. Analisis ini diperlukan mengingat masing-masing daerah mempunyai potensi pengembangan yang bervariasi sesuai dengan kondisi daerah. Informasi ini diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah dalam menentukan arah kebijakan, strategi dan prioritas pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah sehingga pertumbuhan ekonomi daerah dapat diwujudkan secara optimal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih maksimal. Potensi pengembangan suatu wilayah dapat dilihat berdasarkan 2 indikator utama yaitu

- a) *Struktur/Kontribusi* kategori dan subkategori yang terkait dalam perekonomian daerah. Pertimbangan suatu kategori dan subkategori mempunyai potensi pembangunan cukup besar apabila kontribusinya terhadap perekonomian daerah cukup besar.
- b) *Laju pertumbuhan* kategori dan subkategori bersangkutan dalam perekonomian daerah. Indikator ini diperlukan untuk pengembangan kategori dan subkategori yang mempunyai potensi yang cukup tinggi sehingga dapat diketahui laju pertumbuhannya.

Kedua indikator di atas dapat digunakan untuk mengetahui potensi pengembangan ekonomi wilayah menurut kategori dan subkategori di Provinsi Sumatera Barat, seperti digambarkan pada Tabel berikut ini.

Tabel Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (%)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021

Kategori	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		PROV	NAS										
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	24,06	13,48	23,61	13,16	23,18	12,81	22,17	12,72	22,38	13,70	21,71	13,28
B	Pertambangan dan Penggalian	4,53	7,18	4,27	7,58	4,26	8,08	4,29	7,26	4,27	6,44	4,20	8,98
C	Industri Pengolahan	10,09	20,52	9,74	20,16	9,09	19,86	8,37	19,70	8,64	19,88	8,81	19,25
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	1,15	0,11	1,19	0,11	1,19	0,11	1,17	0,10	1,16	0,10	1,12
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,07	0,09	0,07	0,09	0,07	0,09	0,07	0,09	0,07	0,09	0,07
F	Konstruksi	9,29	10,38	9,35	10,38	9,64	10,53	10,09	10,75	10,19	10,71	10,20	10,44
G	Pedagang Besar & Eceran; Reparasi, Mobil & Sepeda Motor	14,76	13,19	14,91	13,02	15,31	13,02	15,80	13,01	15,79	12,93	15,77	12,97
H	Transportasi & Pergudangan	12,46	5,20	12,66	5,41	12,66	5,38	12,60	5,57	10,44	4,47	10,30	4,24
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,29	2,93	1,33	2,85	1,36	2,78	1,42	2,78	1,24	2,55	1,27	2,43
J	Informasi dan Komunikasi	4,99	3,62	5,28	3,78	5,47	3,77	5,82	3,96	6,44	4,51	6,62	4,41
K	Jasa Keuangan	3,17	4,19	3,10	4,20	3,01	4,15	2,90	4,24	3,04	4,51	3,28	4,51
L	Real Estate	2,01	2,83	1,97	2,81	1,96	2,74	2,01	2,77	2,06	2,94	2,05	2,94
M,N	Jasa Perusahaan	0,43	1,71	0,43	1,75	0,43	1,80	0,44	1,92	0,44	1,91	0,43	1,91
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	5,82	3,84	5,83	3,67	5,92	3,65	6,13	3,62	6,71	3,76	6,90	3,77
P	Jasa Pendidikan	3,84	3,37	4,13	3,29	4,20	3,25	4,34	3,30	4,70	3,56	4,64	3,56
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,28	1,07	1,34	1,07	1,39	1,07	1,42	1,10	1,62	1,30	1,69	1,30
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,77	1,70	1,84	1,76	1,93	1,81	2,00	1,95	1,88	1,96	1,95	1,96
Produk Domestik Regional Bruto		100,00											

Tabel diatas menggambarkan dari tahun 2016-2021 bahwa Struktur PDRB Sumatera Barat menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Sumatera Barat masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebesar 21,71 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar-Eceran,

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,77 persen; Konstruksi sebesar 10,20 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,30 persen; dan Industri Pengolahan 8,81 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sumatera Barat mencapai 66,79 persen.

Potensi pembangunan wilayah Sumatera Barat dapat dikelompokkan atas beberapa wilayah atau kawasan. Dalam hal ini pengelompokkan didasarkan pada kandungan potensi sumberdaya alam pada masing-masing wilayah. Analisis ini diperlukan untuk dapat merumuskan strategi dan kebijakan pembangunan wilayah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh wilayah dan kawasan bersangkutan, antara lain:

Kawasan Perikanan dan Kelautan : terbagi dalam 2 aktivitas yaitu perikanan air tawar (di daratan) dan perikanan laut/air payau (di wilayah laut). Akitivitas perikanan laut antara lain Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kepulauan Mentawai, Kota Pariaman, Agam dan Kabupaten Pasaman Barat. Sebagai daerah lautan (termasuk kawasan pantai), maka potensi pembangunan yang dimiliki adalah dalam aktivitas budidaya pembesaran dan penangkapan. Dewasa ini daerah-daerah perikanan laut yang cukup potensial untuk dikembangkan guna mendorong proses pembangunan daerah adalah Painan di Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Bungus di Kota Padang, Kota Pariaman dan Kecamatan Sasak di Kabupaten Pasaman Barat. Kawasan Bungus sudah sejak beberapa tahun yang lalu ditetapkan sebagai pusat perikanan laut untuk kawasan Pantai Barat Pulau Sumatera ini. Hal ini dilakukan mengingat hasil penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa Samudra Indonesia yang terletak di kawasan Pantai Barat Sumatera Barat ini ternyata mempunyai potensi ikan Tuna yang besar dengan kualitas yang sangat baik, sementara aktivitas perikanan air tawar dalam bentuk pembenihan, pembesaran hampir seluruh kabupaten/kota memiliki potensi yang dapat dikembangkan.

Kawasan Tanaman Pangan antara lain Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat, Padang RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 II-6 Pariaman, Solok Selatan, Sijunjung, Dharmasraya dan Pesisir Selatan. Daerah ini merupakan daerah subur yang sejak lama berfungsi sebagai “lambung pangan” Sumatera Barat dengan produksi utama adalah padi, palawija dan tanaman pangan lainnya. Guna meningkatkan produktivitas lahan, maka daerah ini sudah sejak lama dilengkapi dengan fasilitas irigasi yang cukup memadai. Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, ke depan daerah ini akan terus

dikembangkan sebagai penghasil utama komoditi pangan untuk daerah Sumatera Barat maupun provinsi tetangga terutama Riau.

Kawasan Perkebunan antara lain di Kabupaten Sijunjung, Padang Pariaman, Agam, Lima Puluh Kota, Pesisir Selatan Tanah Datar Pasaman, Kabupaten Solok, Dharmasraya, Solok Selatan dan Pasaman Barat, maka produk utama daerah ini adalah karet, kelapa sawit, kopi, gambir, kakao dan teh yang merupakan komoditi ekspor utama Sumatera Barat. Dalam meningkatkan nilai tambah telah dibangun pula industri karet remah (crumb-rubber) terutama di kota Padang dan pabrik minyak sawit (crude palm oil/CPO) terutama di daerah Pasaman Barat dan Dharmasraya. Ke depan kawasan ini akan terus dikembangkan sebagai daerah perkebunan besar dalam rangka mendukung peningkatan ekspor daerah Sumatera Barat.

Kawasan Pertambangan, antara lain di Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung dengan produksi utama adalah batubara. Walaupun sejak beberapa tahun terakhir ini terjadi penurunan jumlah produksi karena berkurangnya produksi tambang luar, namun demikian potensi tambang dalam sebenarnya masih sangat besar. Disamping itu kualitas batubara produksi daerah ini terkenal cukup baik dan mempunyai harga yang relatif cukup tinggi.

B Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah diukur berdasarkan pertambahan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) antara 2 (dua) tahun. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat stagnan cenderung melambat dimana ekonomi yang sempat tumbuh 5,30% pada tahun 2016 justru terus menurun hingga hanya mencapai angka 5,05% pada tahun 2019. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 bahkan lebih memperparah kondisi perekonomian daerah yang berkontraksi sekitar -1,6%. Kondisi perekonomian baik global maupun nasional pada tahun 2021 ternyata mengalami rebound dengan kondisi yang lebih membaik. Secara nasional pertumbuhan

ekonomi pada tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69%, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07%, begitupun capaian pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang pada tahun 2021 tumbuh sebesar 3,29%, yang dalam capaiannya masih dibawah rata-rata nasional.

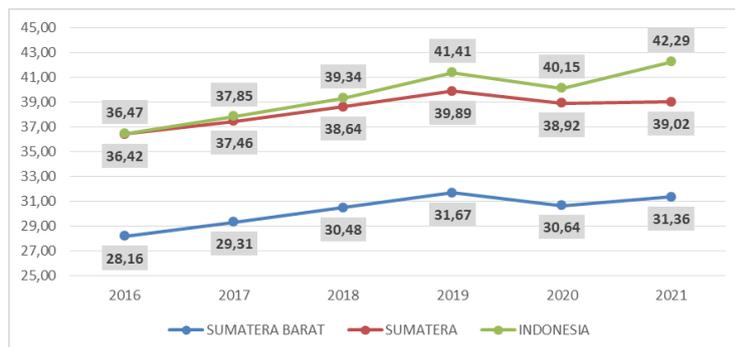
Grafik PDRB ADHK dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat (2021), 2021 Angka Proyeksi Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Dari nilai PDRB ADHK yang dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun bisa dihasilkan nilai PDRB per kapita. Nilai ini menunjukkan tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk per kapita. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir nilai PDRB per kapita Provinsi Sumatera Barat relatif meningkat dari Rp. 28,16 juta pada tahun 2016 menjadi Rp. 31,67 juta pada tahun 2019. Kondisi pandemi COVID-19 membuat pertumbuhan PDRB per kapita terkontraksi ke angka Rp. 30,64 juta dan pada tahun 2021 mencapai angka Rp.31,36 juta. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan tiap penduduk Sumatera Barat secara rata-rata telah mencapai angka Rp. 30 juta lebih. Namun angka ini masih jauh dibawah rata-rata PDRB ADHK per kapita di regional Sumatera maupun Nasional. Pada tahun 2021 ini nilai PDRB ADHK per kapita secara Nasional pada angka Rp.42,29 juta dan regional Sumatera pada angka Rp.39,02 juta. Adapun perkembangan capaian PDRB Per kapita baik Nasional, Sumatera dan Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 2016-2021 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik Perkembangan PDRB ADHK per Kapita Provinsi Sumatera Barat, Pulau Sumatera, dan Nasional Tahun 2016-2021



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Kondisi perekonomian Provinsi Sumatera Barat yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel PDRB Perkapita ADHB dan ADHK di Provinsi Sumatera Barat Taun 2016-2021 (Juta rupiah)

URAIAN	TAHUN											
	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Sumbar	NAS										
PDRB Perkapita ADHB	37,29	47,94	40,19	51,89	42,84	55,99	45,29	59,32	44,03	57,27	45,29	62,23
PDRB Perkapita ADHK	28,17	36,47	29,31	37,85	30,48	39,34	31,67	40,84	30,81	57,26	31,36	42,29

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Berita Resmi Statistik bahwa Laju Pertumbuhan PDRD Sumatera Barat menurut Lapangan usaha yang memiliki daya ungkit besar yakni Lapangan usaha sektor Jasa keuangan dan asuransi sebesar 8,46%, yang kemudian Jasa lainnya sebesar 7,10%, lapangan usaha sektor Informasi dan komunikasi sebesar 6,42% dan jasa

Kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 5,88%. Disamping itu diakibatkan telah longgarnya ketentuan dan aturan terkait dengan pembatasan aktifitas diluar ruangan serta aktifitas di area public dalam bentuk keramaian yang disebabkan adanya pandemic covid turut meningkatkan laju lapangan usaha sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dengan laju cukup signifikan sebesar 5,63%. Sektor lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang memegang kontribusi yang cukup dominan terhadap struktur PDRB Sumatera Barat sebesar 21,71% hanya memiliki laju pertumbuhan sebesar 2,19% dan Sektor lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 15,77% hanya memiliki laju pertumbuhan sebesar 5,12%. Adapun secara lebih rinci laju pertumbuhan PDRB Sumatera Barat menurut Lapangan Usaha pada Tahun 2016-2021 dapat dilihat ppada tabel berikut ini.

Tabel Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2021 (Persen)

Lapangan Usaha	Pertumbuhan Ekonomi					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	2,01	3,43	3,54	2,48	1,16	2,19
2. Pertambangan dan Penggalian	2,00	1,13	5,79	6,22	-1,31	-1,77
3. Industri Pengolahan	4,90	2,27	-0,57	-1,98	-0,54	3,68
4. Pengadaan Listrik & Gas	10,94	4,06	4,09	4,20	-6,81	3,15
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	6,40	3,96	2,24	6,10	-1,04	5,53
6. Konstruksi	6,59	7,23	7,04	8,47	-2,95	2,18
7. Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,41	6,50	7,03	7,29	--1,14	5,12
8. Transportasi dan Pergudangan	7,67	7,17	6,47	4,75	-16,10	2,56
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,62	8,76	8,23	8,11	-15,95	5,63
10. Informasi dan Komunikasi	9,40	8,74	8,57	8,73	9,55	6,42
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	8,03	2,11	0,99	2,29	1,34	8,46
12. Real Estate	5,37	4,49	4,67	6,78	0,22	2,41
13. Jasa Perusahaan	4,94	5,19	5,45	6,20	-3,98	1,13
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,96	4,49	5,97	6,96	-0,59	0,86
15. Jasa Pendidikan	7,85	9,94	7,19	7,94	5,03	1,84
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,47	8,58	7,28	7,54	8,83	5,88
17. Jasa Lainnya	9,35	7,95	7,86	7,50	-10,10	7,10
PDRB SUMATERA BARAT	5,27	5,30	5,16	5,01	-1,62	3,29

Sumber : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2021

Jika dibandingkan capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dengan nasional pada tahun 2021, maka capaian di Sumatera Barat sebesar 3,29% masih dibawah rata-rata capaian Nasional sebesar 3,69%. Dan berdasarkan data Sistem Informasi dan Manajemen data Dasar Regional Bappenas bahwa capaian Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2021 masih jauh dari target RKP Tahun 2021 dengan deviasi lebih dari 5% (>5%) dari nilai target yang ditetapkan. Pertumbuhan ekonomi yang mengalami

rebound cukup tinggi di Pulau Sumatera pada Tahun 2021 yakni Kabupaten Bangka Belitung sebesar 5,05%, Provinsi Jambi sebesar 3,66%, Provinsi Sumatera Selatan sebesar 3,58% dan Kepulauan Riau sebesar 3,43%. Adapun gambaran capaian Pertumbuhan Ekonomi masing-masing Provinsi Sumatera Sumatera tahun 2021 dapat terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi se Sumatera Tahun 2016-2021 (Persen)

PROVINSI/NASIONAL	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Aceh	3,29	4,18	4,61	4,14	-0,37	2,79
2. Sumatera Utara	5,18	5,12	5,18	5,22	-1,07	2,61
3. Sumatera Barat	5,27	5,30	5,14	5,01	-1,62	3,29
4. Riau	2,18	2,66	2,35	2,81	-1,13	3,36
5. Jambi	4,37	4,60	4,69	4,35	-0,44	3,66
6. Sumatera Selatan	5,04	5,51	6,01	5,69	-0,11	3,58
7. Bengkulu	5,28	4,98	4,97	4,94	-0,02	3,24
8. Lampung	5,14	5,16	5,23	5,26	-1,67	2,79
9. Kep.Bangka Belitung	4,10	4,47	4,45	3,32	-2,30	5,05
10. Kep.Riau	4,98	1,98	4,47	4,83	-3,80	3,43
NASIONAL	5,03	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,69

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Sistem Informasi dan Manajemen data Dasar Regional, Bappenas

Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat pada Tahun 2021 yang mengalami perbaikan dibandingkan capaian pada tahun 2020 juga diikuti dengan Pertumbuhan Ekonomi di masing-masing Kabupaten/Kota yang tumbuh lebih baik dan positif. Hal ini menunjukkan bahwa RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 II-17 proses pemulihan ekonomi dapat dinyatakan berhasil namun hal ini perlu dijaga keberlangsungannya agar pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 tidak bersifat semu hanya pembalikan keadaan secara sementara saja namun diharapkan dapat berlangsung konsisten dan lebih lama kedepannya. Secara lebih rinci pertumbuhan ekonomi pada masing-masing Kabupaten/Kota pada tahun 2021 berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota se Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Persen)

NO	KAB/KOTAPROVINSI/NASIONAL	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kab. Kep. Mentawai	5,02	5,12	4,91	4,76	-1,85	2,89
2	Kab. Pesisir Selatan	5,33	5,41	5,35	4,81	-1,11	3,37
3	Kab. Solok	5,31	5,32	5,22	5,07	-1,12	3,32
4	Kab. Sijunjung	5,26	5,26	5,09	4,83	-1,10	2,15
5	Kab. Tanah Datar	5,03	5,11	5,07	5,01	-1,13	3,30
6	Kab. Padang Pariaman	5,52	5,58	5,46	2,51	-10,46	2,18
7	Kab. Agam	5,51	5,51	5,26	4,81	-1,38	3,70
8	Kab. Lima Puluh Kota	5,32	5,33	5,26	5,10	-1,16	3,33
9	Kab. Pasaman	5,07	5,08	5,00	4,84	-0,87	3,39

NO	KAB/KOTAPROVINSI/NASIONAL	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10	Kab. Solok Selatan	5,14	5,15	5,03	4,89	-1,24	3,35
11	Kab. Dharmasraya	5,42	5,44	5,31	4,98	-1,39	3,42
12	Kab. Pasaman Barat	5,34	5,34	5,24	4,49	-1,34	3,75
13	Kota Padang	6,17	6,23	6,09	5,68	-1,86	3,66
14	Kota Solok	5,76	5,76	5,68	5,53	-1,42	3,56
15	Kota Sawahlunto	5,72	5,74	5,52	5,34	-1,27	2,49
16	Kota Padang Panjang	5,80	5,80	5,73	5,59	-1,44	3,46
17	Kota Bukittinggi	6,05	6,08	6,02	5,88	-1,74	3,61
18	Kota Payakumbuh	6,08	6,12	6,05	5,92	-1,66	3,58
19	Kota Pariaman	5,59	5,61	5,50	5,33	-1,32	3,53
	Sumatera Barat	5,27	5,30	5,16	5,05	-1,60	3,29
	NASIONAL	5,03	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,69

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada Tahun 2021, maka capaian tersebut dapat dikelompokkan pada : 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota yang berada di bawah Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 sebesar 3,29 sebanyak 4 (empat) Kabupaten/Kota yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Sawahlunto. 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota yang berada di atas Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 sebesar 3,29 namun dibawah Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional sebesar 3,69% sebanyak 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota yakni Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok, Kab. Tanah Datar, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Pasaman, Kab. Solok Selatan, Kab. Dharmasraya, Kota Solok, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 II-18 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota yang berada di atas Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional sebesar 3,69% sebanyak 2 (dua) Kabupaten yakni Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman Barat.

C Laju Inflasi

Inflasi merupakan suatu kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum pada suatu negara/daerah dalam kurun waktu yang terus-menerus (kontinu) disebabkan karena ketidakseimbangan arus uang dan barang sesuai dengan mekanisme pasar, yaitu oleh faktor permintaan (demand) dan penawaran (supply) barang yang beredar di pasaran. Berbagai faktor yang menyebabkan kenaikan harga secara menyeluruh antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, tingginya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi, atau ketidaklancaran distribusi barang. Tingginya inflasi berdampak pada

penurunan daya beli masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 cenderung meningkat dari bulan Januari sampai dengan Desember, hal ini dikarenakan posisi inflasi di bulan Januari mengalami kontraksi dikarenakan adanya pandemic covid 19 dan banyaknya aktifitas masyarakat dan ekonomi yang belum berjalan, adapun perkembangan lanju inflasi selama tahun 2021 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik Laju Inflasi Bulanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2022

Mengutip dari Berita Resmi Statistik Provinsi Sumatera Barat terkait dengan Perkembangan Indeks Harga Konsumen Sumatera Barat Desember 2021 Nomor : 01/01/13/Th.XXV pada tanggal 3 Januari 2022 bahwa Inflasi pada tahun 2021 terjadi sebanyak 7 (tujuh) kali, yakni terjadi pada bulan Januari, Maret, Mei, September, Oktober, November, dan Desember. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan November sebesar 0,65 persen dan terendah terjadi pada bulan September sebesar 0,10 persen. Sementara itu, deflasi terjadi pada bulan Februari, April, Juni, Juli, dan Agustus. Deflasi tertinggi terjadi pada bulan Februari sebesar 0,38 persen dan deflasi terendah terjadi pada bulan April sebesar 0,01 persen.

Inflasi Sumatera Barat terjadi karena adanya kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada 10 (sepuluh) kelompok pengeluaran, yakni kelompok kesehatan sebesar 6,23 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 6,17 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 2,99 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,00 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar sebesar 1,63 persen; kelompok transportasi sebesar 1,54 persen; kelompok penyedia makanan dan minuman/restoran sebesar 1,38 persen; kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,88 persen; kelompok pakaian dan

alas kaki sebesar 0,72 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,70 persen. Sedangkan kelompok pendidikan mengalami deflasi sebesar 0,12 persen. Kelompok yang dominan memberikan andil inflasi Sumatera Barat selama tahun 2021 adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,27 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar sebesar 0,24 persen; kelompok transportasi sebesar 0,22 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,13 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya masing-masing sebesar 0,12 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,10 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,05 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,04 persen. Sedangkan kelompok pendidikan memberikan andil deflasi sebesar 0,01 persen. Secara lebih detail Inflasi dan Andil Inflasi Sumatera Barat Tahun 2021 di Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

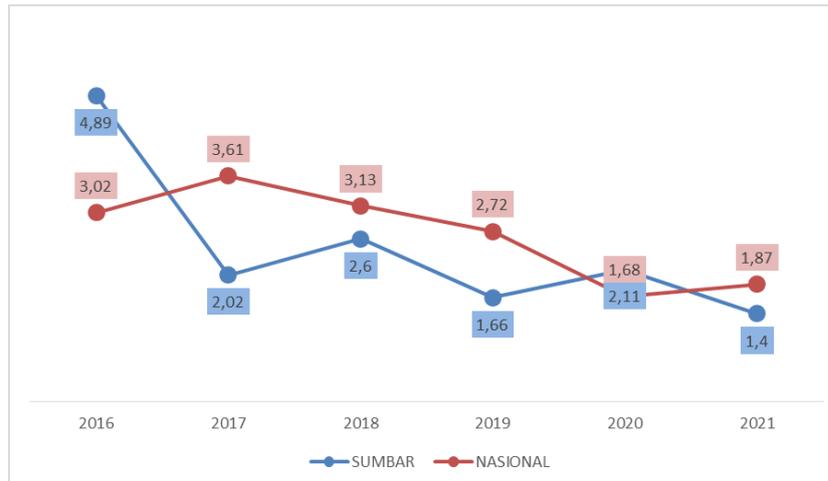
Tabel Inflasi dan Andil Inflasi Sumatera Barat Tahun 2021

Kelompok Pengeluaran	Inflasi	Andil Inflasi
Umum	1,40	1,40
Makanan, Minuman dan Tembakau	0,88	0,27
Pakaian dan Alas Kaki	0,72	0,05
Perumahan, Air, Listrik dan bahan Bakar Rumah Tangga	1,63	0,24
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	2,99	0,12
Kesehatan	6,23	0,10
Transportasi	1,54	0,22
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0,70	0,04
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	6,17	0,12
Pendidikan	-0,12	-0,01
Penyediaan Makanan dan Minuman/restoran	1,38	0,13
Perawatan pribadi dan jasa lainnya	2,00	0,12

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Inflasi di Sumatera Barat secara tahun kalender dan inflasi year on year pada bulan Desember 2021 Sumatera Barat tercatat sebesar 1,40 persen. Sedangkan laju inflasi tahun kalender dan laju inflasi year on year pada bulan yang sama tahun 2020 sebesar 2,11 persen dan tahun 2019 mengalami inflasi sebesar 1,66 persen. Angka capaian inflasi di Sumatera Barat selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan dan capaian angka inflasi tahun 2021 merupakan yang terendah, yang dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik Perkembangan Laju Inflasi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2021



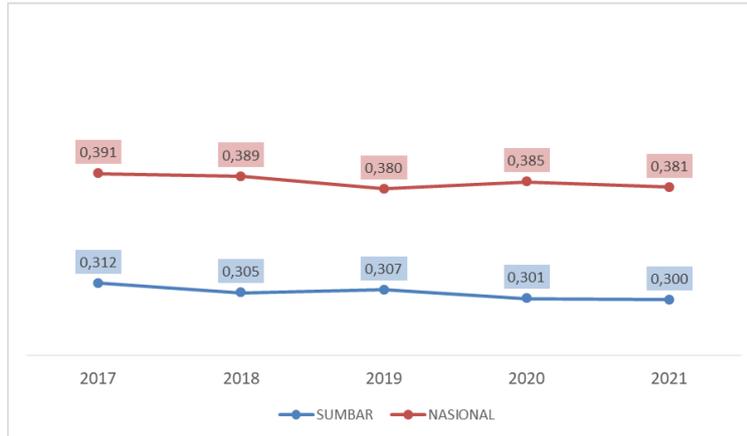
Sumber : BPS (2021) *2021 Kondisi sampai Bulan Desember

D Gini Ratio / Ketimpangan Pendapatan

Salah satu ukuran dalam menilai ketimpangan pendapatan masyarakat adalah koefisien Gini atau *Gini Ratio*. Rasio ini merupakan salah satu ukuran umum untuk melihat berapa pemerataan pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi pada suatu wilayah. Indeks Gini memiliki kisaran nilai antara 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”.

Ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Barat cenderung mengalami penurunan dari tahun 2016 pada angka 0,312 menjadi 0,300 pada kondisi September tahun 2021. Angka ini berada di bawah angka *Gini Ratio* Nasional yang berada pada kisaran 0,315. Hal ini menunjukkan bahwa baik Sumatera Barat maupun Indonesia berada pada ketimpangan yang sedang. Pencapaian *Gini Ratio* Sumatera Barat pada kondisi September 2021 tersebut sedikit lebih baik sedikit dibandingkan capaian *Gini Ratio* pada kondisi Bulan Maret 2021 sebesar angka 0,306.

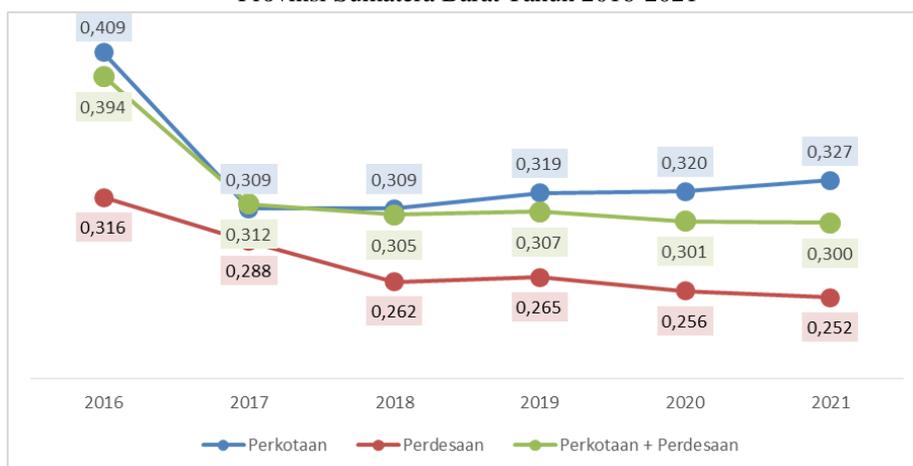
Grafik Perkembangan Gini Ratio Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2021



Sumber : BPS (2021) *2021 Angka Proyeksi Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Jika dilihat berdasarkan karakteristik wilayahnya antara kawasan perkotaan dan perdesaan, ketimpangan pendapatan relatif lebih tinggi di kawasan perkotaan dibandingkan dengan kawasan perdesaan. Hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan ketimpangan pendapatan lebih terkonsentrasi di kawasan perkotaan bukan di kawasan perdesaan. Pada September 2021 Gini Ratio perkotaan adalah 0,327 turun 0,002 poin dibandingkan periode Maret 2021 yang sebesar 0,329 dan naik 0,007 poin dibandingkan periode setahun sebelumnya yakni pada Septemembr 2020 sebesar 0,320. Pada wilayah perdesaan nilai Gini Ratio September 2021 menunjukkan angka 0,252 turun 0,002 poin dibanding Maret 2021 sebesar 0,254 dan turun sebesar 0,004 poin dari September 2020 yang tercatat sebesar 0,256.

Grafik Perbandingan Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Perkotaan dan Perdesaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan data BPS, tingkat ketimpangan di Sumatera Barat yang diukur dari Gini Ratio Tahun 2021 jauh lebih baik dibandingkan dengan Provinsi lain di Sumatera kecuali Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan capaian Gini ratio sebesar 0,247.

Tabel Gini Ratio Provinsi se Sumatera Tahun 2021

No	Provinsi	Gini Ratio
1	Aceh	0.323
2	Sumatera Utara	0.313
3	Sumatera Barat	0.300
4	Riau	0.327
5	Jambi	0.315
6	Sumatera Selatan	0.340
7	Bengkulu	0.321
8	Lampung	0.314
9	Kep. Bangka Belitung	0.247
10	Kep. Riau	0.339
	Nasional	0.381

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional

Gini Ratio di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat hanya dapat diukur pada kondisi Bulan maret setiap tahunnya. Berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Barat bahwa capaian gini ratio tertinggi pada tahun 2021 yakni di Kota Padang dengan capaian 0,343 dan juga Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan capaian 0.321. sedangkan capaian terendah yakni di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan capaian 0,244 dan Kabupaten Solok dengan capaian 0,246. Adapun capaian Gini Ratio dari masing-masing Kabupaten/Kota dapat terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel Indeks Gini Ratio menurut Kab/Kota se Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Kondisi Maret)

No	KABUPATEN/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kab. Kep. Mentawai	0.310	0.319	0.306	0.306	0.305	0.321
2	Kab. Pesisir Selatan	0.270	0.299	0.255	0.336	0.273	0.253
3	Kab. Solok	0.310	0.294	0.303	0.246	0.264	0.246
4	Kab. Sijunjung	0.330	0.333	0.300	0.285	0.277	0.270
5	Kab. Tanah Datar	0.300	0.262	0.288	0.293	0.269	0.250
6	Kab. Padang Pariaman	0.260	0.280	0.296	0.278	0.273	0.269
7	Kab. Agam	0.290	0.279	0.257	0.297	0.257	0.272
8	Kab. Lima Puluh Kota	0.270	0.262	0.283	0.251	0.278	0.244
9	Kab. Pasaman	0.300	0.260	0.266	0.238	0.222	0.248
10	Kab. Solok Selatan	0.310	0.299	0.309	0.330	0.310	0.277
11	Kab. Dharmasraya	0.300	0.252	0.264	0.295	0.307	0.268
12	Kab. Pasaman Barat	0.310	0.286	0.290	0.278	0.280	0.261
13	Kota Padang	0.350	0.338	0.344	0.283	0.258	0.343
14	Kota Solok	0.340	0.299	0.296	0.312	0.312	0.277
15	Kota Sawahlunto	0.320	0.299	0.310	0.271	0.286	0.295
16	Kota Padang Panjang	0.380	0.300	0.290	0.289	0.300	0.306
17	Kota Bukittinggi	0.330	0.313	0.337	0.322	0.394	0.286
18	Kota Payakumbuh	0.340	0.303	0.302	0.267	0.265	0.316

No	KABUPATEN/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
19	Kota Pariaman	0.340	0.301	0.316	0.276	0.325	0.301
	Sumatera Barat	0.330	0.318	0.321	0.306	0.305	0.306

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

E Aspek Pelayanan Umum

1. Fokus Layanan Urusan Wajib Tidak terkait Pelayanan Dasar

a) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Keberadaan koperasi di tengah-tengah masyarakat mampu memberikan nilai tambah terhadap pendapatan masyarakat khususnya anggota koperasi dari tahun ke tahun. Nilai tambah pendapatan masyarakat dalam bentuk PDRB koperasi tersebut berasal dari pendapatan koperasi yang berasal dari usaha yang dijalankan oleh koperasi, baik dari usaha simpan pinjam maupun usaha sektor riil seperti pengadaan saprodi pada koperasi produsen, waserda pada koperasi konsumen, pemasaran hasil produksi anggotanya pada koperasi pemasaran dan jasa biro pariwisata, travel pada koperasi jasa dan usaha-usaha lainnya yang sesuai dengan jenis koperasi serta jenis usaha yang tercantum di dalam anggaran dasar masing-masing koperasi. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian masyarakat Indonesia khususnya Sumatera Barat. Keberadaan UMKM diharapkan dapat menjadi daya ungkit bagi masyarakat Sumatera Barat yang memiliki jiwa berwirausaha. Aktivitas UMKM merupakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup dan memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam aktivitasnya. Untuk itu dibutuhkan perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya UMKM Perkembangan jumlah koperasi di Sumatera Barat Tahun 2016-2021 setiap tahunnya mengalami penurunan. Hal ini dapat disebabkan karena minat masyarakat kepada Koperasi yang konvensional semakin menurun dan lebih menyukai koperasi syariah sedangkan pertumbuhan koperasi syariah belumm teralu signifikan. Pada tahun 2020 dan 2021, dengan adanya pandemic covid maka banyak koperasi yang tidak menjalankan perannya sebagaimana mestinya. Secara lebih detail kinerja urusan Pemerintahan bidang Koperasi dan UMKM dapat dilihat pada tabel berikut ini baik yang diukur dengan indicator kinerja pada RPJMD Tahun 2016-2021 dan RPJMD Tahun 2021-2026.

Tabel Perkembangan Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah pada RPJMD Tahun 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase koperasi aktif	%	69,96	77,6	78,03	56,21	50,34	48,94
2	Peningkatan nilai Asset Koperasi	Rp. Juta	3.750.833	4.277.051	4.769.705	5.225.355	5.426.381	5.520.722,82
3	Persentase Peningkatan Omset Koperasi	%	-	10,79	10,44	9,55	3,41	-7,07
4	Jumlah Koperasi yang memiliki Sertifikat NIK	Koperasi	225	732	1.055	1.391	570	1.506
5	Jumlah Koperasi	Unit	4.047	3.549	3.624	3.805	3.981	4.034
6	Jumlah Anggota Koperasi	Orang	547.784	590.059	591.549	617.913	606.696	650.810

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat

Tabel Perkembangan Capaian dan Target Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah pada RPJMD Tahun 2021-2026

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2021		Target Kinerja				
			T	R	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase Koperasi yang berkualitas	%	16,43	2,65	17,94	20,49	24,39	29,21	35,01
2	Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	%	1,90	3,92	2	3	3,7	4,2	5

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat

b) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Perkembangan realisasi investasi PMDN cukup berfluktuatif, dimana pada rentang tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Namun kondisi tersebut mengalami perbaikan/peningkatan kembali mulai tahun 2018 dan 2019 dan kembali mengalami penurunan Kembali pada tahun 2020 dan 2021. Perkembangan realisasi investasi PMA juga cukup berfluktuatif, dimana pada rentang tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan yang sangat baik. Namun kondisi tersebut mengalami kemunduran/penurunan pada tahun 2018, 2019, dan 2020 hingga 2021 dengan adanya pandemic covid 19 dan pencapaiannya pun di tahun 2021 dibawah target yang telah ditetapkan. Namun demikian juga terdapat permasalahan investasi di Sumatera Barat meskipun iklim investasi semakin membaik. Adapun permasalahan tersebut antara lain masih lemahnya dukungan infrastruktur menunjang potensi investasi serta masih terdapat regulasi kebijakan di daerah belum sepenuhnya mendukung potensi investasi, adanya Permasalahan lahan yang ada disumatera Barat yang dominan merupakan Tanah ulayat, Tanah kaum dan sebagainya sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk proses penyelesaian permasalahan lahan, terdapatnya permasalahan Tata Ruang atau Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) sehingga banyak pelaku usaha/Perusahaan

PMA/PMDN tidak jadi melanjutkan rencana investasinya dikarenakan tidak ada kesesuaian tata ruang untuk investasi. Serta Sistem Perizinan Online Single Submissin (OSS) masih belum sempurna dalam pengembangan sehingga terdapat kendala dalam pelaksanaan perizinan di daerah. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2021 ditargetkan sebesar 3,7% dengan realisasi sebesar 3,4%, Rendahnya realisasi IKM hal ini karena kurangnya sarana prasarana RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 II-80 layanan PTSP seperti tempat parkir yang terbatas dan belum memadai, belum memiliki gedung sendiri, terbatasnya jumlah dan kualitas personil pelaksana (SDM) yang masih butuh pelatihan-pelatihan untuk sertifikasi kompetensi bidang pelayanan. Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu tahun 2021 sebesar 100% dengan pencapaian dikategorikan keberhasilan Memuaskan. Pencapaian urusan wajib Penanaman Modal secara umum dapat tercapai dengan baik meskipun ada beberapa pencapaian yang belum mencapai target seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel Perkembangan Indikator Urusan Wajib Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat pada RPJMD Tahun 2016-2021

Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA											
	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1. Jumlah nilai investasi (PMA) (US\$ ribu)	43.729,75	79.268,10	48.102,73	194.425,20	52.913,00	180.799,70	120.000,00	157.113,90	125.000,00	125.589,40	70.427,20	66.949
2. Jumlah nilai investasi (PMDN) (Rpjuta)	3.280.628	3.795.575	3.379.046	1.516.964	3.480.418	2.309.449	2.750.000	3.026.645	2.850.000	3.106.178	3 803 147	4.183.713
3. Indeks kepuasan masyarakat (rasio)	3,18	3,18	3,3	3,23	3,4	3,27	3,5	3,27	3,37	3,31	3,7	3,4
4. Perizinan tepat waktu (%)	76,29	76,29	80	80,44	90	84,10	90	82,51	83	84,17	100	102,35

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

Tabel Perkembangan Capaian dan Target Indikator Urusan Wajib Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat pada RPJMD Tahun 2021-2026

Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA						
	2021		2022	2023	2024	2025	2026
	T	R	T	T	T	T	T
Persentase peningkatan investasi di provinsi (%)	6,00	-16,69	6,00	8,00	9,50	10,50	11,50

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

2. Urusan Pilihan

a) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Capaian urusan pilihan Pariwisata pada tahun 2016-2021 menunjukkan kenaikan dan penurunan jumlah kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat dari tahun 2016 sampai tahun 2021 disebabkan oleh faktor yang berbeda-beda pada tahun yang

bersangkutan. Pada tahun 2016 sampai 2017 kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegaran mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh keberhasilan pemerintah provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan berbagai event baik berskala nasional maupun internasional, seperti penyelenggaraan event Tour de Singkarak serta dukungan pada pelaksanaan event daerah dan partisipasi promosi pada event pariwisata nasional dan internasional. Selain itu kemenangan Sumatera Barat tahun lalu pada ajang World Halal Tourism Awards Tahun 2016 untuk dua kategori yaitu World's Best Halal Culinary Destination dan World's Best Halal Destination. Pada tahun 2018 Sumatera Barat kembali mendapatkan penghargaan sebagai 10 Destinasi Wisata Halal Unggulan pada acara Inaugural Report of Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) di Jakarta tanggal 7 Desember 2018. Kemenangan ini telah meningkatkan citra positif pariwisata Sumatera Barat baik di mata nasional maupun internasional. Sedangkan keberhasilan capaian indikator kinerja persentase peningkatan wisatawan mancanegara masih didominasi oleh tingginya minat wisatawan mancanegara untuk *surfing* di pantai Kepulauan Mentawai. Pada Tahun 2018 kunjungan wisatawan mancanegara tidak mencapai target yang ditetapkan (-3,45%). Penurunan kunjungan terjadi pada bulan desember 2018 disebabkan beberapa bencana alam di akhir tahun yang terjadi di Sumatera Barat, antara lain, jembatan putus di Kayu Tanam yang merupakan akses utama Padang-Bukittinggi, longsor yang beberapa kali terjadi di jalur alternatif Padang-Bukittinggi melalui Sitinjau Laut, Solok dan kondisi jalan alternatif Padang-Bukittinggi melalui Malalak yang juga diragukan. Tsunami yang melanda Banten dan Lampung juga berpengaruh terhadap psikologi wisatawan yang kemudian lebih memilih untuk menjauhi pantai atau pulau. Pada tahun 2019 kunjungan wisatawan nusantara tidak mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu hanya meningkat 1,19 %. Masih rendahnya kenaikan kunjungan wisatawan nusantara ini dipengaruhi oleh kenaikan harga tiket domestik sejak Januari 2019. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan kunjungan wisatawan mancanegara yang sangat signifikan, yaitu hanya 10.875 orang wisman yang datang ke Sumatera Barat (-82,21%). Penyebab utama penurunan kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat adalah pandemi covid-19 yang melanda dunia internasional termasuk Sumatera Barat sendiri. Tingginya angka penyebaran virus corona di Indonesia juga menyebabkan pemerintah mengeluarkan peraturan larangan warga negara asing masuk ke Indonesia. Berikut ini tabel

perkembangan indikator Urusan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sebagai berikut.

Tabel Perkembangan Indikator Urusan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat pada RPJMD Tahun 2016-2021

No	Aspek/ Fokus/ Bidang/ Urusan/ Indikator/Kinerja Pembangunan Daerah	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1	Peningkatan Wisatawan Nusantara (% akumulasi)	5	5,30	10	11,62	15	15,76	20	17.14	25	15.32	30	-32,47
2	Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara (% akumulasi)	7,50	7,54	15,00	13,99	22,50	10,48	30	31.94	37	-86.11	44,5	-186,11

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat

Tabel Perkembangan Capaian dan Target Indikator Urusan Pariwisata pada RPJMD Tahun 2021-2026

Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator/Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA						
	2021		2022	2023	2024	2025	2026
	T	R	T	T	T	T	T
1. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)	1	-100	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
2. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi (%)	1,5	-40,23	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
3. Tingkat hunian akomodasi (%)	25,87	40	30,80	40,32	50,30	55,25	58,67

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat

b) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dijelaskan bahwa perdagangan merupakan tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa didalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Sub Urusan Perdagangan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari : perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standarisasi dan perlindungan konsumen. Sektor perdagangan semenjak tahun 2016 hingga tahun 2021 merupakan sektor lapangan usaha yang cukup dominan setelah Sektor Pertanian dan juga memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian di Sumatera Barat.

Tabel Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Pada RPJMD Tahun 2016-2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	14,59	14,91	15,30	15,78	15,76	
2	Neraca Perdagangan	US\$ Juta	1.363,03	1.600,01	1.052,27	900,83	1.345,44	

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat

Tabel Perkembangan Capaian dan Target Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan pada RPJMD Tahun 2021-2026

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA						
	2021		2022	2023	2024	2025	2026
	T	R	T	T	T	T	T
1. Pertumbuhan Nilai Ekspor non migas (Rp. Juta)	1393,13	3.066,93	1420,99	1449,41	1478,40	1507,97	1538,12
2. Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	88	91,4	88	89	89	90	90
3. Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (%)	22,35	42,05	23	25	26	26	26,5
4. Tertib Usaha	60	0	63	64	67	68	70
5. Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	28	25,89	28	27,5	27,5	27	27
6. Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (%)	70	88,10	72	74	76	78	80
7. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	6	5,04	6	6	6	6	6
8. Nilai sektor perdagangan dalam PDRB (Rp. Triliun)	39,30	39,86	41,27	44,16	48,57	53,43	58,78

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat

c) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dijelaskan bahwa perindustrian merupakan tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri. Sedangkan industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Peranan sektor industri terhadap perekonomian daerah dapat dilihat melalui indikator Kontribusi sektor industri terhadap PDRB dan laju pertumbuhan industri. Selama periode 2016-2021, sektor PDRB semakin menurun kontribusinya meskipun masih tetap dominan di Sumatera Barat dan juga cenderung mengalami laju pertumbuhan yang selalu kontraksi di tahun 2018 sd 2020 dan kembali meningkat di tahun 2021. Secara lebih rinci capaian indikator kinerja urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian pada RPJMD Tahun 2016-2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kontribusi Lapangan usaha Industri terhadap PDRB	%	10,11	9,71	9,10	8,37	8,38	8,81
2	Laju Pertumbuhan Industri	%	4,90	2,27	-0,57	-1,95	-0,54	3,68

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Tabel Perkembangan Capaian dan Target Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian pada RPJMD Tahun 2021-2026

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA						
	2021		2022	2023	2024	2025	2026
	T	R	T	T	T	T	T
1. Persentase pertambahan jumlah industri besar di provinsi (%)	0,41	1,33	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
2. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (%)	0,13	102	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
3. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	59	25,33	82	84	86	88	90
4. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin perluasan Industri (IPI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	90	0	90	92	92	94	94
5. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	90	100	90	90	90	90	90
6. Persentase informasi industri yang tersedia secara lengkap dan terkini (%)	90	85,71	90	90	90	90	90
7. Nilai produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM) (Rp. Triliun)	15,4	11,36	15,7	16	16,3	16,7	17
8. Jumlah pelaku industri kecil dan menengah (unit usaha)	39.403	38.174	41.373	43.263	45.363	47.673	50.193

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat

3. Fokus Layanan Urusan Penunjang

a Unsur Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundangundangan untuk memperoleh persetujuan bersama. Berdasarkan pasal 312

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Selanjutnya, rancangan Perda yang telah disetujui diajukan ke Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi bersama dengan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 II-102 APBD. Dalam hal menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, gubernur menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan Peraturan Kepala Daerah. Namun bila menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, kepala daerah bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima. Namun dalam pelaksanaan unsur keuangan tidak hanya sekedar memproses menjadi APBD namun juga terkait dengan penatausahaan, akuntansi, pelaporan serta terkait juga dengan asset dan pendapatan. Adapun ketercapaian unsur pendukung keuangan dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel Perkembangan Capaian dan Target Indikator Unsur Keuangan pada RPJMD Tahun 2021-2026

Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA						
	2021		2022	2023	2024	2025	2026
	T	R	T	T	T	T	T
1. Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	8,59	7,21	8,51	8,43	8,35	8,27	8,19
2. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	5	6,82	4,6	4,2	3,8	3,6	3
3. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	3,6	2,37	3,58	3,56	3,55	3,54	3,53
4. Manajemen Aset	100	100	100	100	100	100	100
5. Rasio anggaran SiLPA terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	3,68	8,96	3,64	3,61	3,57	3,53	3,50
6. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100	100	100	100	100	100	100
7. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	86,53	-	87,01	87,05	87,24	87,55	88,61
8. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (%)	100	0	100	100	100	100	100

Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA						
	2021		2022	2023	2024	2025	2026
	T	R	T	T	T	T	T
10. Rasio PAD terhadap PDRB (%)	1,81	1,02	1,83	1,85	1,85	1,88	1,89
11. Persentase Peningkatan PAD (%)	3,4	13,78	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat dan Bapenda Provinsi Sumatera Barat

F Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Daya saing juga merefleksikan tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Untuk peningkatan daya saing ada dua strategi yang ditetapkan yaitu :

a. Strategi pertama

Dengan memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh manusia menurut tingkat permintaan yang tinggi, dimana barang dan jasa tersebut sudah diproduksi oleh bangsa-bangsa lain, tetapi dengan sentuhan teknologi dan etos kerja yang lebih baik, maka suatu daerah akan mampu memproduksi barang dan jasa tersebut lebih kompetitif dibandingkan dengan yang telah dihasilkan oleh produsen terdahulu. Barang dan jasa yang kompetitif adalah yang kualitasnya unggul, harganya relatif murah dan pasokannya dapat memenuhi kebutuhan serta selera konsumen baik di pasar domestik, regional maupun global. Pemetaan dan optimalisasi sektor unggulan, yaitu sektor yang paling dominan kontribusinya terhadap perekonomian daerah. Yang dikategorikan ke dalam sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya tinggi dan kontribusinya terhadap PDRB besar. Berdasarkan kontribusi lapangan usaha terhadap PDRB Sumatera Barat, sektor pertanian, perdagangan, transportasi dan pergudangan serta konstruksi merupakan sektor andalan bagi Provinsi Sumatera Barat. Namun laju pertumbuhan terutama pada sektor pertanian cenderung menurun setiap tahunnya sehingga perlu upaya peningkatan produktifitas mengingat sektor ini lebih dari 20% mendominasi PDRB Sumatera Barat. Sebagai bagian dari upaya peningkatan penghasilan masyarakat, maka kedepan optimalisasi pertumbuhan perekonomian juga akan diarahkan pada sektor perdagangan dan industri pengolah serta sektor pariwisata yang selama ini digambarkan dengan sektor akomodasi dan makam minum. hal ini melihat potensi laju pertumbuhan yang selama ini cenderung bergerak naik secara signifikan serta cukup besarnya potensi yang dapat

dikembangkan pada sektor lapangan usaha tersebut yang selama ini belum dikelola dengan baik dan terpadu.

b. Strategi kedua

Penyediaan infrastruktur pendukung konektivitas antar wilayah terutama pada daerah yang belum nnerkembang, terisolir dan perbatasan serta penyediaan infrastruktur pendukung konektifitas yang mendukung kawasan sentra pproduksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan, penyediaan infrastruktur pemenuhan pelayanan dasar terutama mendukung peningkatan akses air bersih serta sanitasi, peningkatan kemampuan finansial dan kesempatan kerja, dukungan kebijakan pemerintah, dan peningkatan stabilitas ekonomi makro. Faktor-faktor tersebut perlu menjadi prioritas dalam upaya peningkatan daya saing daerah.

G Aspek-aspek Penting Dalam Peningkatan Daya Saing

1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah terkait dengan daya saing daerah adalah kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah berada di dalam dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan nilai tambah bagi peningkatan daya saing daerah. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan aspek kemampuan ekonomi daerah dalam peranannya sebagai pendorong daya saing daerah adalah indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Pengeluaran riil per kapita atau angka konsumsi Rumah Tangga (RT) per kapita Sumatera Barat selama periode 2016-2021 berfluktuasi. Pengeluaran riil perkapita Sumatera Barat tahun 2021 sebesar 10,790 juta rupiah per tahun lebih rendah dari tahun 2019 sebesar 10,925 juta rupiah pertahun namun lebih tinggi dari tahun 2020 sebesar 10,733 juta rupiah per tahun. Sementara itu, menurut kabupaten/kota, pengeluaran riil per kapita Tahun 2021 terbesar berada di Kota Padang, yaitu sebesar 14,754 juta rupiah pertahun dan terendah berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yaitu sebesar 6,321 juta rupiah pertahun yang tergambar dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan di Sumatera Barat 2016-2021

No	Kabupaten/Kota	Pengeluaran Riil per Kapita(Ribu Rupiah)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten							
1	Kep. Mentawai	5.771	6.010	6.211	6.429	6.281	6.321
2	Pesisir Selatan	8.605	8.819	9.089	9.444	9.212	9.270
3	Solok	9.664	9.743	10.035	10.309	10.171	10.215
4	Sijunjung	9.895	10.093	10.277	10.395	10.361	10.389

Tabel Rincian Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan
Menurut Kelompok Makanan dan Bukan Makanan di Sumatera Barat
Tahun 2016-2021 (Rupiah)

KELOMPOK	2016	2017	2018	2019	2020	2020
Kelompok Makanan						
Padi-padian	86.422,01	82.312	75.273	78.893	77.469	78.796
Umbi-umbian	6.648,03	7.412	7.294	6.621	7.026	7.948
Ikan/udang/cumi/kerang	45.662,94	50.904	53.945	55.564	54.748	61.633
Daging	19.160,59	22.509	20.823	23.103	22.997	24.849
Telur dan susu	27.721,50	30.469	29.964	29.260	30.803	32.538
Sayur-sayuran	52.885,30	51.253	55.008	45.004	57.053	63.344
Kacang-kacangan	7.006,73	7.743	7.596	7.646	7.550	8.543
Buah-buahan	17.955,33	22.113	23.980	23.926	35.530	24.137
Minyak dan kelapa	18.914,22	20.070	19.361	18.768	20.340	23.094
Bahan minuman	14.897,25	15.395	14.907	14.184	15.611	16.006
Bumbu-bumbuan	5.292,08	5.210	6.508	6.253	6.926	7.747
Konsumsi lainnya	6.137,75	7.451	7.414	7.096	7.215	8.831
Makanan dan minuman jadi	150.212,20	178.618	199.104	207.963	213.498	216.587
Rokok	78.410,09	82.585	83.694	84.976	88.086	93.977
Jumlah makanan	537.236,03	584.045	604.871	609.258	644.853	668.029
Kelompok Bukan Makanan						
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	206.253,24	204.800	241.121	242.306	260.524	278.654
Aneka komoditas dan jasa	112.613,26	115.478	126.357	133.856	146.459	158.552
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	42.070,20	43.362	48.599	51.197	53.208	49.587
Komoditas tahan lama	50.126,66	61.280	71.500	73.395	67.511	64.804
Pajak, pungutan, dan asuransi	17.625,57	28.524	32.866	35.461	39.955	47.314
Keperluan pesta dan upacara/kenduri	19.099,56	16.314	23.316	19.406	22.541	14.717
Jumlah bukan makanan	447.788,50	469.758	543.759	555.621	590.197	613.629
JUMLAH	985.024,53	1.053.803	1.148.630	1.164.879	1.235.050	1.281.658

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat

Tabel Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Rupiah) Tahun 2020-2021

Kab/Kota	Makanan		Bukan Makanan		Jumlah	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Kab. Kepulauan Mentawai	622.608	634.621	314.320	418.263	936.928	1.052.884
Kab. Pesisir Selatan	597.492	576.013	506.723	459.491	1.104.215	1.035.504
Kab. Solok	600.132	630.953	453.572	427.685	1.053.704	1.058.638
Kab. Sijunjung	591.332	621.295	496.364	568.919	1.087.696	1.190.214

Kab/Kota	Makanan		Bukan Makanan		Jumlah	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Kab. Tanah Datar	642.608	653.022	465.416	486.966	1.108.024	1.139.988
Kab. Padang Pariaman	619.089	641.175	465.216	516.563	1.084.305	1.157.738
Kab. Agam	601.094	604.055	464.627	482.814	1.065.721	1.086.869
Kab. Lima Puluh Kota	615.574	660.545	433.468	508.419	1.049.042	1.168.964
Kab. Pasaman	550.704	55.505	413.499	426.085	964.203	981.135
Kab. Solok Selatan	624.654	674.664	561.394	635.193	1.186.048	1.309.857
Kab. Dharmasraya	656.598	696.566	647.889	668.293	1.304.487	1.364.859
Kab. Pasaman Barat	571.032	611.201	442.391	43.628	1.013.423	1.047.481
Kota Padang	759.363	797.755	941.130	1.006.585	1.700.493	1.804.340
Kota Solok	707.010	697.189	765.732	681.828	1.472.742	1.379.017
Kota Sawahlunto	648.425	694.459	706.917	683.978	1.355.342	1.378.437
Kota Padang Panjang	710.166	666.873	1.016.409	737.619	1.726.575	1.404.492
Kota Bukittinggi	796.071	873.722	861.872	952.493	1.657.943	1.826.215
Kota Payakumbuh	716.665	732.493	845.525	817.015	1.562.190	1.549.508
Kota Pariaman	764.498	733.262	733.255	685.428	1.497.753	1.418.690
Provinsi Sumatera Barat	644.853	668.029	590.197	613.629	1.235.050	1.281.658

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

H Potensi Ekonomi Lain

Salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru Provinsi Sumatera Barat adalah sector pariwisata. Potensi pariwisata Sumatera Barat sangat besar, baik wisata alam, wisata budaya maupun wisata religi dengan tema-tema yang dikembangkan antara lain wisata bahari, wisata agro/eko, geowisata, wisata kreatif, wisata kuliner, wisata sejarah dan budaya, wisata minat khusus, wisata pendidikan, wisata religi, wisata kota pada wilayah DPP, KSPP, dan KPPP. Namun untuk optimalisasi potensi pertumbuhan ekonomi dari sector pariwisata ini membutuhkan berbagai intervensi baik dari pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya. Penguatan peran pentahelix juga menjadi factor kunci. Hal yang perlu menjadi prioritas adalah pembenahan sarana dan prasarana destinasi pariwisata termasuk peningkatan aksesibilitas dan konektivitas ke Kawasan pariwisata. Disamping itu yang tak kalah pentingnya adalah penyiapan masyarakat disekitar destinasi dan peningkatan kapasitas pelaku pariwisata. Branding, promosi dan pemasaran juga menjadi faktor pendukung yang tidak bisa diabaikan. Potensi ekonomi lainnya yang juga perlu mendapat perhatian adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Potensi produk UMKM di Sumatera Barat relatif banyak namun mengalami kendala dalam pemasaran karena belum bersertifikasi dan belum memenuhi standar yang ditetapkan, Disamping itu juga terkendala karena terbatasnya akses

terhadap pembiayaan serta masih rendahnya kapasitas pelaku UMKM. Usaha ekonomi kreatif di Sumatera Barat memiliki peran meningkatkan perekonomian secara global. Industri kreatif erat hubungannya dengan tingkat kreativitas manusia sebagai sumber daya utama penggerak roda perekonomian. Produk-produk ekonomi kreatif diklasifikasikan kedalam 17 subsektor, yaitu : (1) Arsitektur, (2) Musik, (3) Desain Interior, (4) Fesyen, (5) Desain, (6) Komunikasi Visual, (7) Aplikasi dan Game Developer, (8) Desain Produk, (9) Penerbitan, (10) Film, Animasi, dan Video, (11) Periklanan, (12) Fotografi, (13) Televisi dan Radio, (14) Kriya, (15) Seni Pertunjukan, (16) Kuliner dan (17) Seni Rupa. Untuk pencapaian pertumbuhan usaha ekonomi kreatif yang semakin lebih baik kedepannya maka dilakukan berbagai kegiatan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui workshop untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial pelaku ekonomi kreatif serta dukungan/fasiliatsi kepada pelaku ekonomi kreatif pada berbagai event pariwisata dan ekonomi kreatif.

I Permasalahan Pembangunan Daerah

1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tahun 2021 merupakan tahun peralihan dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Evaluasi terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, hal ini guna menjaga kelangsungan serta konsistensi pelaksanaan pembangunan dimana capaian tahun 2021 menjadi basis data untuk menetapkan target sasaran pembangunan 2022 sampai dengan tahun 2026. Penyusunan RKPD 2023 salah satunya berpedoman terhadap pencapaian target-target tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang di dokumen RPJMD tahun 2021-2026. Evaluasi pencapaian target 2021 dilaksanakan yang salah satunya dengan penekanan pada pencapaian Misi yang juga menjadi Prioritas Pembangunan sebagai upaya memberikan umpan balik dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Evaluasi Tahun 2021 mencakup evaluasi terhadap kinerja efektivitas pembangunan yang berdasarkan kinerja pencapaian sasaran dan target pembangunan. Evaluasi kinerja efektivitas pembangunan digunakan sebagai salah satu dasar perumusan permasalahan pembangunan yang nanti juga menjadi pertimbangan

dalam perumusan arah kebijakan, sasaran serta program pembangunan RKPD Tahun 2023.

a. Urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. berubahnya kewenangan koperasi provinsi dalam pengelolaan UMKM RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 II-137
2. banyak koperasi tidak melaksanakan RAT karena Pandemi Covid-19
3. Permasalahan Akses Internet dan masih banyak anggota koperasi yang tidak bisa memanfaatkan teknologi informasi
4. Dampak pandemic menyebabkan volume usaha turun
5. Terbatasnya SDM pengelola koperasi terutama dari sisi kualitas
6. Terbatasnya sarana dan prasarana koperasi dalam menjalankan usaha
7. Terbatasnya inovasi Produk yang dihasilkan oleh Koperasi dan UKM yang belum dapat bersaing di pasar
8. Terbatasnya akses koperasi ke pasar dan permodalan
9. Sebaran UMKM yang cukup luas sehingga tidak keseluruhan terjangkau dan terpantau oleh Pemerintah
10. Belum adanya sanksi yang tegas bagi koperasi yang tidak mengurus izin usaha
11. SDM koperasi masih kurang memahami tentang kelengkapan kelembagaan koperasi
12. kurangnya minat pengurus koperasi untuk mengikuti pelatihan dan meningkatkan kapasitas diri
13. terbatasnya sertifikat halal dan merk yang bisa diberikan secara gratis

b. Urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal

1. Data terkait dengan potensi investasi dan realisasi investasi yang sudah atau sedang berjalan belum tersedia dengan lengkap oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
2. Regulasi dan aturan yang mengatur tentang investasi cenderung berubah – ubah sehingga mengakibatkan ketidakpastian dalam proses pelaksanaan pekerjaannya antara lain dengan adanya peralihan dengan adanya perubahan regulasi berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko serta Peraturan Kementerian/Lembaga (NSPK) terkait yang menjadi dasar penerbitan perizinan dengan menggunakan portal OSS yang

masih dalam tahap pengembangan dan penyempurnaan dari Kementerian Investasi / BKPM RI

3. Status kepemilikan lahan di Sumatera Barat yang Sebagian besar di kuasai kamu atau tanah ulayat menjadi penyebab ketidakpastian pelaksanaan investasi
4. Kurangnya koordinasi antar instansi di Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan provinsi dan Pusat dalam penyelenggaraan Investasi
5. Adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam pelaksanaan even even promosi potensi investasi daera sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat kehadiran investor
6. Materi promosi yang disiapkan belum maksimal dalam memenuhi kebutuhan informasi bagi investor
7. Terbatasnya keikutsertaan Sumatera Barat dalam even promosi investasi tingkat Nasional dan Internasional (pameran dan temu bisnis) RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 II-138
8. Masih adanya beberapa perizinan dan non perizinan bersifat yang diproses secara manual di PTSP
9. Masih terdapatnya jangka waktu pelayanan PTSP yang melewati Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan Gubernur
10. Masih terdapat jenis perizinan yang belum dipetakan
11. Masih terdapat perizinan yang belum dapat dilaksanakan antara lain perizinan berusaha usaha menunjang kegiatan usaha (PB UMKU) dan KBLI yang belum ada pengampu pada Kementerian/Lembaga terkait.
12. Banyaknya pelaku usaha/masyarakat yang belum memahami teknologi atau perizinan secara elektronik atau berbasis web.
13. Keterbatasan jumlah aparatur penyelenggara perizinan
14. Keterbatasan pelaku usaha atas perizinan secara online melalui OSS dan aplikasi perizinan berbasis web
15. Masih rendahnya pemahaman OPD teknis dalam penerapan aplikasi perizinan OSS berbasis teknologi informasi dalam rangka penyelenggaraan perizinan terintegrasi.
16. Adanya permasalahan Tata Ruang atau Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) sehingga banyak pelaku usaha/Perusahaan PMA/PMDN tidak jadi melanjutkan rencana investasinya dikarenakan tidak ada kesesuaian tata ruang untuk investasi

17. Sistem Perizinan Online Single Submissin (OSS) masih belum sempurna dalam pengembangan sehingga terdapat kendala dalam pelaksanaan perizinan di daerah.
- c. Urusan pemerintahan bidang Pariwisata
1. Pembatasan Kunjungan Wisatawan terutama Mancanegara karena pandemi COVID 19
 2. Terbatasnya kegiatan pembinaan SDM pada Daerah Tujuan Wisata (DTW) unggulan;
 3. Masih terbatasnya kerjasama antar instansi, stakeholder dan masyarakat sekitar dalam mendukung pengembangan DTW unggulan
 4. Masih terdapat SDM yang belum memenuhi kriteria kompetensi.
 5. Terbatasnya produk ekraf yang memiliki sertifikat HKI
 6. Pengembangan DTW membutuhkan anggaran yang besar
 7. Kapasitas Sumber Daya Manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas masih belum memadai.
 8. *Mapping* destinasi belum dilakukan (inventarisasi dan sarana pra sarana dimiliki) sehingga belum memiliki pola perjalanan dengan berbagai pilihan seperti wisata budaya, wisata belanja, wisata alam, wisata minat khusus, wisata edukasi, agro dan ekowisata.
 9. Koordinasi Lintas Sektoral (Lembaga) belum berjalan maksimal, hal ini sangat penting mengingat Pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif membutuhkan koordinasi dan kerja bersama-sama pihak-pihak terkait: (pemerintah: instansi pariwisata dan ekonomi kreatif, instansi pekerjaan umum, instansi perhubungan, instansi pertanian, instansi perindustrian perdagangan); (2) swasta; (3) BUMN/BUMD; (4) masyarakat di objek wisata.
 10. Masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam industri pariwisata dan ekonomi kreatif
 11. Terbatasnya kewenangan pemerintah provinsi dalam pengembangan objek wisata didaerah
 12. Masih perlunya dukungan dari berbagai pihak untuk penguatan Sumatera Barat dalam penyelenggaraan wisata halal

d. Urusan pemerintahan bidang Perdagangan

1. Mayoritas produk komoditas di Sumatera Barat masih bertumpu pada primary produk (bahan mentah) dan teknologi belum terlalu canggih sehingga peningkatan nilai tambah belum terlalu mendongkrak nilai ekspor
2. Harga ditentukan oleh pasar internasional
3. Belum berkembangnya hilirisasi produk di Sumatera Barat
4. Ada beberapa kasus di BPSK di tarik kembali oleh pelapor, sehingga tidak dapat diproses, sedangkan kasus tersebut sudah tercatat dalam kasus pengaduan konsumen
5. Kurangnya tenaga/SDM yang melakukan pengujian mutu barang sudah banyak pensiun dan belum ada penggantinya
6. Terbatasnya SDM PPNS
7. Minuman beralkohol sangat riskan untuk dilakukan pengawasan
8. Realisasi pupuk yang diluncurkan Pemerintah pusat lebih rendah dibandingkan dengan RDKK (rencana defenitif kebutuhan kelompok)
9. Sering terjadi keterlambatan hasil pengujian terhadap hasil produk dari pihak ketiga
10. Peningkatan harga kebutuhan pokok yang fluktuatif salah satunya minyak goreng dan cabe
11. Operasi pasar/pasar murah yang dilaksanakan belum menjangkau seluruh kabupaten/kota
12. Masih terjadinya pandemi covid 19 sehingga kegiatan dalam bentuk pameran belum terlaksana secara optimal
13. Melakukan pembinaan kepada pengelola pasar, lomba pasar dan promosi produk
- 14) Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha dan masyarakat di pasar kab/kota dalam menerapkan perda No. 6/2020 dengan etap menerapkan 3 M yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan air mengalir serta menjaga jarak
14. Masyarakat petani, pengumpul, dan pedagang yang masih belum sepenuhnya memahami tentang standar mutu komoditi sesuai ketentuan berlaku
15. Kurangnya tenaga/SDM penguji mutu barang karena telah memasuki masa pensiun
16. Terdapatnya beberapa mesin pendukung pengujian mutu yang perlu diperbarui

17. Belum semua masyarakat tahu tentang peran BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) sehingga perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat
 18. Keberpihakan masyarakat dalam menggunakan produk dalam negeri masih kurang
- e. Urusan pemerintahan bidang Perindustrian
1. Daya saing produk IKM yang dihasilkan masih relatif rendah dari sisi kemasan, standar dan mutu produk.
 2. Inovasi dan diversifikasi produk industri kecil menengah masih rendah
 3. Keakuratan data industri dari kabupaten/kota masih lemah RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 II-147
 4. Belum optimalnya pengembangan industri sesuai potensi daerah
 5. Mayoritas produk komoditas di sumbar masih bertumpu pada primary produk (bahan mentah) dan teknologi yang digunakan belum terlalu canggih sehingga belum mendongkrak peningkatan nilai tambah
 6. Pembebasan tanah ulayat yang relatif sulit
 7. Masih terjadi COVID19 sehingga mempengaruhi perekonomian
 8. Industri besar tidak melaporkan perkembangan usaha kepada dinas terkait
 9. Pemantauan belum dapat dilaksanakan secara maksimal
 10. Masih terjadinya pandemi covid 19
 11. Kurangnya kemampuan SDM di kabupaten/kota dalam memperoleh informasi secara lengkap dan terkini dari industri kecil menengah
 12. Kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya data industri
 13. Daya saing produk yang masih rendah
 14. Penguasaan teknologi yang masih rendah
 15. Keterbatasan kualitas SDM pelaku IKM
 16. Belum optimalnya pengembangan industri sesuai potensi daerah
 17. Daya saing produk yang masih rendah
 18. Penguasaan teknologi yang masih rendah
 19. Keterbatasan kualitas SDM pelaku IKM
 20. Belum optimalnya pengembangan industri sesuai potensi daerah
 21. Industri besar tidak melaporkan perkembangan usaha kepada dinas terkait maupun dalam aplikasi SIInas secara berkala
 22. Pemantauan belum dapat dilaksanakan secara maksimal

f. Unsur Keuangan

1. Pelaksanaan peyerapan anggaran sebagian besar menumpuk di akhir tahun anggaran
2. Masih terdapat Perangkat Daerah yang mengirim laporan belum valid
3. Terbatasnya SDM pengelola asset
4. Masih terdapat asset yang telah ditempati / digunakan oleh Pemerintah Provinsi yang belum tercatat dan bersertifikat
5. Terdatanya SPM yang tidak cair sampai dengan akhir Tahun Anggaran, karena terlambat disampaikan
6. Adanya penyederhanaan struktur organisasi pada BPKAD dengan Tipe B yang tidak sesuai dengan beban kerja
7. Dampak Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan kondisi perekonomian masyarakat yang menurun sehingga mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat
8. Terbatasnya gambaran penetapan target terutama pada pajak rokok masih bersifat 'given' dari Pemerintah Pusat/Kementerian Keuangan
9. Terbatasnya sumber pendapatan asli daerah untuk dikembangkan sesuai aturan
- 10) Belum optimalnya penerimaan dari retribusi
10. Adanya regulasi yang berubah yang menyebabkan belum dibolehkan melakukan pemungutan sebelum dibuat aturan oleh daerah.
11. Sarana dan prasarana serta kompetensi SDM pengeloaan keuangan daerah yang terbatas dan belum memadai
12. Komponen belanja pegawai yang cukup besar dikarenakan adanya pengalihan kewenangan Pendidikan Menengah dan Luar Biasa ke Provinsi yang cukup besar menyedot anggaran belanja pembangunan

g. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Biro Perekonomian

1. Koordinasi pengendalian inflasi daerah belum berjalan secara optimal, karena belum terjalinnya kerjasama daerah dengan baik akibat dari belum adanya pemetaan potensi produksi sumber pangan di kabupaten/kota se Sumatera Barat.
2. Belum optimalnya kinerja BUMD dan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terlihat dari besaran deviden yang diterima sebagai PAD RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 II-152

3. Kelangkaan BBM bersubsidi (solar) dan LPG 3 Kg yang selalu terjadi setiap tahun di masyarakat yang disebabkan dualisme aturan, penimbunan dan penyelewengan alokasi pendistribusian oleh oknum tertentu. Termasuk pelaksanaan BBM satu harga di Kepulauan Mentawai yang disinyalir masih banyak penyelewengan
4. Belum optimalnya koordinasi pendistribusian pupuk bersubsidi karena adanya kebijakan baru tentang implementasi Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK)
5. Koordinasi pembinaan lembaga keuangan mikro di Sumatera Barat belum berjalan dengan baik
6. Belum seluruh perusahaan yang berkontribusi dalam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)/CSR dan ada beberapa perusahaan yang belum masuk Forum TJSLP bentukan Pemerintah Prov. Sumatera Barat

2. BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

A Kerangka Ekonomi Daerah

1. Perkembangan Perekonomian Dunia

Persebaran pandemi COVID-19 hingga tahun 2021 terus berlanjut seiring munculnya perkembangan varian baru. COVID-19 varian Delta dan varian Omicron menyebabkan beberapa negara mengalami lonjakan kasus hingga memunculkan gelombang baru, yang membatasi pemulihan ekonomi pada tahun 2021. Meski demikian, ekonomi global diperkirakan telah mengalami pemulihan karena tingkat vaksinasi yang tinggi di beberapa negara, terjadinya peningkatan permintaan dan volume perdagangan, serta pemulihan pasar tenaga kerja di Amerika Serikat. Negara-negara cenderung telah beradaptasi pada pandemi dengan menerapkan kebijakan pengetatan yang fleksibel untuk mengendalikan pandemi dan mengupayakan pemulihan ekonomi. Beberapa negara telah mengalami pemulihan ekonomi, tecermin dari level PDB riil yang telah melampaui level prapandemi. Pemulihan yang relatif lebih cepat juga dialami oleh negara-negara dengan tingkat vaksinasi yang tinggi dalam upaya mencapai herd immunity. Aktivitas perdagangan dunia mengalami peningkatan tinggi pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020, karena didorong oleh pemulihan permintaan global yang terjadi pada tahun 2021. Namun, gangguan rantai pasok yang melanda dunia menyebabkan perlambatan aktivitas perdagangan dunia yang terjadi sejak Oktober 2021. Meski

demikian, volume perdagangan dunia diperkirakan mengalami kenaikan pada tahun 2021 dan 2022 setelah berkontraksi cukup dalam pada tahun 2020.

Selain itu, harga-harga komoditas mengalami peningkatan yang tinggi, seiring dengan pemulihan ekonomi global pada tahun 2021. Pemulihan permintaan global juga disertai dengan bergesernya fokus kebutuhan energi menuju energi yang lebih ramah lingkungan. Peningkatan harga logam, tidak hanya dipicu oleh pemulihan ekonomi, tetapi juga dorongan penggunaan energi bersih dan hijau secara global yang mendorong tingginya permintaan. Selanjutnya, harga Crude Palm Oil (CPO) masih tetap tinggi, dipicu oleh terbatasnya jumlah pasokan. Dalam upaya menanggulangi dampak ekonomi yang besar akibat pandemi COVID-19, pemerintah berbagai negara mengambil kebijakan stimulus. Dari sisi fiskal, negara-negara tersebut memberikan stimulus yang besar dengan menambah defisit fiskal pada tahun 2020 untuk memperkuat sistem kesehatan serta memberikan bantalan ekonomi bagi kelompok masyarakat dan industri yang terdampak. Pada tahun 2021, hampir semua negara telah mengurangi defisit fiskal secara bertahap, dan diperkirakan akan kembali mengurangi stimulus penanggulangan COVID-19, yang tecermin dari pengurangan defisit fiskal untuk tahun 2022. Dari sisi moneter, pada tahun 2020 dan 2021 bank sentral di beberapa negara menetapkan kebijakan moneter yang akomodatif melalui penurunan suku bunga dan quantitative easing untuk menahan dampak pandemi COVID-19. Seiring pemulihan ekonomi yang terjadi pada tahun 2021 serta optimisme untuk tahun 2022, beberapa bank sentral negara mulai melakukan normalisasi suku bunga. Peningkatan inflasi dan pemulihan pada pasar tenaga kerja juga memberikan tekanan pada bank sentral untuk menaikkan suku bunga.

2. Perkembangan Perekonomian Nasional

Perekonomian Indonesia pada tahun 2021 terus mengalami pemulihan dan lepas dari tekanan besar akibat pandemi COVID-19. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 3,7 persen pada tahun 2021. Keberhasilan pengendalian pandemi COVID-19, partisipasi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi, efektivitas kebijakan stimulus fiskal-moneter dan sinergi yang baik antar otoritas dalam menjaga stabilitas dan percepatan pemulihan ekonomi menjadi faktor utama terjaganya keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional. Sementara itu, PDB per kapita Indonesia juga mengalami peningkatan

sebesar 8,6 persen, menjadi Rp62,2 juta atau setara US\$4.349,5 tahun 2021. Dengan pencapaian ini, Gross National Income (GNI) Indonesia diperkirakan juga mengalami kenaikan. Dari sisi laju pemulihan, PDB Indonesia tahun 2021 berhasil melampaui level prapandemi. Pemulihan di Indonesia relatif lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara lain yang belum mampu kembali ke level sebelum pandemi, seperti Filipina, Malaysia, Thailand, Meksiko, Jerman, Perancis, dan Italia. Dari sisi PDB pengeluaran, berhasilnya pengendalian pandemi COVID-19 mendorong fenomena terjadinya “pent up demand” pada konsumsi masyarakat yang diikuti dengan peningkatan aktivitas pada sektor investasi. Secara keseluruhan tahun 2021, konsumsi rumah tangga mampu tumbuh secara progresif sebesar 2,0 persen.

Sementara itu, aktivitas investasi yang sempat tertahan, juga kembali dapat meningkat yang ditunjukkan oleh pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 3,8 persen pada 2021. Keberlanjutan Program Strategis Nasional (PSN), akselerasi pada belanja modal pemerintah, serta mulai membaiknya kinerja investasi sektor swasta menjadi penopang perbaikan laju pertumbuhan investasi. Sementara itu, konsumsi pemerintah juga mampu tumbuh mencapai 4,2 persen secara RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 III- 3 keseluruhan tahun 2021, sejalan dengan peningkatan realisasi belanja negara, khususnya terkait akselerasi program vaksinasi, keberlanjutan program perlindungan sosial, dan pelaksanaan layanan publik pemerintah. Pada tahun 2021, ekspor barang dan jasa mencatatkan pertumbuhan tertinggi sejak krisis Asia di tahun 2018, yakni mencapai 24,0 persen. Adapun kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDB tahun 2021 sebesar 21,6 persen. Tingginya pertumbuhan ekspor tersebut didorong oleh pertumbuhan ekspor barang terutama nonmigas yang mencapai 27,5 persen.

Kinerja ekspor barang yang baik tersebut seiring dengan pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara mitra dagang, serta peningkatan harga komoditas di tingkat global yang turut mendorong kenaikan volume ekspor komoditas. Seiring dengan kenaikan ekspor dan peningkatan aktivitas ekonomi domestik, impor barang dan jasa pun mengalami kenaikan sebesar 23,3 persen, dengan kontribusi sebesar 18,9 persen terhadap PDB. Dari sisi lapangan usaha, hampir semua sektor mampu tumbuh positif selama tahun 2021. Industri pengolahan yang memiliki kontribusi terbesar pada PDB, tumbuh 3,4 persen selama tahun 2021. Hal ini didorong oleh pertumbuhan tinggi beberapa subsektor yang mampu

mencapai dua digit, di antaranya industri alat angkutan, industri mesin dan perlengkapan, industri logam dasar, dan industri furnitur. Sektor perdagangan juga mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 4,7 persen pada tahun 2021. Peningkatan tersebut didorong oleh membaiknya mobilitas masyarakat sejalan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang relatif mereda. Kebijakan pemberian pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) untuk pembelian mobil juga mendorong kinerja perdagangan kendaraan bermotor secara signifikan.

Sektor konstruksi dan real estate tumbuh positif masing-masing sebesar 2,8 dan 2,8 persen, didorong oleh membaiknya kinerja konstruksi gedung, berkurangnya restitusi, dan menurunnya pembayaran royalti. Selain itu, berlanjutnya pembangunan infrastruktur prioritas dan peningkatan pengeluaran dari pihak swasta dan pemerintah juga mendorong pertumbuhan di sektor ini. Kinerja sektor penunjang pariwisata juga mulai menunjukkan perbaikan secara signifikan, walaupun masih di bawah level prapandemi. Sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor penyediaan akomodasi makan-minum (akmamin) tumbuh masing-masing sebesar 3,2 dan 3,9 persen secara keseluruhan tahun 2021. Relaksasi pembatasan kegiatan masyarakat dan aturan perjalanan, serta peningkatan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penanganan pandemi mendorong aktivitas pariwisata

3. Outlook Pencapaian Sasaran Nasional Tahun 2022

a. Pertumbuhan Ekonomi

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan meningkat pada kisaran 5,0–5,5 persen, sejalan dengan akselerasi konsumsi masyarakat dan investasi, di tengah tetap terjaganya belanja fiskal pemerintah dan tingginya potensi ekspor. Optimisme ekonomi tahun 2022 didorong oleh aktivitas ekonomi yang terus meningkat sejalan dengan percepatan vaksinasi, pembukaan ekonomi yang semakin luas, dan stimulus kebijakan yang berlanjut. Meski demikian, target pemulihan tersebut masih dihadapkan pada risiko RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 III- 4 penyebaran varian baru COVID-19, permanent scar yang dialami oleh dunia usaha dan sosial, normalisasi kebijakan baik fiskal dan moneter, serta gangguan rantai pasok, dan krisis energi. Keberhasilan pengendalian COVID-19 dan kebijakan penanganannya akan menjadi kunci peningkatan keyakinan

masyarakat serta dunia usaha yang kemudian dapat meningkatkan komponen pertumbuhan. Konsumsi masyarakat diperkirakan meningkat dengan tumbuh sebesar 4,8–5,3 persen, ditopang oleh terkendalinya penyebaran COVID-19 seiring dengan tercapainya imunitas massal dan berangsur pulihnya mobilitas masyarakat. Kinerja ekspor barang dan jasa juga tetap akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dengan masih akan tingginya permintaan dan harga komoditas global, dengan pertumbuhan sebesar 11,0–11,6 persen. Investasi pada tahun 2022 diperkirakan akan meningkat dan tumbuh sebesar 5,4–6,0 persen, sebagai kunci peningkatan kapasitas produktif perekonomian. Konsumsi pemerintah diperkirakan berkontraksi sebesar 2,0–1,6 persen, dipicu oleh mulai berkurangnya program stimulus dan belanja penanganan pandemi seiring dengan kondisi pandemi yang mengarah ke endemi. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi akan didukung oleh sejumlah sektor yang diperkirakan tumbuh kuat, seperti pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Industri pengolahan diperkirakan akan menjadi motor penggerak pertumbuhan didukung oleh keberlanjutan pengembangan 7 sektor prioritas (makanan dan minuman, tekstil, kimia, otomotif, elektronika, farmasi, dan alat kesehatan), program industri hijau dan berkelanjutan, serta perluasan penerapan industri 4.0.

Kinerja industri pengolahan diperkirakan meningkat pada tahun 2022 yang didukung oleh peningkatan permintaan baik dari domestik maupun eksternal. Perluasan pembukaan aktivitas ekonomi mendorong sektor transportasi dan pergudangan, penyediaan akumulator, dan perdagangan tumbuh meningkat. Di sisi lain, sektor konstruksi terus meningkat sejalan dengan aktivitas konstruksi pemerintah dan swasta, yang didukung oleh stimulus kebijakan dan meningkatnya pendanaan yang bersumber dari akselerasi belanja modal pemerintah dan peningkatan kinerja kredit properti. Sementara itu, sektor pertanian dan pertambangan diperkirakan akan tetap tinggi sejalan dengan permintaan ekspor terutama dari AS dan Cina dan harga komoditas yang tetap tinggi. Produktivitas merupakan salah satu indikator penentu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi diuraikan ke dalam beberapa faktor, di antaranya (a) tenaga kerja, (b) modal, dan (c) Total Factor Productivity (TFP). Ketiga faktor ini saling berkaitan erat, dimana TFP diasumsikan sebagai output sementara input berasal dari tenaga

kerja dan modal. Peningkatan produktivitas memiliki peran yang besar bagi Indonesia dalam upaya mendorong pertumbuhan dan pemulihan ekonomi secara berkelanjutan.

Namun demikian, Indonesia saat ini masih menghadapi beberapa tantangan dalam mendorong TFP, di antaranya (a) perkembangan diversifikasi dan kompleksitas ekonomi masih terbatas, (b) ekspor high technology terus mengalami penurunan, (c) tenaga kerja berada di sektor bernilai tambah rendah masih dominan, (d) keterlibatan dalam rantai pasok global yang belum berkembang signifikan, dan (e) penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan inovasi yang belum optimal. untuk mulai pulih.

4. Target dan Arah Kebijakan Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023

a. Target Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023

Upaya peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi melalui agenda transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3–5,9 persen pada tahun 2023. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan meningkatkan GNI per kapita (Atlas Method) menjadi US\$4.720–4.840 pada tahun 2023, mampu mempertahankan posisi Indonesia pada kategori upper-middle income countries. Stabilitas makroekonomi tahun 2023 diupayakan tetap mendukung proses pemulihan pascapandemi COVID-19. Tingkat inflasi dijaga stabil pada rentang 2,0–4,0 persen (yoy) dan nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada kisaran Rp14.450 per US\$ berada pada rentang Rp13.800,00–Rp15.000,00 per US\$. Kondisi makro yang menguat dan stabil pada tahun 2023 diiringi oleh peningkatan kualitas pertumbuhan berkelanjutan. TPT pada tahun 2023 diharapkan turun menjadi 5,3–6,0 persen. Demikian pula rasio gini turun menjadi 0,375–0,378. Seiring dengan itu, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya IPM menjadi 73,31–73,49. Kebijakan peningkatan kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diharapkan dapat menjaga tingkat kesejahteraan petani dan nelayan, yang ditunjukkan oleh indikator NTP pada kisaran 103–105 dan NTN pada kisaran 106–107

Tabel Target Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Outlook 2022	2023	
			RPJMN	RKP 2023
Pertumbuhan ekonomi (%)	3,69	5,0 – 5,5	5,7 – 6,0	5,3 – 5,9
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,49	5,5 – 6,3	4,0 – 4,6	5,3 – 6,0
Tingkat Kemiskinan (%)	9,71	8,5 – 9,0	7,0 – 7,5	7,5 – 8,5
Rasio Gini (nilai)	0,381	0,376 – 0,378	0,374 – 0,377	0,375 – 0,378
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,29	72,67 – 72,69	74,77	73,31 – 73,49

Sumber : Rancangan RKP 2023

5. Arah Kebijakan Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023

Arah kebijakan dalam upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mengejar sasaran jangka menengah-panjang serta menghadapi tantangan yang ada pascapandemi, difokuskan pada peningkatan produktivitas di seluruh sektor ekonomi, penguatan pemulihan sosial serta optimalisasi transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan. Agenda tersebut akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan. RKPD

a. Peningkatan Produktivitas

Peningkatan produktivitas diarahkan untuk mengembalikan trajectory pertumbuhan ekonomi ke level sebelum pandemi dan mengangkat trajectory tersebut ke level yang lebih baik lagi. Peningkatan produktivitas perlu dilakukan pada sektor itu sendiri (within sectors) diiringi dengan pergeseran struktur ekonomi menuju sektor-sektor bernilai tambah tinggi (between sectors). Upaya peningkatan produktivitas dilakukan melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan IKN, dan peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas.

b. Penguatan Pemulihan Sosial dan Ekonomi yang Inklusif

Dampak pandemi COVID-19 yang masih dirasakan, khususnya bagi pembangunan sosial, menegaskan kembali perlunya penguatan pemulihan sosial. Penguatan pemulihan sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing. Penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM merupakan bagian terpenting dari pembangunan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kapasitas produktif suatu perekonomian. Upaya penguatan pemulihan sosial yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi penyediaan air

bersih dan sanitasi yang layak.

c. Pembangunan yang Berkelanjutan

Pembangunan perlu memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga sumber daya dapat dikembangkan secara optimal untuk kebutuhan saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Pembangunan yang berkelanjutan diarahkan pada penciptaan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah karbon dan meminimalkan eksploitasi sumber daya alam. Arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan dari perubahan iklim

B Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

a Kondisi Makro Ekonomi Daerah Tahun 2021

Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menekan laju pertumbuhan perekonomian daerah yang berkontraksi sekitar -1,6%. Walaupun kondisi ini terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia dan bahkan dunia, kontraksi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2020 masih lebih baik dari nasional pada angka -2,07%. Pertumbuhan PDRB per kapita pun berkontraksi ke angka Rp. 30,64 juta dari tahun 2019 pada angka Rp. 31,67 juta. Sementara itu tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Barat cenderung stabil dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tidak terlalu terpengaruh oleh COVID-19. Proses pemulihan ekonomi pada tahun 2021 berjalan dengan baik sehingga pertumbuhan ekonomi tahun 2021 mencapai angka 3,29%. Hingga data terkini di triwulan I 2022 pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tercatat pada angka 3,64% jika dibandingkan dengan triwulan I tahun 2021. Secara kumulatif pertumbuhan ekonomi dalam 4 triwulan terakhir dibandingkan dengan 4 triwulan sebelumnya mencapai angka 4,25%. Dari sisi ketimpangan, ketimpangan pendapatan yang diukur dengan Gini Ratio walaupun cenderung mengalami penurunan secara lambat dalam 5 tahun terakhir justru mengalami tren positif yang menurun 0,001 poin ke angka 0,300 pada tahun 2021 yang lalu. Pandemi COVID-19 justru menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Barat. Angka ketimpangan ini berada di bawah angka Gini Ratio Nasional pada kisaran 0,381 yang menunjukkan bahwa baik Sumatera Barat maupun Indonesia berada pada tingkat ketimpangan pendapatan yang sedang. Sedangkan dari sisi ketimpangan wilayah yang diukur dengan Indeks Williamson, dari tahun 2016 hingga tahun 2019

cenderung meningkat dari 0,266 ke angka 0,274.

Kondisi pandemi COVID-2019 memperparah ketimpangan wilayah hingga angkanya naik menjadi 0,314. Proses pemulihan ekonomi pada tahun 2021 berjalan dengan baik sehingga ketimpangan wilayah ini bertahan di angka 0,315. Untuk aspek kemiskinan dan pengangguran, kondisi pandemi COVID-19 menambah jumlah penduduk miskin baru sebanyak 16,57 ribu jiwa sehingga meningkatkan angka kemiskinan dari 6,40% menjadi 6,56%. Jumlah pengangguran pun bertambah 44,85 ribu orang, meningkat dari 5,33% menjadi 6,88%. Secara umum berdasarkan karakteristik wilayah kemiskinan cenderung berada di kawasan perdesaan dan pengangguran berada di kawasan perkotaan. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang lebih berdampak di kawasan perkotaan menyebabkan peningkatan angka pengangguran lebih tinggi dari peningkatan angka kemiskinan. Pemulihan ekonomi di tahun 2021 berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6,04% dan angka pengangguran menjadi 6,52%. Perkembangan awal tahun 2022 di bulan Februari tercatat tingkat pengangguran kembali turun ke angka 6,17%.

b Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara berdampak terhadap terkoreksinya pertumbuhan ekonomi secara global. Prediksi awal pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2020 sedikit membaik dibandingkan 2019 yang kinerjanya melemah. Faktanya pertumbuhan ekonomi dunia yang diperkirakan tumbuh 2,5 persen, pada tahun 2020 ini terkoreksi menjadi -4,3 persen, lebih dari 2 setengah kali lipat dari penurunan selama krisis keuangan global tahun 2009. Kondisi ini tentu sangat berdampak besar bagi aktivitas perekonomian dunia secara umum dan Indonesia pada khususnya. Pemulihan ekonomi global di tahun 2021 cukup menjanjikan walaupun dalam perkembangannya terdapat beberapa varian baru virus Covid-19. Beberapa Lembaga keuangan dunia menilai pertumbuhan ekonomi global mencapai angka 5,4% di Tahun 2021 lalu. Sementara itu PBB memperingatkan bahwa dampak sosio-ekonomi yang menghancurkan dari pandemi COVID-19 akan dirasakan selama bertahun-tahun yang akan datang.

Pemulihan akibat pandemi sangat dipengaruhi oleh kecepatan proses vaksinasi untuk mencapai herd immunity. Laporan PBB bertajuk World Economic Situation and Prospects menggarisbawahi bahwa pemulihan berkelanjutan dari pandemi akan bergantung tidak hanya pada besaran stimulus dan peluncuran vaksin yang cepat, tetapi juga pada kualitas dan efektivitas langkah-langkah ini untuk membangun

ketahanan terhadap guncangan di masa depan. Menghindari hal itu, dibutuhkan investasi cerdas dalam ketahanan ekonomi, sosial dan iklim untuk memastikan pemulihan ekonomi global yang kuat dan berkelanjutan. Tidak berbeda dengan negara lain di dunia, pandemi COVID-19 berdampak besar terhadap ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 mencapai angka 3,69 persen. Outlook ekonomi Indonesia tahun 2022 memperkirakan ekonomi Indonesia akan bounceback dengan pertumbuhan 5,2 persen. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 akan ditopang oleh kebijakan vaksinasi nasional yang ditargetkan mencapai angka 100% dari target sasaran vaksinasi meningkat dari kondisi di akhir 2021 yang mencapai angka 75%. Sementara itu konsumsi pemerintah pada tahun 2023 diperkirakan masih akan tinggi seiring dengan program vaksinasi dan stimulus PEN yang direncanakan masih besar. Ekspor diperkirakan akan mengalami akselerasi pada tahun 2022 seiring dengan pemulihan ekonomi global yang didorong oleh China dan negara maju yang telah memulai program vaksinasinya. Kinerja impor diperkirakan masih lemah seiring dengan proses pemulihan ekonomi yang masih berjalan.

Pemulihan ekonomi Sumatera Barat tahun 2022 akan sangat dipengaruhi oleh peningkatan jumlah kasus harian COVID-19. Walaupun sempat menurun diakhir tahun 2021, jumlah kasus harian kembali meningkat di awal tahun 2022. Hal ini senada dengan mobilitas masyarakat yang tertahan di akhir tahun 2021, justru meningkat di awal tahun 2022. Outlook pertumbuhan ekonomi tahun 2022 oleh Bappenas, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun ini mencapai angka 5,4%. Pemerintah daerah sendiri dalam dokumen RKPD Tahun 2022 menetapkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat Tahun 2022 sebesar 3,4%. Angka ini sendiri mengacu kepada RPJMD Tahun 2021-2026. Dalam perkembangannya merujuk kepada hasil perhitungan PDRB tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mencapai angka 3,29%. Angka ini sedikit lebih rendah dari outlook Bappenas pada angka 5,2%. Proyeksi yang lebih rendah ini merujuk kepada proses vaksinasi yang belum berjalan sesuai dengan target nasional. Sampai dengan kondisi bulan Desember 2021 proses vaksinasi di Sumatera Barat baru mencapai angka 69%. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang positif ditunjukkan dari pencapaian triwulan I 2022 yang meningkat 3,64% dari periode yang sama ditahun 2021. Dengan angka tersebut dan pola pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dalam 10 tahun terakhir, maka diprediksi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2022 akan mencapai angka 4,72%, lebih tinggi dari prediksi

awal dalam RKPDP 2022. Berdasarkan hasil Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Sumatera Barat periode Februari 2022 yang dilakukan oleh Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi penahan pertumbuhan ekonomi tahun 2022, antara lain yakni masih dimungkinkannya muncul risiko adanya beberapa varian baru COVID-19 sehingga dikhawatirkan akan munculnya kembali pengetatan kebijakan aktifitas luar ruang yang akan berdampak kepada aktifitas ekonomi, belum ada satu pihak pun yang mampu menjamin berakhirnya pandemic Covid atau turun status menjadi endemic serta disamping itu juga semakin berkurangnya kurangnya perhatian berbagai pihak terhadap protokol COVID yang membuka peluang risiko masih berlanjutnya status pandemi di tahun 2022 masih dimungkinkan, adanya Konflik Ukraina- Rusia memburuk yang memberikan tekanan kepada perekonomian global, termasuk inflasi yang lebih tinggi serta proyek konstruksi khususnya JJTS Padang-Sicincin kembali ditunda karena progress pembebasan lahan yang minim kemajuan. Untuk tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sesuai dengan Rancangan Awal RKP 2023 diperkirakan berada pada angka 4,2 – 5,2 persen. Hal ini didorong oleh trend positif harga CPO dan karet dunia yang akan mendorong pertumbuhan di sektor pertanian dan perkebunan. Kondisi lain yang berpengaruh adalah pembangunan jalan Tol Padang – Pekanbaru yang mendorong investasi di koridor pertumbuhan ekonomi utama Sumatera Barat. RKPDP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 III- 11 Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, Sumatera Barat perlu mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru sebagai lokomotif perekonomian ke depan, disamping terus memperkuat dan mengoptimalkan kinerja pertanian dan industri pengolahan yang telah lama menjadi tulang punggung perekonomian Sumatera Barat.

Sektor Pariwisata diharapkan dapat menjadi lokomotif baru perekonomian Sumatera Barat karena memiliki multiplier effect yang luas dan keseluruhan. Kedatangan wisatawan memiliki dampak yang luar biasa dalam menggerakkan begitu banyak kegiatan sektor lain, seperti perhotelan dan restoran, transportasi, produk kerajinan dan industri olahan makan/minum, dan jasa-jasa. Pemerintah daerah juga telah mencanangkan Visit Beautiful West Sumatra 2023 yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2023. Angka pertumbuhan ekonomi tahun 2023 didasarkan pada pencapaian ekonomi triwulan I 2022, sehingga diprediksi mencapai angka 4,65%. Tingkat pengangguran diharapkan bisa turun ke

angka 6,15% dan secara bertahap di tahun 2023 bisa kembali ke angka sebelum pandemi. Sementara itu kinerja penurunan angka kemiskinan berjalan baik walaupun dalam kondisi pandemi. Namun demikian Pemerintah Daerah perlu mewaspadai anomali pertumbuhan ekonomi tinggi yang berdampak pada peningkatan angka kemiskinan. Tingkat kemiskinan diharapkan mampu turun ke angka 5,70% di tahun 2022 dan secara bertahap turun ke angka 5,37% di tahun 2023. Sementara itu tingkat ketimpangan pendapatan dan ketimpangan wilayah diharapkan mampu berkurang secara signifikan pasca pandemi. Gini Rasio diprediksi turun ke angka 0,298 di tahun 2022 dan berkurang ke angka 0,296 di tahun 2023. Tingkat ketimpangan wilayah juga diprediksi turun ke angka 0,208 di tahun 2022 sejalan dengan pemulihan ekonomi dan diharapkan mampu bertahan di angka yang sama 0,213 di tahun 2023. Secara lengkap proyeksi indikator makro daerah tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Proyeksi Indikator Makro Daerah Tahun 2023

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Realisasi		Target	
		2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,60	3,29	4,72	4,65
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	30,64	31,58	32,47	33,58
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	43,75	45,41	47,13	48,86
4	TPT (%)	6,88	6,52	6,15	5,72
5	IPM	72,38	72,65	72,95	73,46
	- Usia Harapan Hidup (Tahun)	69,47	69,59	69,79	69,97
	- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,02	14,09	14,26	14,43
	- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,99	9,07	9,16	9,25
	- Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	10.733	10.790	10.841	10.997
6	Kemiskinan (%)	6,56	6,04	5,70	5,37
7	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	364,79	339,92	321,86	306,71
8	Gini Rasio	0,301	0,300	0,298	0,296
9	Indeks Williamson	0,311	0,315	0,208	0,213

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Untuk mencapai target-target pada proyeksi Makro Daerah Tahun 2023 maka terdapat beberapa arah kebijakan pembangunan ekonomi Sumatera Barat ke depannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 akan sangat dipengaruhi oleh proses vaksinasi yang belum berjalan sesuai dengan target nasional untuk menjamin

pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat di beberapa pusat kegiatan nasional dan wilayah.

2. Transformasi struktural ekonomi daerah menjadi titik krusial dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat secara nasional. Ketergantungan terhadap sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi menjadi prasyarat penting agar tidak terjebak dalam *middle income trap*. Berkaca pada sektor industri pengolahan yang tidak menjadi sektor ekonomi unggulan di Sumatera Barat, maka penting bagi Pemerintah Daerah untuk bertumpu pada sektor pariwisata yang memiliki *backward* dan *forward linkage* yang besar.
3. Tingkat inflasi akan terjaga pada level yang sama dalam 5 tahun terakhir. Beberapa program pengendalian inflasi selama pandemi COVID-19 terbukti mampu menahan laju inflasi. Program ini akan berlanjut di tahun 2022 dan 2023 untuk menjaga tingkat inflasi tetap stabil.
4. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diarahkan untuk meningkatkan nilai IPM dan menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta ketimpangan pendapatan dan wilayah.

3. BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Tahun 2023

Dengan mempertimbangkan potensi, capaian pembangunan daerah satu tahun sebelumnya, kondisi saat ini, permasalahan, isu strategis, tantangan dan peluang serta kondisi sosial budaya masyarakat Sumatera Barat dimaksud, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2023 mengacu kepada Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021- 2026 yaitu:

“Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan”

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2022 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan, memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matrik tabel

Tabel Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

VISI		
Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing	Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		Menurunnya prevalensi stunting
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan
		Meningkatnya Daya Saing Masyarakat
Misi 2: Meningkatkan Tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	Meningkatnya Ketahanan sosial Budaya masyarakat yang berlandaskan ASB-SBK
		Meningkatnya Budaya Literasi
		Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Misi 3: Meningkatkan Nilai tambah dan Produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)
		Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan
		Meningkatnya pendapatan Petani Hutan
Misi 4: Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	Sumatera barat sebagai pusat perdagangan
		Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah
		Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera
		Terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor
		Meningkatnya pertumbuhan investasi
		Meningkatnya peran ekonomi digital
Misi 5: Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat
		Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat
Misi 6: Meningkatkan pengembangan infrastruktur yang berkeadilan berkelanjutan	Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegasi
		Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
		Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas
		Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian
		Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan
Misi 7: Mewujudkan Tata Kelola	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang	Terwujudnya kualitas tata Kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel

MISI	TUJUAN	SASARAN
Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	melayani	Meningkatnya kapabilitas birokrasi
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Pandemic COVID-19 yang mengakibatkan pelemahan ekonomi nasional dan Sumatera Barat yang mengalami kontraksi di Tahun 2020, sehingga perlu tetap dilakukan upaya secara terus menerus untuk pemulihan ekonomi hingga mampu kembali kepada kondisi sebelum pandemi terjadi serta juga perlu dimulai reformasi struktural ekonomi di Sumatera Barat dengan mengurangi ketergantungan kepada Sumber Daya Alam beralih secara perlahan kepada sektor industri dan jasa, serta dukungan terhadap pencapaian Tema Pembangunan RKP Tahun 2023, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan menjadi Tema Provinsi Sumatera Barat yakni:

“PENINGKATAN PRODUKTIVITAS SEKTOR STRATEGIS MENUJU TRANSFORMASI EKONOMI”

Peningkatan produktivitas melalui sektor strategis daerah ini yang juga merupakan bagian dari kebijakan pemulihan ekonomi yang disesuaikan dengan kondisi struktur ekonomi dan potensi ekonomi di Sumatera Barat diarahkan kepada sektor pertanian (lima sub sektor pertanian), industri pengolahan (Perdagangan, UMKM dan Industri Kecil Menengah), dan akomodasi makan-minum (pariwisata). Perhitungan asumsi peningkatan produktivitas pada 3 (tiga) sektor strategis tersebut di tahun 2023 yakni :

1. Sektor Pertanian, diharapkan tumbuh 5,86%
2. Sektor Industri pengolahan, diharapkan tumbuh 12,46%
3. Sektor akomodasi dan makan minum, diharapkan tumbuh 5,80%.

Ketiga sektor ini termasuk 5 (lima) besar lapangan usaha yang peningkatan produktivitasnya tertinggi tahun 2021 lalu, dibawah sektor pertambangan dan pengalangan serta sektor jasa lainnya. Secara keseluruhan, produktivitas total di sumbar meningkat 4,45% dari 93,74 juta menjadi 97,91 juta.

Selanjutnya ketiga sektor strategis dimaksud juga merupakan sektor unggulan yang didukung dengan berbagai program unggulan yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, dan sangat perlu dijaga peningkatan momentum produktivitasnya, sehingga diharapkan peningkatan produktivitas sektor strategis ini berbanding lurus dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor tersebut sehingga upaya pemulihan ekonomi dapat selalu dilaksanakan sesuai dengan potensi

daerah. Sehingga dengan demikian prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2023 akan lebih difokuskan pada ketiga sektor diatas dengan tetap tidak mengabaikan upaya pencegahan, pengendalian serta penanganan akibat pandemi covid-19 yang tidak akan bisa diprediksi kapan akan berakhir, serta dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanat pada Pasal 18 dan pasal 298 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun proyeksi Target Indikator Makro Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 sebagaimana tabel berikut.

Target Indikator Makro Pembangunan pada dokumen RKPD Tahun 2023 dilakukan penyesuaian jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, hal ini dengan memperhatikan evaluasi capaian tahun 2021, perkiraan capaian tahun 2022, perkembangan pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung, serta menyesuaikan dengan target Provinsi pada RKP Tahun 2023.

2. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2023

Tahun 2023 merupakan tahun kedua pencapaian RPJMD tahun 2021-2026 sehingga hasil evaluasi pelaksanaan tahun pertama digunakan untuk menetapkan langkah-langkah percepatan pencapaian target yang belum dapat direalisasikan dan melakukan penyesuaian kebijakan pembangunan daerah bila diperlukan.

Arah kebijakan pembangunan tahun 2023 disesuaikan dengan Visi dan Misi RPJMD 2021-2026 yang tetap difokuskan kepada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai hasil akhir pelaksanaan Visi RPJMD 2021-2026, namun demikian arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 juga adaptif dan responsif terhadap dampak pandemi Covid-19 sekaligus juga mendukung pencapaian Tema RKP dalam rangka Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, yang juga menjadi penekanan dalam penentuan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023.

Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023 akan difokuskan pada peningkatan produktivitas melalui sektor strategis daerah, yakni kepada sektor pertanian (lima sub sektor pertanian), industri pengolahan (Perdagangan, UMKM dan Industri Kecil Menengah), dan akomodasi makan-minum (pariwisata). Ketiga sektor strategis ini juga tergambar dalam program unggulan yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2021- 2026, dan sangat perlu dijaga peningkatan momentum produktivitasnya.

3. Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat

Dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, terdapat beberapa program unggulan yang mendukung pencapaian visi misi telah direncanakan dan sedang dilaksanakan sejak tahun 2022 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMD dan kemudian akan dilanjutkan pada tahun 2023 hingga 2026. Dalam rangka mendukung proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian hingga pelaporan dan evaluasi maka telah ditetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050 – 47 – 2022 Tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Adapun sasaran dan target masing-masing Program Unggulan di Tahun 2023 yakni sebagai tabel berikut.

Namun demikian, tema pembangunan RKPD Tahun 2023 tetap dilaksanakan dalam bingkai Prioritas Pembangunan yang merupakan penterjemahan Misi sesuai dengan RPMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Adapun Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2023 dan arah kebijakan pembangunan pada masing-masing Prioritas yakni sebagai berikut.

Prioritas Pembangunan 1 :

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing

Prioritas Pembangunan 2 :

Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah

Prioritas Pembangunan 3 :

Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

Prioritas Pembangunan 4 :

Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital

Prioritas pembangunan ini untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan dan Industri Kecil di Sumatera Barat. Secara struktur ekonomi Sumatera Barat juga di dominasi oleh Perdagangan dan juga Industri Pengolahan, meskipun tidak sebesar Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, namun sektor perdagangan dan

industri kedepan harus dikembangkan sebagai sektor yang diyakini mampu meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat sehingga Sumatera Barat dapat keluar dari middle income trap.

Sumatera Barat memiliki potensi untuk mengoptimalkan aktivitas di sektor perdagangan sebagai salah satu sektor utama yang menggerakkan perekonomian masyarakat. Pelabuhan Teluk Bayur yang berada di pesisir barat pusat Sumatera merupakan potensi untuk memajukan perdagangan internasional melalui peningkatan volume ekspor, terutama ke negara yang tergabung dalam Indian Ocean Rim Association (IORA). Misi ini diharapkan mampu meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dan ekonomi kreatif terhadap PDRB Sumatera Barat.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas meningkatkan usaha perdagangan Dan industri kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Tahun 2023

No	Sasaran / Indikator Kinerja	Target 2023
1	Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan	
	Laju pertumbuhan sektor perdagangan (%)	-1,00
2	Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah	
	Jumlah sentra industri kecil dan menengah (sentra)	379
3	Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera	
	Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi (%)	2,18
	Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil	3,1
4	Terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor	
	Jumlah enterpreneur baru tercipta (orang)	130.482
5	Meningkatnya pertumbuhan investasi	
	Persentase peningkatan Investasi di provinsi (%)	8,00
6	Meningkatnya peran ekonomi digital	
	Kontribusi Ekonomi Digital (%)	6,70

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2023 difokuskan pada:

1. Menjaga tingkat inflasi tetap pada batas wajar.
2. Penciptaan iklim investasi dan kemudahan berinvestasi yang diberikan oleh pemerintah untuk pelaku usaha PMA dan dan PMDN dalam mendapatkan perizinan dan non perizinan.
3. Fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi pelaku usaha PMA dan PMDN dengan tujuan agar permasalahan yang dihadapi pelaku usaha PMA dan PMDN dapat diselesaikan dan perusahaan dapat merealisasikan investasinya .

4. Pemberian insentif-insentif dari pemerintah kepada pelaku usaha untuk menumbuhkan minat investasi baru seperti kemudahan pajak/pembebasan pajak.
5. Tersedianya data yang akurat terkait dengan potensi investasi, proses perizinan dan kemudahan berusaha.
6. Memperbaiki tata kelola BUMD dan mendirikan BUMD profesional di bidang pertanian.
7. Mencetak 100 ribu *millennial entrepreneur* dan *women entrepreneur* serta pelaku ekonomi kreatif.
8. Meningkatkan akses keuangan perbankan dan non perbankan bagi UMKM dan pengusaha pemula.
9. Mendorong Koperasi untuk konversi ke koperasi syariah.
10. Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital

Pencapaian sasaran Prioritas Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital, dilakukan dengan beberapa Program Pembangunan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Program Pembangunan mendukung Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Tahun 2023

No	Program Pembangunan Daerah	Kinerja			Perangkat daerah
		Indikator	Satuan	Target	
Prioritas 4 : Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital					
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Peningkatan omset pedagang pasar rakyat yang sudah direvitalisasi	%	5,8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor	juta US\$	1.449,41	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase barang beredar dan jasa yang diawasi	%	74	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Persentase komoditi potensial yang sesuai ketentuan berlaku	%	25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Persentase pengaduan konsumen yang diselesaikan	%	89	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Peningkatan transaksi pada kegiatan pameran	%	5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5	Program Penyelenggaraan Jalan	Rasio Kemantapan Jalan	%	77	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

No	Program Pembangunan Daerah	Kinerja			Perangkat daerah
		Indikator	Satuan	Target	
6	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan	Sentra	20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPUI	%	74	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
8	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang kompeten	%	35,72	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	%	2,58	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
10	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan	%	63	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
11	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Jumlah SDM KUKM yang dilatih	orang	1.250	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
12	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Jumlah koperasi modern	koperasi	60	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
13	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	produk	120	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
14	Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	%	3	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
15	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan	%	16	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Jumlah wirausaha muda baru	orang	348	Dinas Pemuda dan Olahraga
16	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang kompeten	%	35,72	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks pembangunan keluarga	indeks	61,38	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
18	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Jumlah SDM KUKM yang dilatih	orang	1.250	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
19	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	produk	120	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
20	Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	%	3	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
21	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan	%	16	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Jumlah wirausaha muda baru	orang	348	Dinas Pemuda dan Olahraga

No	Program Pembangunan Daerah	Kinerja			Perangkat daerah
		Indikator	Satuan	Target	
22	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan	%	7,26	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah produksi olahan hasil perikanan	ton	17.861	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Tingkat konsumsi ikan	Kg/kap/th	40,5	Dinas Kelautan dan Perikanan
23	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat	Orang	396	Dinas Pariwisata
		Persentase pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	6	Dinas Pariwisata
24	Program Perizinan Usaha Pertanian	Peningkatan klasifikasi kelas kebun usaha pertanian	%	7	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
25	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Unit Usaha dan UPTD sub urusan peternakan yang diawasi	%	3	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
26	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	hektar	50.000	Dinas Kehutanan
27	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Peningkatan transaksi pada kegiatan pameran	%	5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
28	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan	Sentra	20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
29	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPU	%	74	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
30	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Regulasi Penanaman Modal	%	100	Dinas Penanaman Modal Provinsi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
31	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Pernyataan Minat	dokumen pernyataan minat	4	Dinas Penanaman Modal Provinsi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
32	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai/Rasio	82,75 / 3,41	Dinas Penanaman Modal Provinsi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu	%	85,52	Dinas Penanaman Modal Provinsi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
33	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	Rp (triliun)	5,6	Dinas Penanaman Modal Provinsi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
34	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Ketersediaan Data Penanaman Modal Penanaman Modal Berbasis Teknologi Informasi	%	40	Dinas Penanaman Modal Provinsi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Program Pembangunan Daerah	Kinerja			Perangkat daerah
		Indikator	Satuan	Target	
35	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks SPBE (Skala 1-5)	indeks	3,3	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
36	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	produk	120	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
37	Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	%	3	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

4. Prioritas Pembangunan 5 : Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisata

Pariwisata termasuk sektor penting dalam pembangunan ekonomi Sumatera Barat yang diharapkan menjadi industri dan salah satu basis pembangunan Sumatera Barat untuk kedepannya disamping pertanian. Sehingga proritas ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata yang nyaman dan berkesan salah satunya adalah meningkatkan kompetensi pihak pengelola sumberdaya wisata atau sumberdaya penunjang wisata agar dapat mewujudkan pariwisata yang nyaman dan berkesan. Pariwisata yang nyaman dan berkesan ditandai dengan kepuasan dan kenikmatan berwisata yang dirasakan wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Berapa tahun terakhir Sumatera Barat mengalami kemajuan ekonomi dari sektor pariwisata, RKPDP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 IV- 48 untuk itu hal ini harus selalu diperkuat melalui pembangunan pariwisata berbasis Pariwisata Halal dan MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*), dengan pembenahan destinasi wisata baik kelas lokal, nasional dan internasional dengan cara meningkatkan atraksi, aksesibilitas dan amenities di Destinasi Wisata sekaligus meningkatkan pembinaan kepada masyarakat terutama di wilayah-wilayah destinasi wisata. Perekonomian Sumatera Barat cenderung tumbuh melambat setiap tahunnya seiring kinerja lapangan usaha utama daerah pada sektor pertanian yang dalam tren menurun. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, Sumatera Barat perlu mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru sebagai lokomotif perekonomian ke depan, disamping terus memperkuat dan mengoptimalkan kinerja pertanian dan industri pengolahan yang telah lama menjadi tulang punggung perekonomian Sumatera Barat. Pariwisata dapat menjadi lokomotif baru perekonomian Sumatera Barat karena memiliki *multiplier effect* yang luas dan keseluruhan.

Kedatangan wisatawan memiliki dampak yang luar biasa dalam menggerakkan

begitu banyak kegiatan sektor lain, seperti perhotelan dan restoran, transportasi, produk kerajinan dan industri olahan makan/minum, dan jasa-jasa. Pariwisata Sumatera Barat terbukti sangat potensial untuk menjadi lokomotif baru perekonomian daerah ke depan, hal ini didukung dengan Sumatera Barat menjadi salah satu dari 10 besar destinasi favorit wisatawan nusantara di Indonesia serta merupakan 3 (tiga) besar destinasi favorit wisatawan di Sumatera. Hal lainnya yakni keberadaan potensi wisata di Sumatera Barat juga diakui secara Global dan Nasional antara lain sebagai Provinsi dengan desa wisata terbanyak dan empat desa wisata masuk 50 besar terbaik se-Indonesia pada Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2021; Memiliki 11 Geopark, 3 sudah diakui Nasional; Rendang didaulat sebagai masakan terlezat di dunia versi CNN Travels pada tahun 2017); Sumatera Barat ditetapkan sebagai Juara *World's Best Halal Culinary Destination* dan *World's Best Halal Destination* pada anugerah World Halal Tourism Award Abu Dhabi pada tahun 2016); Gulungan ombak Mentawai masuk dalam jajaran ombak terbaik di dunia berdasarkan Surfer Magazine di tahun 2013; serta Desa Pariangan terpilih menjadi desa terindah di dunia versi Travel Budget pada tahun 2012. Berdasarkan pengakuan Global dan nasional tersebut maka Sumatera Barat memiliki kekuatan pariwisata dari keindahan alam (*nature*), keberagaman budaya (*culture*), serta kuliner yang lezat (*culinary*). Sejak tanggal 9 Desember 2021, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sumatera Barat bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mencanangkan tahun kunjungan wisata “Visit Beautiful West Sumatera 2023”. Langkah ini merupakan upaya untuk membangkitkan kembali gairah sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Sumatera Barat dari keterpurukan ekonomi selama masa pandemic Covid 19.

Tabel Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Berdaya Saing Kepariwisata Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023
1	Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat	Persentase Kontribusi Pariwisata pada PDRB (%)	1,24
2	Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat	Persentase Kontribusi Ekonomi Kreatif pada PDRB (%)	6,02

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2023 difokuskan pada :

1. Membangun industri pariwisata melalui 1 destinasi wisata berkelas dunia dan 19 destinasi wisata unggulan
2. Membangun 3 pusat pertunjukan seni dan budaya bertaraf Internasional

3. Meningkatkan fasilitas dan sarana prasarana pada destinasi wisata terutama air bersih dan sanitasi
4. Meningkatkan atraksi seni dan budaya serta membangun suasana festival yang meriah pada pusat keramaian dan obyek wisata unggulan
5. Meningkatkan kunjungan wisatawan terutama wisatawan domestic
6. Penguatan *Brand Image Pariwisata di Sumatera Barat*
7. Memperjelas segmentasi Wisatawan pada masing-masing daerah
8. Melakukan Strategi promosi efektif yang terpadu melalui *public campaign* dan promosi besar-besaran untuk membangun *awareness* masyarakat
9. Mendorong semua pelaku usaha pariwisata Sumbar (terutama obyek wisata unggulan) agar segera memenuhi sertifikasi CHSE, sertifikasi Halal serta sertifikasi/ standar internasional lainnya

Pencapaian sasaran Prioritas Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Berdaya Saing Kepariwisata dilakukan dengan beberapa Program Pembangunan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Program Pembangunan mendukung
Prioritas Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Berdaya Saing Kepariwisata Tahun 2023

No	Program Pembangunan Daerah	Kinerja			Perangkat Daerah
		Indikator	Satuan	Target	
Prioritas 5 : Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan					
4	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang	kali	10	Dinas Pariwisata
		Jumlah DTW Unggulan Provinsi yang diintervensi pengembangannya	DTW	19	Dinas Pariwisata
5	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara	%	4	Dinas Pariwisata
		Persentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara	%	4,5	Dinas Pariwisata
		Rata-rata lama tinggal wisman	hari	3,23	Dinas Pariwisata
		Rata-rata lama tinggal wisnus	hari	1,7	Dinas Pariwisata
6	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat	Orang	396	Dinas Pariwisata
		Persentase pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	6	Dinas Pariwisata
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	produk	120	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
8	Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	%	3	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

No	Program Pembangunan Daerah	Kinerja			Perangkat Daerah
		Indikator	Satuan	Target	
9	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Karya Budaya yang Dilestarikan	Karya Budaya	8	Dinas Kebudayaan
10	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Ekonomi Kreatif yang terdaftar HKI	produk	100	Dinas Pariwisata
11	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat	Orang	396	Dinas Pariwisata
		Persentase pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	6	Dinas Pariwisata
12	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan	Sentra	20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

5. Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat

Dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, terdapat beberapa program unggulan yang mendukung pencapaian visi misi telah direncanakan dan sedang dilaksanakan sejak tahun 2022 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMD dan kemudian akan dilanjutkan pada tahun 2023 hingga 2026. Dalam rangka mendukung proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian hingga pelaporan dan evaluasi maka telah ditetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050 – 47 – 2022 Tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Adapun sasaran dan target masing-masing Program Unggulan di Tahun 2023 lingkup Perekonomian yakni sebagai tabel berikut.

Tabel Target Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Program Unggulan/Definisi Operasional	Indikator Kinerja	Target 2023	SKPD/Sub Kegiatan
1	2	3	4
SUMBAR SEJAHTERA			
I. Mencetak 100 ribu <i>millennial entrepreneur</i> dan <i>women entrepreneur</i> serta pelaku ekonomi kreatif			
Definisi operasional :	1. Jumlah enterpreneur baru tercipta (orang)	20.000	
1. Memfasilitasi tumbuhnya 100 ribu milenial entrepreneur dan woman entrepreneur yang direncanakan akan dilaksanakan dalam 5 tahun dengan proporsi 20 ribu setiap tahunnya dari tahun 2022 sampai dengan 2026	a. Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pemuda dan Olahraga (orang)	528	Dinas Pemuda dan Olahraga Sub kegiatan : 1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi 2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
2. 100 ribu milenial tersebut tersebar pada beberapa sector, baik pertanian, peternakan, perikanan, industry, UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif dan sector potensial lainnya	b. Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Tenaga Kerja (orang)	6742	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sub kegiatan : 1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari
3. Untuk pencapaian target 100 ribu milenial tersebut perlu pembagian secara proporsional dengan kabupaten/kota			

Program Unggulan/Definisi Operasional	Indikator Kinerja	Target 2023	SKPD/Sub Kegiatan
1	2	3	4
4. Definisi terkait dengan entrepreneur yakni : a. Telah menerima Pendidikan kewirausahaan dan atau b. Sudah memulai usaha 5. Bekerjasama dengan akselarator 6. Penanggung jawab progul Dinas Koperasi dan UKM			Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 2. Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 3. Perluasan Kesempatan Kerja
	c. Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Koperasi dan UMKM (orang)	2000	Dinas Koperasi dan UMKM Sub kegiatan : 1. Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 2. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
	d. Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pertanian (sub urusan Perkebunan, Tanaman pangan dan Hortikultura) (orang)	300	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan hortikultura Sub kegiatan : 1. Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
	e. Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pertanian (sub urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan) (orang)	4.997	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sub kegiatan : 1. Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
	f. Jumlah enterpreneur baru urusan Kehutanan (orang)	500	Dinas Kehutanan Sub kegiatan : 1. Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan 2. Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan 3. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan 4. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan 5. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial
	g. Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (orang)	2.220	Dinas Pariwisata Sub kegiatan : 1. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 2. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 3. Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu

Program Unggulan/Definisi Operasional	Indikator Kinerja	Target 2023	SKPD/Sub Kegiatan
1	2	3	4
			Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan 4. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 5. Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) 6. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif 7. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 8. Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
	h. Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Perindustrian dan Perdagangan (orang)	1.355	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sub kegiatan : 1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 2. Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
	i. Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Sosial (orang)	412	Dinas Sosial Sub kegiatan : 1. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial (Panti Anak terlantar) 2. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari (Panti Tuna Netra) 3. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari (Panti PMKS Lainnya)
	j. Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Kebudayaan (orang)	240	Dinas Kebudayaan Sub kegiatan : 1. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
	k. Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Kelautan dan perikanan (orang)	400	Dinas Kelautan dan Perikanan Sub kegiatan : 1. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 2. Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 3. Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan

Program Unggulan/Definisi Operasional	Indikator Kinerja	Target 2023	SKPD/Sub Kegiatan
1	2	3	4
			<p>Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing</p> <p>4. Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p>
	l. Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana (orang)	700	<p>Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</p> <p>Sub kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi
	m. Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Penanaman Modal (orang)	100	<p>Dinas Penanaman Modal Provinsi Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>Sub kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi
	n. Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pangan (orang)	112	<p>Dinas Pangan</p> <p>Sub kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
	o. Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pemberdayaan Masyarakat Pangan (orang)	1.200	<p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> <p>Sub kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
II. Meningkatkan akses keuangan perbankan dan non perbankan bagi UMKM dan pengusaha pemula			
<p>Definisi operasional :</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan akses keuangan perbankan dan non perbankan bagi UMKM dan pengusaha pemula yang dilakukan melalui Fasilitasi, peningkatan pemahaman terkait akses pembiayaan Bentuk fasilitasi antara lain 	1. Jumlah UMKM yang difasilitasi pada akses keuangan perbankan dan non perbankan (Lembaga)	540	<p>Dinas Koperasi dan UMKM</p> <p>Sub kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan,
	2. Jumlah Pengusaha pemula yang difasilitasi pada akses keuangan perbankan dan non perbankan (orang)	200	

Program Unggulan/Definisi Operasional	Indikator Kinerja	Target 2023	SKPD/Sub Kegiatan
1	2	3	4
<p>mempertemukan kelompok UMKM dengan perbankan</p> <p>3. Target capaian yakni UMKM yang mendapatkan permodalan dari perbankan</p> <p>4. Edukasi terhadap non perbankan seperti CSR, fin-tech, dana dari lembaga keuangan social islam</p> <p>5. Penanggungjawab progul adalah Dinas Koperasi dan UMKM</p>	3. Jumlah Pelaku UMKM yang mendapatkan permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan (orang)	400	<p>Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan</p>
	4. Jumlah Pengusaha pemula yang mendapatkan permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan (orang)	150	
	5. Jumlah Lembaga perbankan yang memberikan permodalan pada UMKM dan pengusaha pemula (Lembaga)	4	
	6. Jumlah Lembaga non perbankan yang memberikan permodalan pada UMKM dan pengusaha pemula (Lembaga)	5	
<p>III. Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital</p>			
<p>Definisi operasional :</p> <p>1. Peningkatan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM melalui pelatihan, workshop dan sosialisasi dengan tema difokuskan pada penguasaan Teknologi Informasi untuk perluasan jejaring pemasaran dan kerjasama</p> <p>2. Penanggungjawab progul adalah Dinas Koperasi dan UMKM</p>	1. Jumlah Pelaku UMKM yang mendapatkan peningkatan keahlian dan keterampilan pada penguasaan teknologi informasi guna perluasan jejaring pemasaran (orang)	150	<p>Dinas Koperasi dan UMKM</p> <p>Sub kegiatan :</p> <p>1. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDUMKM</p> <p>2. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi</p> <p>3. Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan</p> <p>4. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi</p>
	2. Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi marketing digital (orang)	500	<p>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>Sub kegiatan :</p> <p>1. Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi</p> <p>2. Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi</p>
<p>IV. Membangun industri pariwisata melalui 1 destinasi wisata berkelas dunia dan 19 destinasi wisata unggulan</p>			
<p>Definisi operasional :</p> <p>1. Penetapan 1 destinasi wisata berkelas dunia (rencana Kawasan</p>	1. Jumlah destinasi wisata unggulan (Kab/Kota)	19	<p>Dinas Pariwisata</p> <p>Sub kegiatan :</p> <p>1. Penetapan Daya Tarik Wisata</p>

Program Unggulan/Definisi Operasional	Indikator Kinerja	Target 2023	SKPD/Sub Kegiatan
1	2	3	4
<p>Gunung Talang yang merupakan salah satu geosite Kawasan Geopark Ranah Minang, meliputi 7 Kab/Kota, menuju UNESCO global geopark) dan 19 destinasi wisata unggulan (masing-masing 1 di setiap kabupaten/Kota) yang telah disepakati pada rakor pariwisata di Mentawai</p> <p>2. Terkait dengan kewenangan, maka pola pendanaan untuk destinasi yang merupakan kewenangan kabupaten/kota melalui sharing pendanaan antara provinsi dan kabupaten/kota.</p> <p>3. Proporsi persentase sharing pendanaan diputuskan pada rapat TAPD dengan melibatkan Dinas Pariwisata Provinsi dan Biro Kerjasama , Pembangunan Dan Rantau.</p> <p>4. Membangun Pusat Inkubasi Ekonomi Kreatif (Sumbar Kreatif Hub), yang berlokasi di bekas Bengkel PT Dinamika di Nipah, Padang direncanakan akan dikelola oleh salah satu BUMD</p> <p>5. Penanggung jawab progul Dinas Pariwisata dan Biro Perekonomian</p>			<p>Unggulan Provinsi</p> <p>2. Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi</p> <p>3. Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi</p> <p>4. Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi</p> <p>5. Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi</p> <p>6. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi</p>
	2. Jumlah destinasi wisata kelas dunia (lokasi)	-	<p>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian</p> <p>Dinas Pariwisata Sub kegiatan : Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi</p>
	3. Jumlah Pusat Inkubasi Ekonomi Kreatif yang terbangun dan terkelola (unit)	1 unit	<p>Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Sub kegiatan : 1. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi</p>
V. Membangun 3 pusat pertunjukan seni dan budaya bertaraf Internasional			
<p>Definisi operasional :</p> <p>1. Pusat pertunjukan seni yang direncanakan adalah:</p> <p>a. Gedung Kebudayaan (lokasi di Padang),</p> <p>b. Amphiteatre (lokasi di panorama view ngarai sianok Bukittinggi)</p> <p>c. Amphiteatre (lokasi di Kawasan talang dengan view 3 danau)</p> <p>2. Peran provinsi yakni membangun amphiteatre (pastikan terkait kepemilikan asset) serta berkoordinasi untuk mengisi aktivitas seni dan budaya dengan sanggar-sanggar seni yang berada di kabupaten/kota tersebut</p> <p>3. Penanggungjawab progul Dinas Kebudayaan dan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan tata Ruang</p>	<p>1. Jumlah pusat pertunjukan seni dan budaya (amphiteatre) bertaraf internasional yang terbangun (lokasi)</p> <p>Lokasi Amphiteatre :</p> <p>a. Gedung Kebudayaan</p> <p>b. Panorama view ngarai sianok Bukittinggi</p> <p>c. Kawasan talang dengan view 3 danau</p>	3	<p>Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Sub kegiatan : 1. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi</p> <p>Catatan: 1. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang hanya melaksanakan pengawasan terkait dengan pembangunan Amphiteatre oleh pemerintah kabupaten/kota melalui dana BKK dari APBD provinsi</p> <p>2. Amphiteatre di Bukittinggi dan di Kab Solok di bangun melalui mekanisme Bantuan Keuangan Khusus, dengan sub kegiatan yang berada pada unsur penunjang Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan</p>

Program Unggulan/Definisi Operasional	Indikator Kinerja	Target 2023	SKPD/Sub Kegiatan
1	2	3	4
			Aset Daerah yakni : a. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
	2. Jumlah aktifitas seni dan budaya di lokasi amphiteatre (kali)	3	Dinas Kebudayaan Sub kegiatan : 1. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 2. Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor 3. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

6. Penyeragaman dan Dukungan RKPD Provinsi Terhadap RKP tahun 2023

Sebagai bagian dari Perencanaan Pembangunan Nasional, maka penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 memperhatikan 7 (tujuh) Agenda/Prioritas Nasional yang diturunkan menjadi Program Prioritas dan di detailkan dengan Kegiatan Prioritas. Hal ini bertujuan akan selarasnya Prioritas dan program pembangunan daerah dengan Prioritas dan Program Nasional sehingga target capaian Nasional yang merupakan akumulasi dari pencapaian target masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat tercapai.

Penyeragaman juga membuktikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat turut mengambil bagian penting dari proses pelaksanaan pembangunan yang menuju kepada tujuan pembangunan nasional. Adapun penyeragaman dan dukungan RKPD Provinsi terhadap RKP Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel
Penyeragaman Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah Tahun 2023

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	Keterangan
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 3
		Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	Prioritas 4
		Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Prioritas 5
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Prioritas 6

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	Keterangan
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing	Prioritas 1
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Prioritas 2
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Prioritas 6
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Prioritas 6
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.	Prioritas 7

Secara lebih konkrit, sub kegiatan yang dirumuskan dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 juga mendukung secara langsung terhadap masing-masing Kegiatan Prioritas yang dijabarkan pada masing-masing 7 (tujuh) Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel

Dukungan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Terhadap Prioritas Nasional Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas Dan Berkeadilan

No	RKP 2023		RKPD 2023	
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
22	Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi	Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
23	Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi	Usaha Menengah Besar	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
			Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

No	RKP 2023		RKPDP 2023	
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
24	Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi	Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
			Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
25	Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi	Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
			Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
26	Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi	Peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha.	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Dinas Pariwisata
28	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

No	RKP 2023		RKPD 2023	
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
29	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Pariwisata
			Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Dinas Pariwisata
			Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Dinas Pariwisata
			Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Dinas Pariwisata
30	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
31	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Provinsi Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	RKP 2023		RKPJPD 2023	
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
32	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Pengembangan industri halal.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
33	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			Peningkatan Citra Produk Ekspor	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
34	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			Peningkatan Citra Produk Ekspor	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
35	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Pengelolaan Impor	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
36	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
37	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
38	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Branding, dan Produk Kreatif	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dinas Pariwisata
			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Dinas Pariwisata
			Pengembangan Sistem Pemasaran	Dinas Pariwisata
39	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Peningkatan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

No	RKP 2023		RKPD 2023	
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
		diplomasi ekonomi.		
40	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Biro Perekonomian
41	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industry 4.0	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
			Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
			Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
			Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
42	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Dinas Pangan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dinas Pangan
			Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Dinas Pangan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Dinas Pangan
			Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Dinas Pangan
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Dinas Pangan
			Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Dinas Pangan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan	Dinas Pangan

No	RKP 2023		RKPD 2023	
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Pokok Lokal	
			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Biro Perekonomian
			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Biro Perekonomian
43	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan Pariwisata	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dinas Pariwisata
			Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dinas Pariwisata
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

No	RKP 2023		RKPDP 2023	
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dinas Pariwisata
			Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dinas Pariwisata

4. BAB V ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

a Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

1) Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Ekonomi

Merujuk kepada tema RPKD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 yang menekankan pada peningkatan produktivitas sektor-sektor strategis menuju transformasi struktural, kebijakan pembangunan ekonomi menasar pada sektor ekonomi strategis sesuai dengan program unggulan Kepala dan Wakil Kepala Daerah, yaitu pertanian, wirausaha dan usaha kecil menengah, serta pariwisata. Proses pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 telah menunjukkan progres yang cukup signifikan. Angka kemiskinan yang sempat meningkat dari 6,29% di tahun 2019 menjadi 6,56% di tahun 2020 berhasil ditekan ke angka 6,04% di tahun 2021. Pencapaian ini lebih baik dari angka sebelum pandemi Covid-19 di 2019. Untuk itu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan berfokus pada penurunan angka kemiskinan melalui pengembangan sektor pertanian yang terpadu serta penurunan angka pengangguran dengan penciptaan wirausahawan baru di berbagai sektor ekonomi

khususnya di perkotaan dengan upaya pembinaan dan kemudahan akses keuangan untuk menurunkan angka pengangguran di kawasan perkotaan. Sementara itu secara umum sektor pariwisata khususnya wisata kuliner diharapkan mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi sektor-sektor lainnya di seluruh wilayah Sumatera Barat. Berdasarkan kebijakan di atas, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi adalah untuk kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- a) Kabupaten-kabupaten diharapkan mampu meningkatkan produksi dan produktivitas di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan yang menunjukkan resistensinya terhadap pandemi COVID-19. Diperlukan terobosan-terobosan dan inovasi baru dalam meningkatkan nilai tambah produk di sektor pertanian baik dari segi manajemen pengelolaan maupun dari sisi teknis pertanian secara luas. Beberapa terobosan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :
 1. Pengimplementasikan skema *corporate farming* bisa menjadi pilihan yang pada prinsipnya hampir sama dengan Koperasi Unit Desa (KUD) yang tidak begitu terlihat lagi perannya. Bentuk lain yang mungkin jadi pilihan adalah penguatan Badan Usaha Milik RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 V- 12 Nagari (BUMNag) sebagai motor bagi masyarakat petani untuk meningkatkan posisi tawar di pasar pangan yang didominasi oleh tengkulak.
 2. Perlunya implementasi pertanian organik pada kawasan sentra pertanian dan pemanfaatan hasil pertanian organik.
 3. Gerakan untuk mengajak generasi muda untuk bertani bisa juga menjadi pilihan lain dengan fakta adanya bonus demografi dimana penduduk usia produktif lebih banyak berusia muda dengan *median age* 31 tahun.
 4. Sektor pariwisata di perdesaan juga bisa berkembang dengan mengawinkan kegiatan bertani dengan pengalaman wisata melalui pengembangan desa wisata di berbagai tempat. Selain itu pemanfaatan kawasan hutan produksi dengan mekanisme perhutanan sosial dapat juga menjadi alternatif skema *ecowisata* di kawasan perhutanan sosial. Beberapa kebijakan di atas diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita daerah yang relatif berada di bawah rata-rata provinsi seperti Kabupaten Padang Pariaman, Kepulauan Mentawai, Sijunjung, Solok, Tanah Datar, Agam, Lima Puluh Kota, Solok Selatan, Dharmasraya, Pasaman Barat, Kota Solok, dan Kota Sawahlunto.
- b) Kabupaten/Kota diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sektor industri dan perdagangan. Diperlukan terobosan-terobosan dan inovasi baru dalam meningkatkan

nilai tambah produk di sektor industri dan perdagangan baik dari segi manajemen pengelolaan maupun dari sisi teknis secara luas. Beberapa terobosan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan standar mutu komoditas potensial dan diversifikasi komoditas perdagangan terutama komoditas ekspor. Hal ini perlu ditunjang dengan perluasan implementasi digitalisasi perdagangan melalui penataan, pembinaan, dan pengembangan pasar digital.
 2. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana untuk sentra IKM serta penguatan SDM bagi pelaku IKM dan UMKM pada komoditas potensial. Hal ini perlu ditunjang oleh fasilitasi kemudahan investasi bagi investor lokal, nasional, maupun investor luar negeri.
 3. Penumbuhan wirausaha terutama wirausaha muda dan woman entrepreneur untuk dapat membuka lapangan usaha di komoditas potensial di sektor-sektor strategis. Beberapa kebijakan di atas diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat pengangguran daerah yang relatif berada di bawah rata-rata provinsi seperti Kabupaten Padang Pariaman, Kepulauan Mentawai, Sijunjung, Solok, Tanah Datar, Agam, Pasaman, Dharmasraya, Pasaman Barat, Kota Padang, Kota Sawahlunto, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman.
- c) Kabupaten/Kota diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sektor pariwisata dengan terobosan-terobosan dan inovasi baru dalam meningkatkan nilai tambah produk di sektor pariwisata baik dari segi manajemen pengelolaan maupun dari sisi teknis secara luas. Beberapa terobosan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Membangun dan mengembangkan industri pariwisata halal dengan peningkatan kualitas destinasi yang memenuhi aspek amenities, aksesibilitas, dan atraksi dengan penekanan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 V- 13 pada manajemen pengelolaan destinasi yang bertumpu pada komunitas seperti desa wisata.
 2. Meningkatkan kompetensi SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dalam rangka peningkatan kualitas produk pariwisata dan ekonomi kreatif.
 3. Meningkatkan promosi pariwisata dan ekonomi kreatif dengan pemanfaatan teknologi Informasi serta memperkuat kemitraan Hexahelix. Beberapa kebijakan di atas diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan

penurunan tingkat kemiskinan semua daerah yang relatif berada di bawah rata-rata provinsi.

5. **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

a Indikator Kinerja Makro

Indikator Makro merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial di Sumatera Barat yang terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi, PDRB ADHK2 Per Kapita, PDRB (ADHB) per kapita, Indeks Gini, Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional), Tingkat Kemiskinan, Penduduk Miskin, Tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia. Pertumbuhan ekonomi adalah indikator utama yang sangat penting untuk menjamin kesinambungan untuk menggerakkan pembangunan di daerah namun demikian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas juga diiringi dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka serta penurunan Tingkat Kemiskinan. Adapun proyeksi indikator kinerja makro Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2024 sebagaimana dilihat pada tabel dibawah ini. Proyeksi indikator kinerja makro disusun mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap capaian tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2022 serta memperhatikan target Sumatera Barat dalam RKP tahun 2023, sehingga dalam penetapan target indikator kinerja makro tahun 2023 perlu dilakukan penyesuaian jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

b Indikator Kinerja Utama

Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan tahunan terutama dalam bingkai rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian selama lima tahun ke depan menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi yang disajikan, berikut target Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk tahun 2023-2024 dalam tabel berikut :

Tabel

Indikator Kinerja Makro Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2024

No	Indikator Kinerja Makro	Sumber Data	Target Kinerja		
			2023		2024
			RPJMD	RKPD	RPJMD
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Data diolah	4,57	4,71	4,60
2	PDRB ADHK2 Per Kapita (Rp. Juta)	Data diolah	32,97	33,83	34,09
3	PDRB (ADHB) per kapita (Rp. Juta)	Data diolah	50,60		53,69
4	Indeks Gini (Ratio)	Data diolah	0,296	0,296	0,293
5	Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Data diolah	0,309		0,308
6	Tingkat Kemiskinan (%)	Data diolah	6,16	5,37	6,03
7	Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Data diolah	353,68	306,71	350,62
8	Tingkat pengangguran terbuka (%)	Data diolah	6,45	5,97	6,31
9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Data diolah	73,23	73,46	73,70
	a. Angka Harapan Hidup (Tahun)	Data diolah	69,98	69,97	70,17
	b. Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Data diolah	14,06	14,43	14,08
	c. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Data diolah	9,28	9,25	9,38
	d. Pengeluaran per Kapita (Ribu/Kapita/Tahun)	Data diolah	11.108	10,997	11.342

c Indikator Kinerja Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2021-2026 yang telah direncanakan.

Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi

menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator Kinerja Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut secara rinci disajikan pada tabel berikut :

2.1 2. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022

1. Bab I Pendahuluan

a. Maksud

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 yang sedang dilaksanakan merupakan hasil dari proyeksi ke depan dengan asumsi-asumsi yang diperkirakan akan terjadi. Sejalan dengan pelaksanaan APBD Tahun 2022 tersebut, ditemui beberapa hal yang sudah tidak sejalan lagi dengan asumsi-asumsi yang melatarbelakangi penyusunannya. Hal ini apabila tetap dilanjutkan, dapat menimbulkan ketidaksinkronan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur No. 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022.

Untuk melakukan perubahan pada APBD Tahun 2022, perlu dilakukan perubahan terlebih dulu terhadap RKPD Tahun 2022 yang menjadi acuan dalam penyusunan APBD. Hal ini diatur lebih lanjut pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Untuk melakukan perubahan pada APBD Tahun 2022, perlu dilakukan perubahan terlebih dulu terhadap RKPD Tahun 2022 yang menjadi acuan dalam penyusunan

APBD. Hal ini diatur lebih lanjut pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 343 Permendagri 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :

1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
2. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Selain itu juga, perubahan RKPD juga dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Arah kebijakan perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 yakni :

1. Penyesuaian target kinerja indikator pembangunan daerah tahun 2022.
2. Pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran dan kegiatan, perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan, target kinerja kegiatan, serta manfaat atau hasil daripada kegiatan.
3. Penyesuaian pendapatan baik dana transfer maupun PAD, pemanfaatan Silpa berdasarkan hasil audit laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 oleh BPK.
4. Mengakomodir Visi, Misi dan program unggulan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
5. Mengakomodir kewajiban kebijakan anggaran yang belum terpenuhi pada penyusunan APBD Tahun 2022.

6. Memenuhi kewajiban kepada Pihak Ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai tahun sebelumnya yang telah ada berita acara serah terima pekerjaan dan telah diterbitkan SPM namun belum dilakukan pembayaran.
7. Meningkatkan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kelas jabatan dengan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
8. Evaluasi pelaksanaan RKPD triwulan II Tahun 2022.

b. Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 bertujuan sebagai berikut:

1. Penjabaran sasaran dan prioritas pembangunan jangka menengah (RPJMD tahun 2016 – 2021) serta penyesuaian terhadap Visi, Misi dan Program Unggulan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
2. Pedoman bagi Perubahan APBD Tahun 2022.
3. Pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.
4. Integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan.
5. Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan.

c. Dasar Pertimbangan Perubahan

Berdasarkan pasal 343 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Perubahan RKPD Tahun 2022 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau;

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Namun berdasarkan pasal 343 ayat 4 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut juga menyatakan bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Perubahan RKPD 2022 salah satunya untuk mengakomodir Program Unggulan RPJMD Tahun 2021-2026 yang dapat dilaksanakan pada perubahan APBD 2022 dan mengakomodir kewajiban kebijakan anggaran yang belum terpenuhi pada penyusunan APBD Tahun 2022.

Selain itu, perubahan RKPD 2022 juga dilakukan untuk mengakomodir :

1. Penyesuaian anggaran belanja melalui pergeseran anggaran belanja, untuk menyesuaikan kembali Standar Satuan Harga (SHS) berdasarkan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 900/7120/SJ dan memperhatikan Diktum kesebelas Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2022 pada huruf k dalam upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan masyarakat yang rentan untuk meninggal.
3. Terdapatnya dana transfer dari Pemerintah Kabupaten dan Kota kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan surat Bupati Sijunjung, Bupati Pasaman, Walikota Pariaman, serta Walikota Bukittinggi, Pemerintah Kabupaten dan Kota memberikan Bantuan Keuangan bersifat Khusus kepada Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2022 untuk keberlangsungan dan penguatan program pendidikan pada tingkat SMA, SMK dan SLB yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi.
4. Terdapatnya paket pekerjaan tahun anggaran 2021 yang proses pekerjaan telah selesai dilaksanakan, namun belum dilakukan pembayaran, dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 bahwa dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada Pihak Ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai tahun sebelumnya yang telah ada berita acara serah terima pekerjaan dan telah diterbitkan

- SPM namun belum dilakukan pembayaran, selanjutnya dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2022.
5. Akibat terjadinya pasca gempa bumi di Nagari Kajai Kec. Talamau Kab. Pasaman Barat dan Nagari Malampah Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman tanggal 25 Februari 2022, menyebabkan daerah aliran sungai di selingkar Gunung Talamau berpotensi terjadinya aliran debris/galodo yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan yang lebih besar, maka sesuai diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk keperluan penyediaan anggaran mendesak dan penanganan Darurat dilakukan pergeseran anggaran Belanja Tidak Terduga.
 6. Terdapatnya penyesuaian penempatan belanja subsidi dan alokasi anggaran, sebelumnya dianggarkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi sedang menurut kodefikasi dan nomenklatur keuangan daerah serta kewenangannya agar dipindahkan penganggarannya pada Dinas Koperasi dan UKM, dalam rangka upaya menertibkan administrasi pengelolaan keuangan daerah, sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.
 7. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2022 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 Hijriah/2002 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji, Nilai Manfaat, dan Dana Efisiensi, perlu melakukan penyesuaian dengan melakukan pergeseran anggaran belanja untuk mendukung penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 Hijriah Masehi terkait dengan biaya perjalanan ibadah haji.
 8. Kekurangan penganggaran Belanja Pegawai khususnya Belanja Gaji dan Tunjangan ASN pada SKPD tidak mencukupi memenuhi kebutuhan sampai akhir tahun berkenaan, untuk mengatasi kekurangan anggaran sebagaimana dimaksud dengan melakukan pergeseran anggaran belanja berdasarkan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 9. Penyesuaian penempatan alokasi Dana Transfer sesuai dengan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor : 906/2114/SJ tanggal 19 April 2022 perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran

2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes.

2. Bab II Evaluasi Hasil RKPD Sampai Dengan Triwulan II

Sebagai dasar penyusunan perubahan RKPD Tahun 2022, maka berdasarkan pasal 343 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Perubahan RKPD Tahun 2022 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

a. Capaian Indikator Makro sampai Triwulan II Tahun 2022

Indikator makro pada Tahun 2022 merupakan indikator kinerja utama Gubernur yang menjadi alat ukur ketercapaian visi dan misi sebagai periode kedua RPJMD Tahun 2021-2026. Capaian indikator makro pembangunan Sumatera Barat sampai dengan Triwulan I-2022 menggambarkan kinerja aspek pembangunan manusia yang diwakili oleh indikator Indeks Pembangunan Manusia dan aspek Pembangunan Ekonomi yang diwakili oleh indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, dan Tingkat Kemiskinan sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Target dan Realisasi Indikator Makro sampai Triwulan II Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2022 (RPJMD)	Target 2022 (RKPD)	Realisasi 2022 Triwulan II
1	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	72,74	72,74	72,65 (2021/Rilis Maret 2022)
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,40	3,40	3,64 (TW I)
3	Tingkat Pengangguran terbuka (%)	6,60	6,60	6,17 (Feb 22)
4	Gini Ratio (Poin)	0,298	0,298	0,300 (Sep 21) *)Mar 22 blm keluar
5	Kemiskinan (%)	6,28	6,28	6,04 (Sep 21) *)Mar 22 blm keluar

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021 (Rilis BPS pada Maret 2022), berada pada angka 72.65. Dengan capaian tersebut, Sumatera Barat menduduki peringkat ke-3 IPM tertinggi di kawasan Sumatera dan

peringkat ke-9 IPM tertinggi secara nasional. Bahkan, nilai IPM Sumatera Barat tersebut berada diatas IPM Indonesia sebesar 72,29. Angka ini meningkat sebesar 0,27 poin atau lebih tinggi sebesar 0,27 persen dibanding tahun 2020 sebesar 72,38. Indikator IPM digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, seperti angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Pada tahun 2020 terjadinya penurunan Indeks Pembangunan Manusia, karena Pandemi COVID-19 khususnya pada komponen pengeluaran perkapita. Kemudian ditahun 2021 seiring dengan pemulihan ekonomi sehingga semua komponen IPM menunjukkan kenaikan perbaikan dibanding tahun sebelumnya, yang didorong oleh komponen pengeluaran riil per kapita masyarakat yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pengeluaran riil per kapita masyarakat tercatat sebesar Rp 10,79 juta per tahun dari sebelumnya Rp 10,73 juta di tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa setelah lebih dari satu tahun pandemi COVID-19 melanda Sumatera Barat, pengeluaran riil per kapita mulai meningkat kembali seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi sepanjang tahun 2021.

Perekonomian Sumatera Barat pada triwulan I 2022 tumbuh positif melanjutkan tren perbaikan ekonomi. Perekonomian Sumatera Barat pada triwulan I 2022 tercatat sebesar 3,64% (yoy) melambat dibandingkan dengan triwulan IV 2021 yang tumbuh 4,38% (yoy). Kinerja positif ini didorong oleh peningkatan permintaan domestik secara umum seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), hampir seluruh LU pada triwulan I 2022 menunjukkan pertumbuhan positif. Perbaikan kinerja LU terutama didorong oleh LU Transportasi dan Pergudangan, LU Perdagangan Besar dan Eceran, serta LU Pertanian, seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat yang terjadi di seluruh wilayah.

Perekonomian Sumatera Barat berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2022 mencapai Rp 65,93 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 44,52 triliun. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,95 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 5,66 persen. Ekonomi Sumatera Barat triwulan I-2022 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,31 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Industri Pengolahan mengalami kontraksi tertinggi sebesar 8,30 persen. Sementara dari sisi pengeluaran,

Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami kontraksi terdalam sebesar 43,78 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT Sumatera Barat hasil Sakernas Februari 2022 adalah sebesar 6,17 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar enam orang penganggur. Kondisi ini lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,67%. Penurunan pengangguran seiring dengan ketersediaan lapangan kerja yang meningkat dampak dari perekonomian yang terus bertumbuh serta terkendalinya kasus COVID-19. Kondisi ketenagakerjaan di Sumatera Barat tercatat semakin membaik. Hal ini tercermin dari angka pengangguran pada Februari 2022 yang sebesar 179,22 ribu orang, menurun sebanyak 7,34 ribu orang dibandingkan dengan periode Februari 2021.

Jumlah angkatan kerja Sumatera Barat pada Februari 2022 adalah sebanyak 2,87 juta orang, meningkat 3,73 % atau 103,15 ribu orang dibanding Februari 2021. Penduduk yang bekerja di Sumatera Barat pada Februari 2022 sebanyak 2,69 juta orang, naik 110,49 ribu orang dibandingkan Februari 2021 (2,58 juta orang). Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Akomodasi Makan dan Minum (0,83 persen poin). Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (1,59 persen poin). Sebanyak 1,70 juta orang (63,23 persen) bekerja pada kegiatan informal, turun 0,36 persen poin dibanding Februari 2021.

Data BPS juga menunjukkan, terdapat 179,23 ribu orang (4,24 persen penduduk usia kerja) yang terdampak COVID-19, yang terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (22,04 ribu orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (13,10 ribu orang), sementara tidak bekerja karena COVID-19 (6,68 ribu orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (137,41 ribu orang). Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Februari 2022 sebesar 68,00 persen, yaitu turun 0,41 persen poin dibanding Februari 2021.

Indikator ketimpangan atau ketidakmerataan ekonomi Sumatera Barat sepanjang tahun 2021 terpantau membaik. Hal tersebut tergambar dari penurunan gini ratio Provinsi Sumatera Barat dari 0,301 pada September 2020 menjadi 0,300 pada September 2021. Apabila dibandingkan dengan angka nasional dan provinsi lainnya di regional Sumatera, rasio gini Sumatera Barat tersebut masih lebih baik dibandingkan

dengan gini rasio nasional sebesar 0,381, bahkan berada pada urutan terendah ke-2 di Sumatera dan terendah ke-4 di Indonesia. Semakin kecil angka rasio gini maka akan semakin baik karena mengindikasikan peningkatan pemerataan distribusi ekonomi penduduk suatu wilayah atau berkurangnya tingkat ketimpangan ekonomi. Selain itu, penurunan ketimpangan juga mengindikasikan adanya kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Lebih lanjut, data menunjukkan Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2021 tercatat sebesar 0,327, turun sebesar 0,002 poin dibandingkan Gini Ratio Maret 2021 yang sebesar 0,329. Gini Ratio di daerah pedesaan pada September 2021 tercatat sebesar 0,252, atau turun sebesar 0,002 poin dibanding angka Maret 2021 sebesar 0,254.

Pada bulan September 2021, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Sumatera Barat mencapai 339,93 ribu orang (6,04 persen), berkurang sebesar 30,7 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2021 yang sebesar 370,67. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2021–September 2021, jumlah penduduk miskin perkotaan turun sebesar 11,05 ribu orang, di pedesaan juga mengalami penurunan sebesar 19,70 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 5,30 persen menjadi 4,83 persen, sementara itu, di pedesaan juga turun dari 7,91 persen menjadi 7,23 persen. Hal ini menunjukkan peningkatan kesejahteraan terjadi baik di daerah perkotaan ataupun pedesaan, dimana penduduk miskin di perkotaan dan pedesaan terpantau masing-masing mengalami penurunan. Meski penurunan masyarakat miskin di pedesaan jauh lebih besar daripada di perkotaan, namun mayoritas penduduk miskin di Sumatera Barat berada di pedesaan dengan jumlah sebanyak 205,39 ribu jiwa, sedangkan penduduk miskin di perkotaan sebanyak 134,53 ribu jiwa.

3. Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

Pencapaian target kinerja makro ekonomi daerah tersebut tidak bisa terlepas dari kontribusi kerangka keuangan dan pendanaan daerah. Realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun berjalan hingga triwulan II akan menjadi basis untuk mengalokasikan anggaran dalam RKPD Perubahan secara efektif dan efisien. Selanjutnya terdapat analisis terhadap potensi sumber-sumber pendapatan daerah serta prediksi belanja dan pembiayaan daerah untuk tahun 2022.

Perubahan kerangka kerangka ekonomi dan keuangan daerah Tahun 2022 diharapkan bisa menjadi jembatan antara fungsi perencanaan dan penganggaran yang

efektif dan efisien untuk mencapai target kinerja pembangunan daerah serta menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi seperti Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Sumatera Barat.

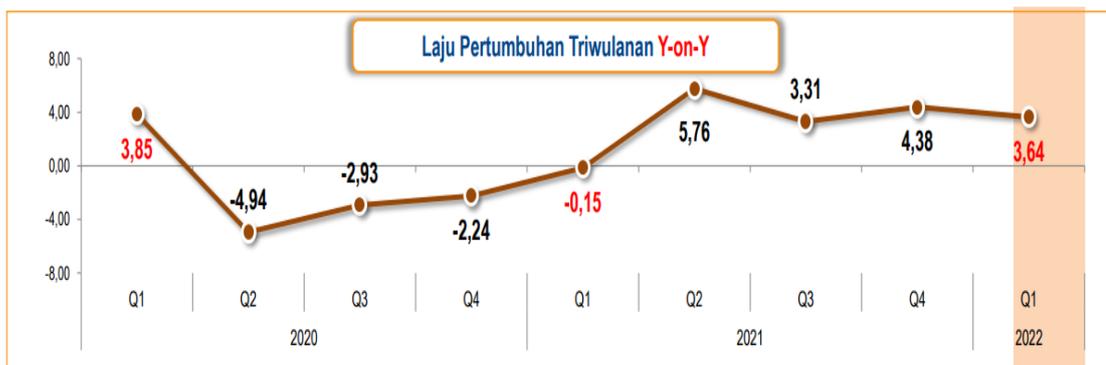
a Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah pada RKPD Perubahan Tahun 2022 merupakan gambaran ekonomi makro pada triwulan I tahun 2022 dan perkiraan pencapaian hingga triwulan IV tahun 2022 beserta tantangan pembangunan ekonomi daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan daerah. Sasaran ekonomi tersebut dapat dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan serta langkah-langkah kebijakan yang disusun guna mengatasi permasalahan dan menghadapi tantangan Tahun 2022.

b Pertumbuhan Ekonomi

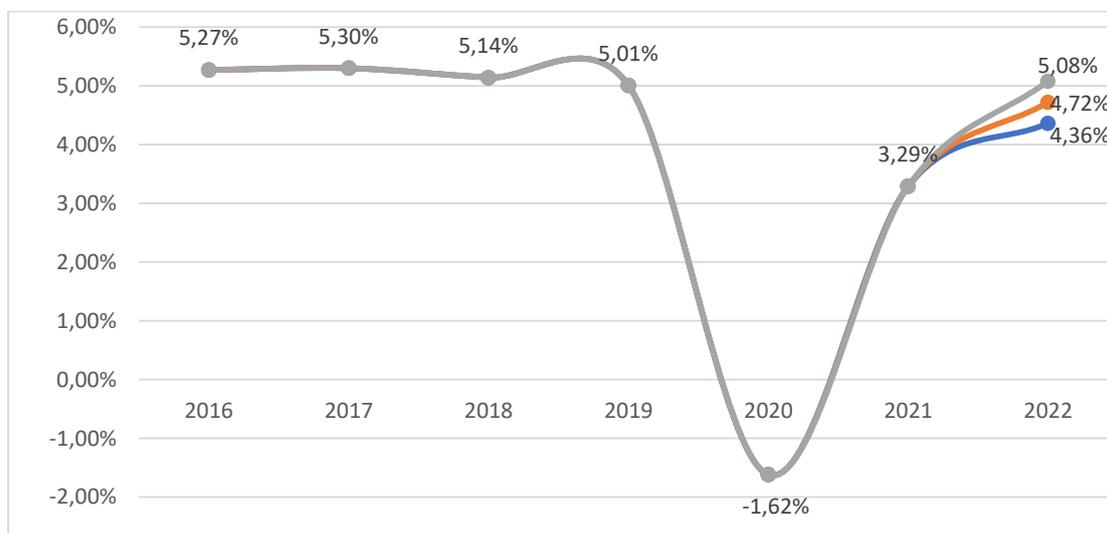
Kondisi perekonomian Provinsi Sumatera Barat dilihat berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku untuk triwulan I tahun 2022 mencapai Rp. 61,72 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 42,96 triliun. Ekonomi Sumatera Barat triwulan I-2022 tumbuh 3,64 persen (y-on-y) dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar -0,16 persen. Pertumbuhan yang terjadi terutama disebabkan oleh peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat pasca pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang meluas sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2021 menekan laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Proses vaksinasi yang dimulai pada bulan Februari 2021 hingga satu tahun pelaksanaannya sudah mencapai angka diatas 80%.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat
Triwulanan (Y-on-Y) Tahun 2020-2022



Pada triwulan II 2022, ekonomi Sumatera Barat diperkirakan akan kembali tumbuh pesat menjadi sebesar 5,0% - 5,5% (y-o-y) akibat peningkatan aktivitas masyarakat terutama mulai menjelang puasa bulan Ramadhan hingga perayaan hari besar keagamaan yaitu Idul Fitri dalam bentuk aktivitas mudik yang tertahan selama 2 tahun. Di sisi permintaan domestik, konsumsi diperkirakan akan meningkat dipengaruhi peningkatan pendapatan masyarakat dan keyakinan konsumen. Investasi turut meningkat seiring dengan berjalannya beberapa proyek strategis nasional. Demikian pula, peningkatan kinerja ekspor diperkirakan terjadi seiring dengan meningkatnya harga dunia untuk komoditas unggulan Sumatera Barat yaitu CPO dan karet. Dari sisi sektoral, kinerja sektor pariwisata (LU perdagangan besar dan eceran, LU transportasi dan pergudangan, dan LU penyediaan akomodasi dan makan minum) diperkirakan akan meningkat seiring dengan pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas sosial-ekonomi oleh Pemerintah. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat triwulan II 2022 diperkirakan berada pada kisaran 5,0% - 5,5% (y-o-y) lebih tinggi dari realisasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2021 sebesar -1,31%, dan sedikit lebih lambat pada periode yang sama tahun 2021 sebesar 5,77%

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016-2021 dan Prediksi Tahun 2022



c Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, juga memperhatikan usulan-usulan SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya dengan memperhatikan:

1. Relevansi dan keterkaitan terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, diantaranya terhadap Pendidikan, Kesehatan,

Perumahan dan Permukiman, Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata, Ketahanan Energi, Ketahanan Pangan, Penanggulangan Kemiskinan, Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman, Pembangunan Wilayah, dan Hukum.

2. Relevansi dan keterkaitan terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026.
3. Relevansi dan keterkaitan terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah.
4. Relevansi dan keterkaitan terhadap isu strategis daerah.

4. Bab IV Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

A Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022

Tahun 2022 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 (empat) pilar untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, diantaranya sebagai berikut **Pilar Pertama** Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; **Pilar Kedua** Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; **Pilar Ketiga** Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan **Pilar Keempat** Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas. Adapun Visi RPJMN 2020-2024 adalah:

“ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Visi tersebut akan diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; (3) Pembangunan yang Merata

dan Berkeadilan; (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sebagai strategi dalam melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama, mencakup:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), yang fokus kepada membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global, dengan strategi yakni :
 - a. Pemenuhan Layanan dasar dan Perlindungan Sosial.
 - b. Peningkatan Produktifitas SDM.
 - c. Pembangunan Karakter.
2. Pembangunan Infrastruktur, dengan fokus kepada melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat, dengan strategi yakni :
 - a. Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar
 - b. Peningkatan Infrastruktur Ekonomi
 - c. Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
 - d. Peningkatan dan Keberlanjutan Akses Energi dan Ketenagalistrikan
 - e. Peningkatan dan pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) untuk transformasi digital
3. Penyederhanaan Regulasi, dengan focus kepada menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM, dengan strategi yakni :
 - a. Penerapan pendekatan *Omnibus Law* yakni Penggabungan Beberapa Ketentuan Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang dengan Membatalkan Undang-Undang Sebelumnya.

- b. Pendekatan terhadap Regulasi yang akan disusun melalui Analisis Dampak Regulasi dan Analisis Biaya dan Manfaat.
4. Penyederhanaan Birokrasi, dengan focus kepada memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi, dengan strategi yakni :
 - a. Penyederhanaan Prosedur
 - b. Penyelenggaraan e-Government
 - c. Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Untuk Kegiatan Ekspor/Impor, Kepabeanaan, Dan Kepelabuhan
5. Transformasi Ekonomi, dengan focus kepada transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan strategi yakni :
 - a. Industrialisasi
 - b. Pengembangan Destinasi Unggulan
 - c. Penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, yang disusun berlandaskan RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden terpilih, selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (goals) dalam tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yakni sebagai berikut:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas. Peningkatan dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
 - 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan;
 - 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan

ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

1. Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
 2. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
 3. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
 4. Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
 5. Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
1. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
 2. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 3. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 4. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 5. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 6. Pengentasan kemiskinan; dan
 7. Peningkatan produktivitas dan daya saing
- d. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa. Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsabangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:
1. Memperkukuh ketahanan budaya bangsa;
 2. Memajukan kebudayaan;

3. Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
 4. Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga; serta
 5. Meningkatkan budaya literasi.
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:
1. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
 2. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
 3. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
 4. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; serta
 5. Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:
1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
 3. Pembangunan Rendah Karbon.
- g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:
1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
 2. Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;
 3. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
 4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
 5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di Iuar negeri.

B Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Dengan mempertimbangkan potensi, capaian pembangunan daerah satu tahun sebelumnya, kondisi saat ini, permasalahan, isu strategis, tantangan dan peluang serta kondisi sosial budaya masyarakat Sumatera Barat dimaksud, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2022 mengacu kepada Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu :

“Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan”

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2022 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan, memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matrik tabel berikut:

Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

VISI Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing	Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		Menurunnya prevalensi stunting
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan
		Meningkatnya Daya Saing Masyarakat
Misi 2: Meningkatkan Tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	Meningkatnya Ketahanan sosial Budaya masyarakat yang berlandaskan ASB-SBK
		Meningkatnya Budaya Literasi
		Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Misi 3: Meningkatkan Nilai tambah dan Produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)
		Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan
		Meningkatnya pendapatan Petani Hutan
		Meningkatnya pendapatan Petani Hutan
Misi 4: Meningkatkan usaha	Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital	Sumatera barat sebagai pusat perdagangan
		Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil

perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	yang tangguh dan berdaya saing	dan menengah
		Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera
		Terciptanya 100.000 entrepreneur dari berbagai sektor
		Meningkatnya pertumbuhan investasi
		Meningkatnya peran ekonomi digital
Misi 5: Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat
		Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat
Misi 6: Meningkatkan pengembangan infrastruktur yang berkeadilan berkelanjutan	Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegasi
		Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
		Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas
		Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian
		Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani
Misi 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	Terwujudnya kualitas tata Kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel
		Meningkatnya kapabilitas birokrasi
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Tujuan dan sasaran Misi Pertama, **“Mewujudkan SDM Berakhlak Mulia Sehat, Unggul dan Berdaya Saing”** terkait dengan isu strategis Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dari aspek Pendidikan dan Kesehatan yang tetap mengkedepankan karakter berakhlak mulia sebagai perwujudan karakter yang madani, serta memiliki keterampilan untuk mampu berdaya saing serta tangguh dan memiliki nilai kompetisi yang tinggi.

Tujuan dan sasaran Misi Kedua, **“Mewujudkan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah Sebagai falsafah Kehidupan Masyarakat”** terkait dengan isu strategis Peningkatan Pengamalan Nilai-Nilai Agama dan Adat ditengah-tengah masyarakat yang diwujudkan dengan sikap toleransi, saling menghormati, patuh terhadap norma-norma agama, adat dan hukum positif, serta karakter masyarakat yang santun dan berkontribusi positif dalam pelaksanaan pembangunan, selain itu isu strategis dalam tujuan ini adalah terkait dengan pemajuan kebudayaan sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Tujuan dan sasaran Misi Ketiga, **“Mewujudkan Kesejahteraan Petani”** terkait dengan isu meningkatkan pendapatan petani yang berada di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan melalui peningkatkan nilai tambah terhadap

produk pertanian serta pengembangan terhadap hilirasi pertanian secara terpadu dan berkualitas.

Tujuan dan sasaran Misi Keempat, **“Mewujudkan Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi Digital yang Tangguh dan Berdaya Saing”** terkait dengan isu strategis menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat UMKM dan industri kecil dan menengah yang kedepan menjadi penggerak perekonomian Sumatera Barat yang tahan terhadap goncangan ekonomi serta mampu bersaing ditingkat global.

Tujuan dan sasaran Misi Kelima, **“Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap Perekonomian Sumatera Barat”** terkait dengan isu strategis menjadikan pariwisata sebagai etalase Sumatera Barat yang efektif sebagai sektor yang memberikan efek positif pada semua sektor untuk menstimulus pergerakan dan laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

Tujuan dan sasaran Misi Keenam, **“Terwujudnya Infrastruktur yang Handal dan Merata”** terkait dengan isu strategis dukungan infrastruktur yang berkualitas dalam mendukung layanan dasar kepada masyarakat dan penggerak ekonomi daerah, membangun ketahanan bencana serta kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan yang dapat dipertanggungjawab kepada generasi selanjutnya.

Tujuan dan sasaran Misi Ketujuh, **“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”** terkait dengan isu strategis Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, efektif, efisien, akuntabel dan transparan yang diwujudkan dengan implementasi reformasi birokrasi yang maksimal pada semua aspek dan bidang penyelenggaran pemerintahan.

Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD, dengan memperhatikan dampak dari pandemic Covid-19 yang mengakibatkan pelemahan ekonomi nasional dan Sumatera Barat yang mengalami kontraksi di Tahun 2020, ketidakpastian penyelesaian akan wabah Covid-19 baik di tingkat global maupun domestik, serta dukungan terhadap pencapaian Tema Pembangunan RKP Tahun 2022, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan menjadi Tema Provinsi Sumatera Barat :

“PEMULIHAN EKONOMI MELALUI SEKTOR STRATEGIS DAERAH”

C Prioritas Pembangunan Tahun 2022

Penentuan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2022 dilakukan dengan mempertimbangkan dan mendasarkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2020 dan evaluasi kinerja tahun berjalan di tahun 2022.

2. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional sesuai RKP Tahun 2022.
3. Sasaran pokok arah kebijakan tahun kelima pembangunan tahun 2022, yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026.
4. Pencapaian terhadap target Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 6 Bidang yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sosial.
5. Relevansi dan keterkaitan terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan sesuai dengan misi RPJMD yang di fokuskan pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, tata kehidupan sosial kemasyarakatan yang berpegang pada filosofi *Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*, peningkatan produktifitas sektor pertanian, peningkatan kontribusi perdagangan dan industri pengolahan, peningkatan produktifitas sektor pariwisata sebagai upaya alternatif baru peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat, pengembangan infrastruktur yang mendukung produktifitas pertanian, industri dan perdagangan serta pariwisata serta peningkatan tata 103ndust pemerintahan yang baik yang lebih difokuskan pada upaya peningkatan pelayanan 103ndust yang memuaskan.
6. Upaya pemulihan ekonomi sebagai dampak dari Covid 19 yang dititikberatkan pada sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan serta pariwisata.
7. Relevansi dan keterkaitan terhadap pencapaian program unggulan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050 – 47 – 2022 Tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
8. Relevansi dan keterkaitan terhadap isu strategis daerah

D Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022

Mengacu pada tema, 103ndus, dan sasaran pembangunan RKP tahun 2022, maka arah kebijakan yang akan ditempuh pada RKP 2022 adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi 103ndustry1031 dengan menitikberatkan pada pemantapan tahun 2022 sebagai tahun kunci untuk memperkuat landasan ekonomi dalam jangka menengah dan 103ndustr untuk keluar dalam jebakan sebagai negara berpenghasilan menengah serta juga sebagai tahun kunci pemulihan ekonomi sebagai dampak dari pandemic Covid 19 yang dimulai pada awal triwulan I Tahun 2020.

Adapun penekanan terhadap Prioritas Nasional (PN) yang akan mendukung pencapaian sasaran pembangunan Nasional tahun 2022 yakni :

1. PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

Kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang berjalan lambat akibat 104ndustry COVID-19 serta reformasi structural menuju negara berpenghasilan tinggi dalam jangka menengah dan 104ndustr. Pelaksanaannya diantaranya melalui: menjalankan Program Ketersediaan Akses dan Kualitas Pangan; penguatan penyediaan energi yang terjangkau; penguatan daya saing 104ndustry melalui peningkatan akses ke pasar ekspor; pemulihan pariwisata nasional dengan meningkatkan konektivitas, perluasan pemasaran, serta diversifikasi destinasi pariwisata; dan, penguatan dukungan kepastian usaha, perluasan investasi, serta efisiensi distribusi dan perdagangan

2. PN 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Kebijakan pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan tahun 2022 diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah. Prioritas pengembangan wilayah difokuskan pada perwujudan kerja sama investasi, perdagangan dan investasi sektor-sektor industri dan pariwisata wilayah timur, dengan tetap menjaga daya saing sektor perkebunan, perikanan, pertanian, serta potensi pertumbuhan wilayah barat.

3. PN 3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

Kebijakan peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing tahun 2022 diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; penguatan pelaksanaan perlindungan sosial melalui integrasi program bantuan sosial; peningkatan pelayanan kesehatan dan penguatan *health security*; peningkatan pemerataan layanan berkualitas; penyediaan dan pengembangan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran virtual; peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda; perluasan akses dan ketahanan ekonomi penduduk miskin, rentan, dan terdampak Covid-19 terhadap aset produktif; serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, dengan mengutamakan perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang terdampak pandemi Covid-19

4. PN 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Kebijakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 melalui

perluasan pusat-pusat gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu; pembangunan ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan; peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang dapat saling menghormati agama/keyakinan yang lain, inklusif, dan toleran; serta pengembangan layanan literasi berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat.

5. PN 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Kebijakan pembangunan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar tahun 2022 diarahkan untuk pemulihan pascapandemi Covid-19 yaitu pemulihan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman; peningkatan layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan; peningkatan layanan keselamatan dan keamanan transportasi; peningkatan ketahanan infrastruktur; optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi; peningkatan konektivitas wilayah; pengembangan angkutan umum massal di enam kota metropolitan; peningkatan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik; pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dan kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi; serta optimalisasi strategi investasi badan usaha dan pengembangan metode-metode peningkatan kualitas perencanaan, penyiapan pelaksanaan dan pemeliharaan proyek infrastruktur.

6. PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

Kebijakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap dampak bencana nonalam seperti pandemi Covid-19, serta perubahan iklim tahun 2021, diarahkan untuk: penguatan upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; penguatan sistem dan respon peringatan dini bencana alam (fokus pada bencana geologi tektonik dan vulkanik, bencana hidrometeorologi, dan bencana lingkungan) dan bencana nonalam (fokus pada kesiapsiagaan dalam pencegahan penyebaran pandemi penyakit); serta peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK, dengan focus penurunan emisi GRK pada sektor lahan, industri, dan energi.

7. PN 7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik

Kebijakan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik tahun 2022 diarahkan untuk mendukung pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 dalam upaya mewujudkan situasi kondusif melalui penegakan hukum dan penciptaan

keamanan (law and order). Kebijakan ini diantaranya dilaksanakan melalui: penguatan perlindungan WNI di luar negeri; intensifikasi kerjasama pembangunan internasional; penguatan sinergitas, sinkronisasi, dan pemerataan informasi berkeadilan; pemulihan kinerja pelayanan publik; serta peningkatan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) penanggulangan bencana serta kontingensi dalam rangka pemulihan pascapandemi Covid-19.

E Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022

Arah kebijakan pembangunan tahun 2022 disesuaikan dengan Visi dan Misi RPJMD 2021-2026 yang tetap difokuskan kepada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai hasil akhir pelaksanaan Visi RPJMD 2021-2026, namun demikian arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2022 juga adaptif dan responsive terhadap dampak pandemic Covid-19 sekaligus juga mendukung pencapaian Tema RKP dalam rangka pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang juga menjadi penekanan dalam penentuan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2022.

Adapun penyelarasan antara prioritas Nasional Tahun 2022 dengan Prioritas Provinsi Tahun 2022 disajikan sebagai berikut :

Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	Keterangan
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 3
		Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	Prioritas 4
		Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Prioritas 5
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Prioritas 6
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Mewujudkan Sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing	Prioritas 1
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Prioritas 2
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Prioritas 6
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Prioritas 6
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Prioritas 7

BAB III

PELAKSANAAN KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Rapat-Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Rapat percepatan implementasi sertifikat halal bagi UMKM di Sumatera Barat

a. Dasar Pelaksanaan Rapat

Undangan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat nomor : 050/27/II/Eko-SDA/Bappeda-2022 tanggal 2 Februari 2022 perihal percepatan implementasi sertifikat halal bagi UMKM di Sumatera Barat

b. Waktu dan Tempat

Senin, 7 Februari 2022 di ruang rapat lantai 1 Bappeda Provinsi Sumbar

c. Peserta Rapat:

1. Kepala Bappeda Prov. Sumbar
2. Anggota TGUPSM
3. Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumbar
4. Kabid Ekonomi dan SDA Bappeda Prov. Sumbar
5. Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi dan SDA
6. Staf Bidang Ekonomi dan SDA

d. Hasil Rapat

Rapat dipimpin oleh Kepala Bappeda Medi Iswandi, MM dengan moderator oleh Kabid. Ekonomi dan SDA Ir. Benny Sakti, MM

1. Mulyadi TGUPSM

KNKS yang dipimpin oleh Wakil Presiden, Provisi Sumbar menjadi salah satu Provinsi percontohan dalam pelaksanaan industri halal di Indonesia. Direncanakan Pusat informasi halal :dikawasan Mesjid Raya Sumatera Barat, karena kawasan Mesjid Raya Sumatera Barat dianggap sebagai literasi dari penerapan ASBSBK, Kemudian juga perlu ditentukan bagaimana pilihan kita tentang Road Map berdsarkan kawasan tersebut,

2. Ir. Benny Sakti, MM. Kabid Ekonomi dan SDA
 - a. Untuk membangun Kawasan industri halal dapat dilaksanakan terlebih dahulu menyusun master plan dan roadmap industri halal
 - b. Perlu dilakukan koordinasi dengan kab/kota dalam mengadakan pendamping halal
 - c. Untuk anggaran mungkin baru bisa pada anggaran Perubahan APBD, tapi tidak bisa menunggu perubahan tersebut, untuk itu perlu cara lain dalam pendanaan tersebut
3. Dr. Ikra Abdi, Kementerian Agama Provinsi Sumbar
 - a. Untuk Informasi : pada tahun 2022 BPIH menyediakan 25 ribu paket sertifikat halal untuk UKM se indonesia. dijadikan kuota per daerah. Paket tahun 2022 secara nasional 10 juta target pemeritah sertifikat halal bagi UMK untuk percepatan sertifikat halal. Apakah kita didaerah sudah siap untuk mencari pelaku usaha untuk disertifikat halal tersebut. Kendalanya adalah kita belum punya tenaga PPH yang akan menjadi pendamping halal. Jadi tugas pertama kita adalah mengangkat tenaga PPH. Solusinya adalah melibatkan daerah kab/kota dalam mengadakan dan melatih pendamping halal. Untuk tahun 2022 bagaimana dengan anggarannya, karena belum terakomodir dalam APBD awal tahun 2022
 - b. Provinsi Sumatrra Barat menjadi prioritas halal nasional, alasannya salah satunya adalah karena sudah mempunyai Perda Halal. Sumber pembiayaan adanya shering pembiayaan, APBD dari OPD, sumber lain yang sah
 - c. Syaratnya dari UKM yang akan disertifikat halal tersebut adalah sudah ada NIB.
 - d. Sidang hasil pemeriksaan halal itu biasanya diadakan di Provinsi tapi kini dituturkan sampai ke kab/kota. Kendalanya sosialisasinya tidak sampai ke MUI. Untuk itu perlu peran Satgas didaerah untuk pendampingan dan sosialisasi
 - e. Pelatihan PPH dari unsur non PNS secara daring
 - f. Pelatih Pendamping halal sudah ada di tiga perguruan tinggi, yaitu UIN Imam Bonjol Padang, IAIN Bukittinggi dan IAIN Batusangkar
 - g. Untuk pelaksanaan sertifikasi halal ini harus dilibatkan legiaslatif DPRD Provinsi, dan DPRD kab/kota, karena legislatif mempunyai konstituen di daerah yang dapat mendukung sertifikasi halal ini. Juga perlu dilibatkan media

untuk promosi yang informasi ke masyarakat dan dapat melibatkan Asosiasi-asosiasi pedagang UMKM

4. Kepala Bappeda

- a. Masalah sertifikasi halal sangat ugen sebenarnya, sudah lama diskusinya. Untuk itu kita perlu eksennya. Berapa butuh anggarannya, berapa jumlahnya. Siapa mengerjakan apa dan yang perlu segera dibuat adalah action plan,
- b. Dibuat FGD untuk penyusunan SK Tim, dibuat actin plan yang detail
- c. Kegiatan ini haru dianggarkan, dengan FGD tersebut dapat diketahui apa yang aka dikerjakan, siapa yang akan mengerjakan, apa tujuan dan apa hasil yang akan dicapai.
- d. Perlu disusun Action Plan untuk percepatan implementasi sertifikat halal bagi Pelaku Usaha di sumatera Barat, hal ini diperlukan sehingga bagi jelas kegiatan dan sub kegiatan nantinya di OPD
- e. Di segerakan dilaksanakan FGD dengan OPD sehingga dapat dibuat strategi untuk percepatan sertifikat halal bagi UMK.

5. DR. Ahmad Sobri UIN Imam Bonjol Padang

- a. Agenda utama ekonomi syariah sumatera barat 2021 -2024 :
 - Penguatan Lembaga Keuangan Syariah (Konversi Bank Nagari Awal 2023)
 - Pengembangan Industri Halal (Menjadi Pusat Industri Halal Indonesia dan Dunia)
 - Optimalisasi Keuangan Sosial Syariah (Pilot Project Gerakan Nasional Wakaf Uang)
 - Pembentukan KDEKS (Pertama dan Percontohan di Indonesia)
 - Penyusunan Perda/ Pergub Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah (Legal Protection

Dasar Hukum legal protection industri halal

1. UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
2. PMA No 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan JPH
3. PP NO 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Produk Halal
4. PP BPJPH No 1 Tahun 2021 Tentang Cara Pembayaran Tarif BLU dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Rencana Strategis Industri Halal Sumatera Barat

VISI : “Menjadi Pusat Industri Halal Terkemuka di Indonesia dan Dunia Sebagai Wujud Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”

Indikator Utama :

- Peningkatan Literasi dan SDM di Bidang Industri Halal
- Peningkatan Produksi dan Aset Usaha Industri Halal
- Peningkatan Index Maqashid Syari’ah Nasional dan Internasional
- Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi UMK Syari’ah

Target Capaian

- Peningkatan Skala Usaha Ekonomi Syari’ah
- Peningkatan Kemandian Ekonomi
- Peningkatan Indeks Kesejahteraan
- Peningkatan Peringkat dalam Islamic Economic Index Global dan Nasional

Strategi Utama

- Penguatan Halal Value Chain
- Penguatan Keuangan Syari’ah
- Penguatan UMK Syari’ah Syari’ah Centre
- Penguatan Ekonomi Digital

Strategi Dasar

- Peningkatan Kesadaran Publik
- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM
- Penguatan Kapasitas Riset dan Pengembangan
- Penguatan Regulasi, Fatwa dan Tata Kelola

Inovasi Strategis

- Kawasan Industri Halal /Centra Produksi Industri Halal Bersama
- Plaza/Gallery UMK Syari’ah
- Life Selling Produk UMK Halal melalui Media Online
- Variasi Produk dan Kemasan

b. Akselarasi Implementasi

1. Menyusun Rencana Induk “Kawasan Industri Halal (KIH) Sumatera Barat” berbasis budaya dan kearifan lokal yang mengacu kepada Master Plan Ekonomi Syari’ah Indonesia 2019 - 2024 yang telah dirumuskan oleh KNEKS

2. Melakukan Kajian dan Riset terkait Pemetaan Potensi dan Peluang Sumatera Barat sebagai Pusat Industri Halal di Indonesia dan Dunia
 3. Diperlukan Perjanjian Kerjasama antara Pemprov Sumbar yang diwakili oleh OPD terkait (Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi UMK, Biro Perekonomian dll) dengan Kementerian Agama, BI, BPOM dan BUMN terkait, Perguruan Tinggi, IFSB, Lembaga Keuangan Internasional, Ormas Islam, Pengelola Inkubator, Asosiasi, Starup Centre, Organisasi UMKM dan stakeholder lainnya
 4. Membentuk Tim Percepatan Industri Halal Sumatera Barat
6. Ahmad Wira, M.Si., M.Ag., Ph.D. UIN Imam Bonjol Padang
- a. Untuk dapat dibuat action plan sehingga dapat diketahui siapa mengerjakan apa, juga dilakukan kampanye seperti dengan memasang baliho-baliho, literasi-literasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas
 - b. Memanfaatkan dana-dana CSR syariah dari perusahaan, BSI
 - c. Setuju disiapkan masterplannya



2. Rapat kesiapan Kawasan Mandeh untuk ditawarkan ke investor

- a. Dasar Rapat : Undang-an Kepala Bappeda Prov. Sumbar
Nomor. 050/39/II/Eko-SDA-2022 tanggal 11 Februari 2022
perihal undangan
- b. Hari / Tanggal : Selasa / 15 Februari 2022
- c. Pukul : 15.00 wib s/d selesai
- d. Pimpinan Rapat : Kepala Bappeda Prov. Sumbar
- e. Peserta Rapat : 1. Bappeda Prov. Sumbar
2. TGUPSM dan Tim
3. Dinas Pariwisata Prov. Sumbar
4. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sumbar
5. Bappeda Kab. Pesisir Selatan
6. Kabid Ekonomi dan SDA Bappeda Prov. Sumbar
7. Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi dan SDA
8. Staf Bidang Ekonomi dan SDA
- f. Kegiatan Rapat : 1. Arahan Kepala Bappeda
2. Paparan
3. Diskusi peserta rapat
- g. Hasil Rapat:
 1. Kepala Bappeda Prov. Sumbar
 - a) Telah dilakukan pertemuan antara Gubernur Sumbar dengan Duta Besar Arab Saudi dalam kunjung-an kerja ke Provinsi Sumbar minggu yang lalu, membicarakan rencana investasi Arab Saudi di Provinsi Sumatera Barat dan persiapan kedatangan investor arab saudi ke Prov. Sumbar, Pemerintah Prov. Sumbar menawarkan kawasan Apako Kab. Pasaman Barat dengan potensi minyak bumi dan kawasan Mandeh di Kab. Pesisir Selatan yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bukik Ameh.
 - b) Kawasan Apako sudah selesai dikerjakan persiapannya, sehingga sudah ada janji dengan Dubes Arab Saudi untuk mendatangkan investor ke Apako. Yang belum siap itu adalah KEK Bukik Ameh kawasan mandeh. Untuk itu perlu disiapkan segala persyaratan untuk investasi pada KEK Bukik Ameh tersebut
 2. Kepala Bappeda Kab. Pesisir Selatan
 - a) Kawasan KEK Bukik Ameh Mandeh sudah berproses dari tahun 2017, kawasan Bukit Ameh Mandeh disiapkan untuk KEK seluas 400 Ha dan sudah ada SK

KAN dan sudah terkunci. Sudah didata siapa-siapa yang memiliki pada 400 Ha ini, 200an pemilik sudah ada keterangan. Sudah disiapkan dokumen-dokumen pendukung, seperti penyusunan ANDAL, Masterplan KEK Mandeh dll

b) Pernah ada MoU dan penandatanganan dengan PT Dempo, tapi karena pandemi dan permasalahan lainnya, PT. Dempo mengundukan diri sehingga sekarang KEK Bikik Ameh tidak ada investor

c) Dapat belajar dari proses pengusulan KEK Mentawai

3. Kepala Dinas Pariwisata Prov. Sumbar

Dalam mendatangkan investor dari luar negeri dengan pola G to G akan ada banyak proses yang akan dilalui, mulai dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Maritim dan Investasi, Kementerian Luar Negeri sehingga memakan waktu yang lama

4. Zuhrizul (TGUPSM)

Sebaiknya penamaan investasi di KEK Mandeh bukan investasi KEK Mandeh, karena proses dan persiapannya harus ada batas waktu tertentu, supaya kalau tidak tepat waktu bisa diganti dengan investor lainnya. Banyak investor bintang lima di Labuhan Bajo yang siap masuk ke Mandeh

5. Mulyadi (TGUPSM)

Harus ada pembentukan Tim yang di SK kan yang bertugas sebagai eksekutor untuk menyiapkan segala sesuatu yang menyangkut investasi di Mandeh.

6. Aim Zein dan Ade Edward

a. Untuk lebih fokus dan terarah dalam persiapannya, harus ada rencana tahapan dalam persiapan investasi di KEK Bukik Ameh tersebut.

		2022											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
TAHAPAN PENGEMBANGAN INVESTASI BUKIK AMEH													
1	Presentasi Alur Kerja – Executive Summary												
2	Persetujuan Gubernur – Penerbitan SK Tugas Tim Investasi												
3	Presentasi Penawaran Kerjasama kepada Dubes Saudi												
4	Penandatanganan Naskah Kerjasama (MOU)												
5	Persiapan Penetapan Kawasan dan Sosialisasi												
6	SK Penetapan Kawasan Wisata Bukik Ameh sebagai kawasan Pariwisata oleh Gubernur												
7	Pengajuan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)												
8	Mencari pemodal / promotor lokal yang ingin ikut Saham												
9	Pembentukan Konsortium PMDN (Lokal)												
10	Inventarisasi Kepemilikan Lahan sekaligus Penyerahan Lahan												
11	Pemetaan, Pengukurandan Survey Lahan & Amdal												
12	Pengajuan Sertifikat HGB atas nama Konsorsium Lokal												
13	Pembuatan Business Plan – Pre FS												
14	Presentasi Business Plan dan Match Making Mitra Business Arab												
15	Setup Perusahaan PT PMA												
16	Design dan FS-DED												
17	Pembangunan												
18	Peresmian												

b. Dengan langkah-langkah yang akan dilakukan, yaitu :

- Presentasi alur kerja

- Persetujuan Gubernur – SK tim investasi
- Presentasi penawaran kerjasama kepada dubes Saudi dilanjutkan dengan MoU
- Persiapan penetapan kawasan wisata dan sosialisasi
- Penetapan kawasan wisata
- Pengajuan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
- Mempersiapkan investor lokal
- konsorsium lokal
- Inventarisasi lahan kawasan
- pemetaan, survey lahan dan kajian lingkungan
- Pengajuan Hak Guna Bangunan (HGB)
- Penyusunan Business Plan – Pre FS
- Mendirikan perusahaan PMA (FDI)
- Penyusunan Master Plan – FS – DED
- Pelaksanaan Pembangunan



3. Rapat Koordinasi dan Rekonsiliasi Data Program Unggulan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk 100 ribu Millennial Entrepreneur dan Women Entrepreneur Serta Pelaku Ekonomi Kreatif

- a. Hari / Tanggal : Jum;at / 18 Februari 2022
- b. Pukul : 08.00 wib s/d selesai
- b. Pimpinan Rapat : Kabid. Ekonomi dan SDA
- c. Peserta Rapat :
 - 1. Bappeda Prov. Sumbar
 - 2. Zuhrizul (TGUPSM)
 - 3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumbar
 - 4. Dinas Pemberdayaan Perempuan Prov. Sumbar
 - 5. Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat
 - 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Sumbar
 - 7. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumbar
 - 8. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sumbar
 - 9. Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sumbar
 - 10. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumbar
 - 11. Dinas Pariwisata Prov. Sumbar
 - 12. Dinas Perkebunan, TP Hortikultura Prov. Sumbar
 - 13. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Sumbar
 - 14. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
 - 15. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumbar
 - 16. Dinas Kebudayaan Prov. Sumbar
 - 17. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
 - 18. Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi dan SDA
 - 19. Staf Bidang Ekonomi dan SDA
- g. Kegiatan Rapat :
 - 1. Arahan Kepala Bappeda (diwakili)
 - 2. Paparan Narasumber
 - 3. Diskusi peserta rapat

h. Hasil Rapat :

1. Kabid Ekonomi dan SDA :

Mencetak 100 Ribu Millennial Entrepreneur Dan Women Entrepreneur Serta Pelaku Ekonomi Kreatif adalah visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Sumbar Sejahtera , yaitu : terwujudnya Sumatera Barat Madani yang unggul dan berkelanjutan Substansi dari pelaksanaannya adalah :

- Memfasilitasi tumbuhnya 100 ribu milenial entrepreneur dan woman entrepreneur yang direncanakan akan dilaksanakan dalam 5 tahun dengan proporsi 20 ribu setiap tahunnya dari tahun 2022 sampai dengan 2026
- 100 ribu milenial tersebut tersebar pada beberapa sector, baik pertanian, peternakan, perikanan, industry, UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif dan sector potensial lainnya
- Untuk pencapaian target 100 ribu milenial tersebut perlu pembagian secara proporsional dengan kabupaten/kota
- Definisi terkait dengan entrepreneur yakni :
 - Telah menerima Pendidikan kewirausahaan dan atau
 - Sudah memulai usaha
- Bekerjasama dengan akselerator



TARGET OPD Program Unggulan 100 Ribu Millenial

NO	OPD	TARGET						TOTAL
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2105	5872	6742	6797	6852	6907	35275
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	765	675	700	725	750	775	4390
3	Dinas Pangan	266	112	112	112	112	112	826
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	720	1000	1200	1400	1600	1800	7720
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	500	1500	2000	2000	2000	2000	8500
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		200	100	100	100	100	600
7	Dinas Pemuda dan Olahraga	170	470	528	528	528	528	2752
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	150	350	400	450	500	550	2400
9	Dinas Pariwisata	1040	1850	2.220	2.664	3.197	3.836	14807
10	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	300	300	300	300	300	300	1800
11	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	4.532	4.759	4.997	5.246	5.509	5.784	30827
12	Dinas Kehutanan	113	500	500	500	500	500	2613
13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0	1.636	1.855	2.000	2.200	2.300	9991
14	Dinas Kebudayaan	200	200	240	280	320	360	1600
15	Dinas Sosial	412	412	412	412	412	412	2472
	Total Sementara	11.273	18.336	22.306	23.514	24.880	26.264	126.573

Progul ini juga nantinya akan disosialisasikan juga kepada DPRD, sehingga dapat juga akan menjadi pikir DPRD.

OPD diminta untuk membuat kriteria dan persyaratan peserta pelatihan sehingga pelatihan tersebut tepat sasaran

2. Zuhrizul (TGUPSM) paparan

- a. Kegiatan hari ini lebih banyak berbagi dalam pelaksanaan rekonsiliasi entrepreneur ini. Rencananya entrepreneur ini berbasis nagari, Permasalahannya hari ini data potensi entrepreneur ini sebagai database. orang sudah dilatih sudah masuk dalam database entrepreneur, tapi apakah setelah pelatihan itu dia otomatis menjadi pengusaha...? Ini adalah suatu perbedaan. Dari data yang disampaikan OPD ke Diskominfo akan di monev oleh TPSM setiap semester dan untuk mewujudkan entrepreneur itu adalah yang pertama adalah motivasi ingin menjadi pengusaha
- b. Langkah-langkah menciptakan entrepreneur ini adalah :
 - Harus diadakan sensus
 - Akan launching oleh gubernur
 - Menyediakan portal digital untuk entrepreneur yang dibuat oleh Diskominfo
- c. Permasalahan umum UKM di Sumatera Barat adalah :
 - Modal yang terbatas
 - Kualitas dan kuantitas SDM yang masih terbatas
 - Sistem manajemen usaha yang masih lemah
 - Pemasaran yang belum intensif
 - Adanya persaingan baru dengan produk yang sama
 - Produksi dan distribusi terhambat

3. Lisda, Dinas Kominfo

Dinas kominfo akan mengawal dalam pengentrian data.

Ada 2 versi aplikasi yang telah disiapkan oleh Dinas kominfotik, yaitu :

- versi web
- versi mobile

Aplikasi dibangun untuk memudahkan. NIK digunakan untuk mengetahui bahwa pelatihan tersebut tidak ada orang yang sama.

Tugas admin OPD adalah mengentri data pelatihan dan memvalidasi data yang masuk

Target kegiatan hari ini adalah mengentrikan data kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2021. Data ini bernasis NIK dan NIB

Digital talent Sumbar

Entri Data Pelatihan dan Peserta Pelatihan

Login : <https://digitaltalent.sumbarprov.go.id>

Disampaikan cara input data ke aplikasi digital talent Sumbar

- Entri Data Master Pelatihan
 - Entri Data Jadwal Pelatihan
 - Entri Data Setting Pelatihan
 - Entri Data Peserta Pelatihan
 - Laporan
4. Dinas Sosial
 - a. Target tahun 2021 adalah 114 orang. Entrepreneur itu seperti apa, karena kewenangan dinas sosial sumbar adalah di panti
 - b. Lama pendidikan dan pelatihan beragam ada yang 6 bulan dan 12 bulan sasarannya adalah orang miskin
 - c. Kesulitan dalam pengentrian data peserta pelatihan karena perbedaan detail persyaratan
 5. Dinas PMD
 - a. tahun 2021 telah melatih hampir 600 orang, umumnya pelatihan barber shop, namun masalahnya tidak mengentrikan NIK peserta
 - b. Apakah indikator pelatihan yang bisa dilaksanakan menurut aplikasi
 6. Dinas Pariwisata

Bagaimana solusinya peserta pelatihan yang tidak ada NIK karena banyak pelatihan dari Pokir DPRD
 7. Dinas Kebudayaan

Pelatihan tahun 2021 umumnya dilaksanakan bulan maret sebelum adanya aplikasi ini, sehingga tidak pakai NIK, bagaimana solusinya, Tahun 2022 bulan maret ini sudah mulai pelatihan
 8. Dinas Nakertrans

Dinas naker ada aplikasi naker dari Kementerian, apakah terhubung dengan aplikasi ini
 9. Dinas Perindag

Bagaiman untuk tahun 2022 pelatihan yang diinput oleh masyarakat, tapi tidak ada yang minat, sehingga anggarnya tidak terlaksana dan menjadi silpa contoh adanya anggaran pelatihan 500 juta



4. Rapat Persiapan Entri Point di Provinsi Sumatera Barat

- a. Hari / Tanggal : Rabu / 7 Juni 2022
- b. Pukul : 10.30 wib s/d selesai
- c. Pimpinan Rapat : JFP Muda Subkoordinasi Pariwisata, Koperasi dan UKM
- d. Peserta Rapat :
 1. Bappeda Prov. Sumbar
 2. BP Parieisata Daerah Provinsi Sumatera Barat
 3. GIPI Sumbar
 4. Asita Sumbar
 5. PHRI Sumbar

6. IATTA Sumbar
 7. Asati Sumbar
 8. Astindo Sumbar
 9. ASPPI Sumbar
 10. Asperapi Sumbar
 11. Asperwi Sumbar
 12. HPI Sumbar
- g. Kegiatan Rapat : 1. Paparan
- 2.
 3. Rekonsiliasi
 4. Diskusi peserta rapat

h. Hasil Rapat :

Rapat oleh JFP Muda Subkoordinasi Pariwisata, Koperasi dan UKM disamping oleh ketua Badan promosi pariwisata sumbar, Sari Lenggogeni, dan dihadiri dari asosiasi-asosiasi pariwisata di Sumatera Barat.

Dalam rangka mendorong percepatan pembukaan entry point pariwisata sumbar, diadakan rapat untuk menindaklanjuti rapat di Badan Pengelola Pariwisata Daerah Sumatera Barat, yaitu mempercepat pembukaan akses entri point di sumbar.

Akan ada kesepakatan dan penandatanganan kesepakatan untuk selanjutnya akan membuat surat ke Kemenko Maritim dan Investasi.

Percepatan pembukaan entry point ini adalah karena sampai saat ini masih terhambatnya untuk masuk ke Sumbar terutama melalui pesawat udara dari luar negeri, terutama dari malaysia

1. Ketua Asita Sumbar

- a. Bahwa mendorong atas nama pelaku kegiatan pariwisata sumbar untuk pembukaan entri point penerbangan langsung dari Malaysia. Karena Pada saat ini baru penerbangan luar negeri untuk haji saja yang baru di buka melalui Bandara BIM
- b. Pada prinsipnya maskapai Air Asia sudah stanbay untuk Penerbangan langsung dari Malaysia masuk ke sumbar

c. Untuk itu perlu langkah-langkah yang diminta ke Kemenko Marves, karena sudah ada beberapa yang sudah dibuka penerbangan langsung di Sumatera yaitu melalui, Dumai, Batam dan Medan

d. Untuk menunjang visit beautiful West Sumatera perlu dilakukan Road Show ke Malaysia, Singapura dan Thailand

Sudah ada beberapa grup pariwisata yang ingin masuk ke sumbar, untuk itu perlu percepatan entri poin penerbangan langsung ke sumbar. Untuk itu perlu adanya kesepakatan bersama antara pelaku-pelaku pariwisata di Sumbar untuk mensukseskan percepatan penerbangan langsung ke Sumbar

Syarat-syaat terlaksananya entri poit, yaitu adanya pembicaraan dengan Menko Marves, menurunnya kasus covid, pertumbuhan ekonomi daerah Asita ada 2 program

1. West sumatera advanted, wisman tidak beli paket, hanya beli paket setelah tiba di padang
2. Untuk perubahan, ada dari BPPD Sumbar untuk tavel mart.

Asati

Perlu diketahui dari pihak sumatera utara apa saja syarat-syarat pembukaan entri point dari luar negeri. Banyak permintaan dari malaysia, tapi belum ada pembukaan penerbangan ke padang.

PHRI

Sudah banyak wisatawan malaysia untuk datang ke sumbar, tapi belum entri poin ke Padang

2. HPI :

Akan bersurat ke DPP HPI untuk melobi menteri marves untuk dapat membuka penerbangan luar negeri/malaysia.

3. PHSI/ homestay :

Dari segi pelayanan BSI sudah siap, namun sekarang belum jelas apa yang akan disiapkan

4. ASPERAPI :

Setuju dan mendukung percepatan entri point / masuk ke sumbar.

5. Sari lenggogeni

Semua asosiasi ini adalah semuanya saling keterkaitan untuk mewujudkan percepatan entri poit ini. Untuk itu hari ini akan dibuat suarat ke menko marves

Yang hadir sepakat untuk membuat kesepakatan bersama untuk membuat surat ke menko marves, menteri pariwisata dan ditembuskan ke imigrasi bagi asosiasi yang tidak hadir akan diketahui dan untuk penandatanganan surat tersebut Hasil Kesepakatan bersama ;

1. Adanya surat dari Kemenko Maeves pada saat ini hanya untuk penerbangan haji
2. Adanya Penurunan Covid di sumbar
3. Tingginya permintaan wisman dari malaysia untuk masuk ke sumbar
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Sumbar dan Recovery ekonomi Sumbar
5. Karena adanya pencanangan Visit Sumbar tahun 2023

5. Rapat Koordinasi Rencana Kegiatan Badan Pengelola Geopark Ranah Minang

- | | |
|-------------------|--|
| a. Dasar Rapat | Surat Kepala Bappeda Provinsi Sumatra Barat Nomor 050/298/XII/EKO-SDA/Bappeda-2022 |
| b. Hari / Tanggal | Jumat / 9 Desember 2022 |
| c. Tempat Rapat | Ruang Rapat Bappeda Sumatra Barat |
| d. Waktu Rapat | 09.00 WIB - selesai |
| e. Pimpinan Rapat | Kepala Bappeda Provinsi Sumatra Barat |
| f. Peserta Rapat | 1. Kepala Dinas Pariwisata Kab/Kota se- Sumatera Barat
2. Perwakilan Kepala Bappeda Kab/Kota se- Sumatera Barat
3. Ketua BP Geopark Nasional di Sumatera Barat |
| g. Kegiatan Rapat | Menetapkan personil pada struktur BP GRM |
| h. Hasil Rapat : | |

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Rakor BP GRM yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2022 yang menghasilkan pencalonan nama calon ketua BP Geopark Ranah Minang. Adapun dalam pertemuan ini telah ditetapkan ketua harian dari BP Gepark Ranah Minang diampu oleh Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan wakil ketua harian Ahmad Fadhly dan Dian Hadiansyah. Pertimbangan dalam penetapan kepala bappeda sebagai ketua harian BP GRM karena menghindari konflik dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam pengembangan Geopark di Ranah minang.

Adapun nama-nama yang telah ditetapkan pada pertemuan tersebut adalah sebagai berikut:

Susunan Badan Pengelolaan
Geopark Ranah Minang
Provinsi Sumatera Barat

- A. DEWAN PENASEHAT** :
- : Gubernur Sumatera Barat
 - : Wakil Gubernur Sumatera Barat
 - : Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat
 - : Bupati Pasaman
 - : Bupati Pasaman Barat
 - : Bupati Agam
 - : Bupati Lima Puluh Kota
 - : Bupati Tanah Datar
 - : Bupati Solok
 - : Bupati Solok Selatan
 - : Bupati Dharmasraya
 - : Walikota Bukittinggi
 - : Walikota Sawahlunto
- B. KETUA** : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
- C. KETUA HARIAN** : Kepala Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera
Barat
- D. WAKIL KETUA HARIAN** : Ahmad Fadhly
Dian Hadiansyah
- E. SEKRETARIAT** :
- Koordinator : Kepala Bidang
Ekonomi dan SDA
Bappeda Provinsi
Sumatera Barat
- Anggota : JFP Muda Bappeda
Sumbar
Subkoordinator
Pariwisata
Asistasia, S.S.
Edral Pratama
Elvis Kasmir
Mabruri Tanjung
Devi Erawati
Hanif, SE.
Desli
- F. DEWAN PAKAR/TIM AHLI** : Novizar Swantry

Febrin Anas Ismail
Ade Edwar
Yv Tri Saputra
Napilus
Rosben Aguswar
Zikri Alhadi

G. KOMISI TEKNIS

Penelitian Pengembangan

Koordinator : Kepala Balitbang Provinsi Sumatera Barat

Anggota : Fachri Vanrenov
Harizona Aulia Rahman
Alfa noranda
IAGI Sumbar
Pusat Riset Geosains
(Geoscience Research Group)
CGST
BPBD

Konservasi / Mitigasi

Koordinator : Kadis LH Provinsi Sumatera Barat

Anggota : Ridwan Tulus
Syafriwati
Osronita
Ritno Kurniawan
Syafriwati
Yanti
Reki Kardiman
Yopi Oktanurma
WALHI
BPBD
BKSDA
Jejaka Sumatera

Pendidikan

Koordinator : Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Anggota : Anggi Heryanto
Prastyo Sikma
UNAND
UNP
STTIND Padang
Universitas Muhammadiyah
UNITAS
UBH

Promosi dan Even

Koordinator : Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat

Anggota	:	Kepala Bidang Promosi Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Sari Lenggogeni Darmawi Yulfiadi Fajar Ramadhan Muhammad Subari Tival Godoras Jurian Andika ASATI SUMBAR IATTA SUMBAR
Pemberdayaan Masyarakat		
Koordinator	:	Kepala Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat
Anggota	:	Kepada Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Prov. Sumatera Barat M. Zuhrizul, SE Pebriyansah H jakfar Robi Zanriko Mona Sisca Indra Dodi Tim Pengembangan dan Pendampingan Desa Wisata Sumbar

H. KETUA BADAN PENGELOLA WILAYAH

Ketua BP Geopark Nasional Sianok Maninjau
Ketua BP Geopark Nasional Sawahlunto
Ketua BP Geopark Singkarak
Ketua BP Geopark Harau
Ketua BP Geopark Solok Selatan
Ketua BP Geopark Talamau
Ketua BP Aspiring Geopark Equator Pasaman

Selanjutnya susunan nama-nama pengurus ini akan ditindak lanjuti untuk dituangkan dalam SK Gubernur untuk struktur pengurus BP Geopark Ranah Minang.

3.2. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Daerah dan Luar Daerah

1. Dalam Rangka Identifikasi Kesiapan Pelaksanaan Program Unggulan Lingkup Bidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam
 - a. Waktu dan Tempat : Pada tanggal 25 Januari 2022 ke kabupaten Tanah Datar
 - b. Isi Laporan :

- Pendahuluan

Program unggulan Pemerintah Provinsi Sumbar pada dokumen RPJMD tahun 2021-2026 adalah :

- a. sumbar sehat dan cerdas
- b. sumbar religius dan berbudaya
- c. sumbar sejahtera
- d. sumbar berkeadilan

Program unggulan sektor pertanian adalah termasuk kedalam Program unggulan Sumbar Sejahtera, yaitu :

- a. Meningkatkan pendapatan petani dan nelayan serta mengalokasikan 10% anggaran pemerintah provinsi untuk sektor pertanian
- b. Mewujudkan Sumatera Barat sebagai salah satu lumbung padi dan jagung serta mandiri beberapa komoditas ternak
- c. Memperbaiki tata kelola BUMD dan mendirikan BUMD profesional di bidang pertanian

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat cenderung mengalami perlambatan dimana ekonomi yang sempat tumbuh 6,34% pada tahun 2016 justru terus menurun hingga hanya mencapai angka 5,05% pada tahun 2019. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 bahkan lebih memperparah kondisi perekonomian daerah yang berkontraksi sekitar -1,6%. Walaupun kondisi ini terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia dan bahkan dunia, kontraksi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2020 masih lebih baik dari nasional pada angka -2,07%.

- Hasil

1. Pada kunjungan ke Bappeda Kabupaten Tanah Datar, tim Bappeda Provinsi melakukan pertemuan dan berkoordinasi dengan Bapak Adi Eka Putra, S.Pt. Perencana Ahli Muda pada Bidang Ekonomi dan SDA, berdiskusi dan berkoordinasi tentang identifikasi dan dukungan Kabupaten Tanah Datar terhadap program unggulan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat khususnya pada sektor pertanian, seperti pada sektor perikanan, perkebunan, peternakan dan kelautan.
2. Potensi Ekonomi Kabupaten Tanah Datar yang potensial untuk dikembangkan terdiri dari sektor pertanian dan sektor pariwisata. Kabupaten

Tanah Datar memiliki berbagai jenis komoditas unggulan khususnya hasil pertanian/peternakan berupa beras, kakao, kopi, kasiavera, jagung, sapi dan hasil industry sandang dan pangan olahan berupa tenun songket, bordir dan berbagai olahan makanan yang berkualitas. Potensi wisata di Kabupaten Tanah Datar merupakan potensi wisata yang komplit yang merupakan perpaduan wisata danau, gunung, budaya dan kuliner.

3. Dukungan Program unggulan Gubernur di Kabupaten Tanah Datar sudah terakomodir dalam RKPD dan APBD kabupaten Tanah Datar.

Faktor penghambat dari pelaksanaan Program Unggulan Gubernur di Kabupaten Tanah Datar adalah :

1. Refocusing anggaran dirasa sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan sub sektor pertanian karena ada beberapa sub kegiatan pertanian yang anggarannya sangat terbatas
2. Masih kurangnya sinergitas dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan OPD lain terhadap OPD penanggung jawab Program unggulan

Faktor pendorong yang dihadapi dalam mengakomodir Program Unggulan Gubernur sektor pertanian dalam RKPD/APBD Kab. Tanah Datar sudah terakomodir dalam visi : terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang berdasarkan ABSSBK

Misi ke 2 : Meningkatkan ekonomi masyarakat kabupaten Tanah Datar dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industri dan UMKM

Visi dan misi : pembangunan Kabupaten Tanah Datar didukung dengan Program Unggulan Bupati Tanah Datar disektor pertanian antara lain :

- a. Mengefisiensikan biaya produksi pertanian melalui bantuan pembajakan sawah
- b. Meningkatkan kuota asuransi tani, asuransi ternak
- c. Pajak bersubsidi
- d. Perbaiki jaringan irigasi

OPD yang mendukung pelaksanaan Progul Gubernur adalah : Dinas Pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan

Jumlah anggaran OPD sektor Pertanian pada APBD tahun 2022 adalah :

- a. Dinas Pertanian Rp. 31.448.375.467,-
 - b. Dinas Pangan dan Perikanan Rp. 6.659.619.327,-
4. Saran dalam pelaksanaan penyusunan Program Unggulan Gubernur di Kabupaten Tanah Datar adalah :
- a. Untuk lebih meningkatkan sinergitas dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan agar program kegiatan dapat terarah dan tepat sasaran
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan terkait program unggulan di Kabupaten Tanah Datar
5. Berbagai tantangan yang masih dihadapi Kabupaten Tanah Datar di sektor ekonomi yaitu:
- a. Masih relatif lemahnya keterkaitan sektor pertanian dengan sektor-sektor lainnya, termasuk pariwisata dan industri pengolahan. Sektor pertanian masih menjadi salah satu sektor unggulan di dalam perekonomian Kabupaten Tanah Datar yang diharapkan berkorelasi positif dengan sektor pariwisata. Untuk itu diperlukan sinergi dengan keterkaitan sektor unggulan dengan kontribusi tinggi dengan sektor lainnya yaitu pariwisata, perdagangan, dan UMKMK. Industri pangan olahan berbasis pertanian yang didominasi oleh UMKMK menjadi salah satu alternatif meningkatkan nilai tambah sektor pertanian sehingga produksi dan produktivitasnya dapat ditingkatkan pada tahun 2021.
 - b. Pertumbuhan ekonomi masih menghadapi tantangan berat dikarenakan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) belum stabil. Kondisi pascapandemi Covid-19, Pemerintah daerah memfokuskan kepada pemulihan ekonomi dan reformasi sosial sesuai dengan tema RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022. Untuk itu, pendanaan difokuskan pada pemulihan ekonomi dan reformasi sosial demi mewujudkan kembali masyarakat yang sejahtera.

2. Dalam Rangka Menjadi Narasumber Dan Mengikuti Musrenbang Rkpd Tahun 2023 Kota Sawahlunto

a. Dasar

Undangan Walikota Sawahlunto Nomor : 005/116/Barenlitbangda-2022 tanggal 24 Maret 2022 perihal undangan .

b. Untuk Melakukan

Menjadi narasumber dan mengikuti Musrenbang RKPD tahun 2023 Kota Sawahlunto, menugaskan :

- Ir. Benny Sakti, MM
- Nizhamul Bastian, SH
- Muslim Libtiandra, SE

c. Waktu dan Tempat

Perjalanan dinas dilakukan pada tanggal 29 Maret 2022 bertempat di Hall PTBA Ombilin Kota Sawahlunto

d. Hasil

1. Musrenbang RKPD tahun 2023 Kota Sawahlunto dibuka oleh Walikota Sawahlunto deri Asta, SH, dihadiri oleh unsur Forkopimda, instansi vertikal, OPD Kota Sawahlunto, camat, Kepala Desa Walinagari, Ormas, Lembaga dan wartawan Kota Sawahlunto dan dibuka oleh Walikota Sawahlunto. Sesi pertama diisi dengan paparan narasumber dari Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Kabid. Ekonomi dan Sumber Daya Alam Ir. Benny Sakti, paparan sebagaimana terlampir. Selanjutnya paparan sekaligus keynote speaker dari Walikota Sawahlunto. Sesi kedua dalam pelaksanaan Musrenbang ini adalah sidang kelompok yang dibagi 3 kelompok, yaitu kelompok, ekonomi, sosial budaya dan infrastruktur
2. Kota Sawahlunto melakukan Penyusunan program dan kegiatan pada Dokumen RKPD, sesuai amanat Pemendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD, sepenuhnya sudah melakukannya melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Beberapa tahapan yang sudah kita lalui seperti :
 - a. Kick Off Meeting Penyusunan Dokrenbangda,
 - b. Sosialisasi dan Pelatihan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah melalui aplikasi SIPD,
 - c. Musrenbang Desa/Kelurahan,
 - a. Musrenbang Kecamatan,
 - b. Forum Konsultasi Publik,
 - c. Forum Perangkat daerah,
3. Permasalahan dan isu utama pembangunan daerah di Kota Sawahlunto
 - a. masih perlunya peningkatan kualitas pendidikan di kota sawahlunto, melalui peningkatan angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah

- b. masih perlunya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di kota sawahlunto, melalui peningkatan angka harapan hidup (ahh)
 - c. tingginya pembiayaan infrastruktur akibat topografi daerah yang berbukit, kondisi tanah yang labil akibat penambangan di beberapa titik sentral kota sawahlunto
 - d. peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman, melalui pengurangan kawasan kumuh di kota sawahlunto
 - e. upaya untuk menekan angka pengangguran
 - f. sarana dan insfrastruktur telekomunikasi yang belum merata dan memadai di seluruh wilayah sawahlunto
 - g. peningkatan kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah
 - h. penimngkatan kesejahteraan dan pendapatan petani
 - i. peningkatan kualitas dan daya saing produk unggulan
4. Prioritas pembangunan Kota Sawahlunto tahun 2023 Ditengah keterbatasan keuangan tentunya ada hal-hal yang harus diprioritaskan penyelesaiannya. Untuk tahun 2023, kota Sawahlunto menetapkan prioritas pembangunan beserta kegiatan-kegiatan prioritas, sehingga pembangunan terfokus dan terarah serta dapat menyelesaikan permasalahan mendesak yang ada. Adapun Tema Pembangunan Tahun 2023 adalah sesuai dengan tema pembangunan tahun 2023, yaitu “pemulihan ekonomi melalui keunggulan pariwisata dan produk lokal” dengan focus prioritas pembangunan tahun 2023 adalah :
- a. peningkatan kualitas sdm yang berdaya saing
 - b. peningkatan produktivitas sektoral ekonomi
 - c. peningkatan kualitas pengelolaan pariwisata melalui keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional
 - d. penyelesaian permasalahan layanan infrastruktur kota
 - e. peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi (tik) dan mall pelayanan publik (mpp)
 - f. pemantapan reformasi birokrasi pemerintah
5. Untuk mewujudkan Target-target pembangunan Kota Sawahlunto, tentunya dibutuhkan dukungan dan kerjasama dari semua pihak, baik itu Pemerintah Pusat maupun Provinsi, sector swasta dan masyarakat. Untuk memaksimalkan potensi

pendanaan lainnya, untuk tahun 2023, Kota Sawahlunto telah menyampaikan usulan-usulan kegiatan untuk didanai melalui APBD Provinsi, yaitu :

- a. Lanjutan Pembangunan Jalan Muaro Kalaban-Pondok Kapur melalui Usulan Bantuan Keuangan khusus (BKK) Provinsi
- b. Pengembangan Kawasan Pariwisata Kandi, melalui BKK
- c. Pembangunan Sistem Irigasi (panel surya) Koto Tinggi, Batu Tanjung;
- d. Peningkatan Jalan Guguk Cino – Sawahlunto;
- e. Pembangunan Jalan Rawang – Talawi,
- f. Beberapa program dan kegiatan peningkatan ekonomi di sector pertanian/peternakan dan program pelatihan untuk penciptaan lapangan kerja

Usulan-usulan tersebut telah dibahas pada tahap pra Musrenbang Provinsi oleh Bappeda Provinsi dan Perangkat daerah Terkait. Diharapkan dengan adanya keterwakilan Kota Sawahlunto di DPRD Provinsi, Bapak-bapak anggota Dewan yang terhormat dapat mengawal usulan tersebut hingga dapat direalisasikan tahun depan. Diharapkan juga Bappeda Provinsi selaku playmaker pembangunan, dapat lebih memprioritaskan Kota Sawahlunto dalam pengalokasian anggaran kedepannya.

3. Dalam Rangka Koordinasi Rencana Pembangunan Berkelanjutan Destinasi Wisata Unggulan Provinsi Sumatera Barat Ke Kabupaten Kepulauan Mentawai,

a. diikuti oleh :

- Ir. Benny sakti, MM
- Steffi Amanda, ST.MPP.M.Ec.Dev
- Nizhamul Bastian, SH

b. Dasar :

Persetujuan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat terhadap Telaahan Staf Kabid Ekonomi dan SDA tanggal 17 Mei 2022 perihal rangka koordinasi rencana pembangunan berkelanjutan destinasi wisata unggulan Provinsi Sumatera Barat ke Kabupaten Kepulauan Mentawai

c. Untuk Melakukan :

Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi rencana pembangunan berkelanjutan destinasi wisata unggulan Provinsi Sumatera Barat ke Kabupaten Kepulauan Mentawai

d. Waktu dan Tempat :

Pada tanggal 18 s/d 20 Mei 2022 ke Kabupaten Kepulauan Mentawai

e. Pendahuluan :

- Salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah 19 destinasi wisata unggulan Provinsi Sumatera Barat pada 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, dimana untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan kawasan 3M1K (Mappadegat, Madobag, Muntei dan Katiet). Untuk mengetahui pelaksanaannya.
- Pada tahun 2022 Kabupaten Kepulauan Mentawai mendapat Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Sumatera Barat dengan lokasi pada kawasan Mappadegat, dan pada usulan Pra Musrenbang tahun 2023 diterima usulan pengembangan kawasan wisata Madobag.

f. Hasil

1. Pada kunjungan ke Kabupaten Kepulauan Mentawai, tim melakukan koordinasi dan berdiskusi dengan Sekretaris Dinas Pariwisata Laurensius Saruruk dan Kepala Bappeda Sahad Pardamaian. Untuk Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 yang dialokasikan pada kawasan wisata Mappadegat dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan, dimana didalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) disebutkan untuk pembangunan kawasan wisata Mappadegat, tapi dalam SK disebutkan untuk rehabilitasi kawasan wisata Mappadegat. Hal ini tentunya tidak dapat direalisasikan. Sesuai dengan mekanisme BKK, dimana Provinsi menyediakan anggaran 40% dan Kabupaten 60% dari pagu anggaran BKK, namun sampai saat ini, Kabupaten Kep. Mentawai belum menganggarkan 60% anggaran BKK tersebut dalam APBD tahun 2022. Solusi untuk permasalahan BKK tahun 2022 ini disampaikan supaya Pemerintah Kab. Mentawai segera mengalokasikan anggaran 60% pada APBD tahun 2022 dan melakukan koordinasi terkait langkah apa yang perlu dilakukan Pemda untuk mempercepat pencairan dana BKK tersebut. Untuk BKK tahun 2023 yang sudah diterima pada Pra Musrenbang adalah pengembangan kawasan wisata Madobag, untuk itu diharapkan Pemerintah Kab. Mentawai untuk dapat mengalokasikan pembangunan 60% yang sudah dialokasikan di tahapan RKPD dan mensinkronkan proposal nantinya antara PKS dan SK Gubernur.

2. Dalam peninjauan lapangan, tim merencanakan untuk mengunjungi kawasan wisata Mappadegat dan Katiet di Sipora, Madobag dan Muntei di Siberut. Untuk kawasan wisata Mappadegat yang diusulkan adalah rehabilitasi rumah adat Mentawai (Uma), permasalahannya adalah rumah adat tersebut adalah rumah milik penduduk sehingga tidak dapat dicatat sebagai aset daerah. Untuk penataan kawasan, Pemkab. Mentawai telah membangun sarana dan prasarana wisata di pantai Mappadegat yang pernah dimanfaatkan untuk kegiatan festival Mentawai, namun akibat masa pandemi dan keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana tersebut sekarang kurang terurus dan banyak terbengkalai. Untuk akses jalan ke kawasan wisata Mappadegat sudah baik karena masih dikawasan ibukota Tua Pejat.
3. Untuk peninjauan lapangan ke kawasan wisata Katiet tidak dapat dilaksanakan karena akses jalan ke lokasi tersebut sangat buruk terutama dari Sioban ke Katiet. Jarak kelokasi sekitar 80 km dari Tua Pejat, sebaiknya menggunakan kapal speedboat. Untuk kawasan wisata Madobag dan Muntei tidak dapat dikunjungi karena lokasi tersebut terletak di pulau Siberut, Untuk kelokasi tersebut perlu disesuaikan dengan jadwal kapal dari Tua Pejat atau bisa langsung dari Padang ke Siberut.
4. Dalam pengembangan wisata di Kabupaten Kep. Mentawai, beberapa permasalahannya antara lain :
 - a. Masalah kontribusi keuangan kepada Kabupaten Mentawai, terkait dengan pajak dan retribusi wisata, karena sulitnya memonitor aktifitas dan jumlah wisatawan yang masuk ke Mentawai, banyak wisatawan terutama wisatawan asing yang tidak terdata kedatangannya karena masuk tidak melalui jalur resmi dan langsung ke lokasi wisata. Hal ini tentunya kehilangan pendapatan bagi kabupaten Kep. Mentawai.
 - b. Masalah kepemilikan lahan lokasi wisata, banyak lahan lokasi wisata yang dikuasai oleh orang asing dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan. Lahan tersebut dimiliki dengan menggunakan nama penduduk setempat, sehingga seolah lahan tersebut milik penduduk setempat padahal sebenarnya adalah milik orang asing. Mereka menguasai lahan dan mengatur sendiri objek wisata setempat. hal tersebut sangatlah merugikan, selain masalah kepemilikan tanah oleh orang asing, juga potensi pajak dan pendapatan lainnya yang tidak dapat diterima oleh negara dan Kabupaten Kep. Mentawai.

- c. Masalah sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan di Kabupaten Kep. Mentawai, terutama masalah akses transportasi ke lokasi wisata. Untuk kawasan wisata Mappadegat akses jalan kelokasi sudah bagus karena berada di ibu kota kabupaten Tua Pejat, namun untuk lokasi wisata lain jalannya masih jalan tanah, begitu juga dengan sarana penginapan/hotel, restoran, atraksi budaya dan souvenir yang masih kurang terkoordinir dengan baik.
 - d. Diharapkan Pemda Kabupaten Kep. Mentawai dapat melakukan peningkatan dan pembinaan SDM terhadap pelaku kepariwisataan, meningkatkan peran serta Pokdarwis dalam pengelolaan wisata serta menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan
 - e. Selain itu adanya dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terutama dalam pendanaan dan pembinaan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata di Kabupaten Mentawai, serta perlunya kerjasama dengan pihak swasta dan stakeholders lainnya.
4. Dalam rangka Pembahasan KUA PPAS dengan Komisi DPRD Provinsi Sumatera Barat di Hotel Novotel, Kota Bukittinggi pada tanggal 20-21 Juli 2022.

Sehubungan dengan Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Nomor : 094.3/287/72022 tanggal 20 Juli 2022 perihal perjalanan dinas dalam rangka Pembahasan KUA PPAS dengan Komisi DPRD Provinsi Sumatera Barat di Hotel Novotel, Kota Bukittinggi pada tanggal 20-21 Juli 2022, yang menugaskan sebagai berikut:

1. Teddi Rafdianto, S.Kom
2. Steffi Amanda, ST., MPP., M.Ec.Dev.
3. Harry Febri, SE.
4. Afrizon, S.Sos.
5. Linda Firani, AMd.
6. Masrizal, AMd

Hasil Pembahasan:

Pembahasan KUA PPAS dengan Komisi DPRD dihadiri oleh OPD terkait. Dimana dalam hal ini Bappeda mendampingi OPD tersebut sebagai perwakilan TAPD pada masing-masing komisi. Adapun komisi yang dihadiri oleh bidang Ekonomi dan SDA adalah:

- I. Komisi 2
 - a. Paparan dari Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat

Pada tanggal 19 Juli 2022, melalui Rapat paripurna Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan Rancangan KUA PPAS tahun 2023. KUA PPAS mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 sudah harus selesai pada minggu ke 2 Bulan Agustus atau selambat-lambatnya 6 minggu sesudah disampaikan KUA PPAS oleh Gubernur ke DPRD sesuai **Permendagri No. 86 tahun 2017**.

KUA PPAS harus berpedoman kepada RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) merupakan akumulasi dari rencana Organisasi Perangkat Daerah terkait dengan Renstra Organisasi Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 Penyusunan RKPD harus berpedoman kepada RPJMD pada pasal 147 menyatakan bahwa apabila RPJMD belum ditetapkan RKPD, ditetapkan berdasarkan Arah Kebijakan dari RPJPD. Permasalahan krusial dalam penyusunan RKPD sebagai dasar Penyusunan KUA PPAS APBD tahun 2023 adalah RPJMD 2021 – 2026 belum dievaluasi oleh Kemendagri dan Perubahan RPJPD belum diregistrasi dan belum dimasukkan dalam lembaran daerah.

Untuk Pendapatan Daerah secara makro rencana pendapatan daerah untuk tahun 2023 dalam rancangan Kesepakatan KUA PPAS Tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp. 6.122.041.706.651 dengan rincian sbb.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diprediksi sebesar Rp. 2.854.786.617.051
2. Pendapatan Transfer diprediksi sebesar Rp. 3.252.209.603.600,-
3. Lain – lain pendapatan daerah yang sah diperkirakan sebesar Rp. 15.045.486.000,-

Sedangkan dari sisi belanja diprediksikan pada rancangan KUA PPAS 2023 sebesar Rp. 6.402.041.706.651,- dengan rincian sbb. :

1. Belanja operasi dengan pengalokasian dengan rincian sbb. :
 - a. Belanja Pegawai yang dialokasikan sebesar Rp. 2.412.940.539.266.
 - b. Belanja Barang dan Jasa dialokasikan pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.659.838.197.432
 - c. Belanja subsidi dengan alokasi Rp. 6.500.000.000
 - d. Belanja Hibah dialokasikan sebesar Rp. 78.046.150.741
2. Belanja Modal diprediksi sebesar Rp. 816.462.267.069
3. Belanja Tidak Terduga diprediksi sebesar Rp. 316.017.222.281
4. Belanja Transfer sebesar Rp. 1.112.237.329.862 yang terdiri dari :

- a. Belanja bagi Hasil ke Kabupaten / Kota diperkirakan sebesar Rp. 1.036.882.157.030
 - b. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten / Kota sebesar Rp. 75.355.172.832
- b. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat diinformasikan sebagai berikut :
1. Dinas Kehutanan

Dalam Visi dan Misi RPJMD 2021 – 2026 dengan misi yang Ketiga yaitu Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Walau tidak ada kehutanan dapat masuk dalam beberapa sektor.

Dan Misi Keenam Meningkatkan Pembangunan infrastuktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan dengan dengan tujuan Meningkatkan Pendapatan Petani Hutan dan Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkualitas.

- a. Belanja

Struktur KUA PPAS Dinas Kehutanan

No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran		
		APBD 2022	RKPD 2023	TAMBAH /KURANG
	PAD	100.000.000	42.066.780	(57.933.220)
1.	Belanja Penunjang Urusan	50.244.050.134	58.060.311.318	7.816.261.184
2.	Belanja Urusan	37.707.355.000	39.372.573.828	1.665.218.828
A.	Program Pengelolaan Hutan	23.137.104.000	21.647.167.000	(1.489.937)
B.	Program Konservasi SDA Hayati & Ekosistimnya	400.000.000	400.000.000	-
C.	Program Pendidikan & Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masy diBid. Kehutanan	13.620.251.000	16.620.386.828	3.000.135.828
D.	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	550.000.000	705.020.000	155.020.000
	J u m l a h	87.951.405.134	97.432.885.146	9.481.480.012

Untuk Belanja tahun 2023 sebesar Rp. 97.432.885.146 dibandingkan tahun 2022 alokasi Rp. 87.951.405.134 atau naik sebesar Rp. 9.481.480.012, ada kenaikan ± Rp. 10.000.000.000,- yang disebabkan karena adanya penambahan Belanja Pegawai ± Rp. 7.638.921.737 karena adanya penambahan pegawai. Untuk Belanja Kegiatan terjadi kenaikan sebesar Rp. 1.842.558.275,- untuk yang lain masih optional.

Untuk Belanja Urusan terjadi kenaikan yang berguna untuk mencapai program unggulan luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 50.000 Ha dan 600.000 bibit bermutu yang akan disalurkan ke masyarakat baik dalam kawasan hutan dan disekitan hutan dan membangun agroforestry 600 ha dan komoditi yang dikembangkan 10 Jenis dan peningkatkan Ekonomi masyarakat ada 3.000 kotak / setup madu yang akan didistribusikan tahun 2023 kepada kelompok masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani hutan dan meningkatkan sarana dan prasana pada eko wisata pada Perhutanan sosial yaitu 10 unit dan alat – alat Ekonomi produktif yang akan disediakan 10 unit seperti pengolahan rotan dan alat pengurangan kadar air madu dan alat pengolahan kopi, sehingga ada hilirisasi produk pada sektor kehutanan

Target ada 500 orang milenial entrepreneur untuk urusan kehutanan tahun 2022 telah tercapai ada 113 orang dan 250 orang lagi akan tercapai 2023. Untuk Program Pengelolaan Air Sungai yang bertujuan untuk mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas dan meningkatkan tutupan hutan, target 59, 26% seperti membuka kawasan hutan dan membuka lokasi transmigrasi yang berlokasi pada kawasan hutan yang ada di Daerah Sumatera Barat.

Tahun 2022 telah terjadi pembakaran Hutan 248 hotspot yang terjadi di Kab. Pesisir Selatan, Kab. Limapuluh Kota dan Dharmasraya. Dan Patroli pengamana hutan dan jumlah patroli pengamanan hutan. Ada dari Bulan Januari sampai Juni Dengan anggaran tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp. 1.400.000.000,- sehingga tidak tercover dengan anggaran yang tersedia.

Rekomendasi Komisi II:

- Dari kebijakan strategis dari beberapa program / kegiatan tahun 2023, belum jelas terlihat kebijakan Perhutanan Sosial, dimana Pemerintah Daerah mencetuskan bahwa daerah Sumatera Barat sebagai Rumah Perhutanan Sosial.
- Untuk PAD pada tahun 2023 mengalami penurunan dibanding tahun 2023, apakah OPD terkait belum mengupayakan secara maksimal untuk peningkatan PAD tersebut, sementara pada Provinsi yang lain seperti Riau jumlahnya mencapai milyaran setiap tahunnya.

- Pada paparan yang disampaikan oleh dinas Kehutanan tidak terdapat langkah dan upaya habisnya masa berlaku HGU pada perkebunan, diharapkan untuk tahun yang akan datang HGU baik untuk Dinas Kehutanan ataupun pada Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura agar dapat kembali menginventarisir kepemilikan HGU yang ada di Sumatera Barat.

2. Dinas Pangan

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Tahun 2021 sd 2026 Dinas Pangan mengemban pada Misi ke Tiga yaitu Meningkatkan nilai tambah dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, peternakan dan Perikanan

Struktur KUA PPAS Dinas Pangan

No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran		
		APBD 2022	RKPD 2023	Tambah /Kurang
	Non PAD			
1.	Program Penunjang Provinsi / Belanja Tidak Langsung	9.136.872.458	12.123.079.014	2.986.206.556
2.	Belanja Langsung	31.142.619.194	35.675.373.380	4.532.754.186

Terdapat penambahan anggaran dari tahun 2022, namun penambahan anggaran tersebut pada kegiatan Belanja Langsung, namun OPD masih membutuhkan tambahan anggaran untuk beberapa kegiatan program unggulan dan program strategis dengan jumlah dana sebesar Rp. 36.075.000.000,- antara lain sebagai berikut :

Sub Kegiatan	KUA PPAS 2023	Usulan Tambahan	Menjadi	Ket
Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	9.874.372.000	28.000.000.000,	37.874.372.000	Revitalisasi unit PP (Husker dan Polisher)
Koordinasi, Sinkronisasi & Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan lainnya	1.002.080.000	5.590.000.000.	6.592.080.000	Penambahan 9 Unit Mobil Box TTIC dan tambahan Operasional TTIC
Koordinasi & Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	1.456.100.000	1.960.000.000	3.416.100.000	Penambahan bibit/benih bermutu pada kegiatan Nagari Mandiri Pangan

				sebanyak 81.700 batang
Penyediaan pangan berbasis Sumber Daya Lokal	8.625.791.000	525.000.000	9.150.791.000	Penambahan bantuan untuk Wanita Kelompok Tani
Jumlah Total		36.075.000.000		

Rekomendasi Komisi II

1. Komisi II merekomendasikan penambahan alokasi dana pada Dinas Pangan yang cukup besar Rp. 36.075.000.000,- digunakan untuk beberapa kegiatan strategis seperti untuk pengadaan penambahan mobil unit mobil TTIC karena masih kekurangan lebih kurang 9 unit dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.590.000.000 kegiatan TTIC merupakan kegiatan yang sangat strategis karena secara langsung membantu masyarakat membeli kebutuhan pokok yang sedang naik sehingga harga tersebut dapat dijangkau oleh masyarakat pada seluruh Kabupaten / Kota di Sumatera Barat. TTIC ini juga berfungsi senagai pengendali inflasi, dimana pada saat ini angka inflasi sangat tinggi dan kemampuan / daya beli masyarakat menjadi rendah.
 2. Begitu juga Revitalisasi untuk 220 RMU (Rice Milling Unit) yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang kondisinya sudah banyak yang tidak berfungsi dengan baik. Dibutuhkan dana sebesar Rp. 28.000.000.000,-
 3. Beberapa tambahan anggaran tersebut merupakan Program Unggulan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Daerah, sehingga untuk menunjang Progul tersebut harus dilakukan penambahan anggaran pada OPD terkait seperti tabel terlampir.
3. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
- Sesuai dengan Visi dan misi Gubernur Sumatera Barat khususnya pada misi ketiga yaitu Meningkatkan Nilai tambah dan produktifitas produk pertanian, tanaman pangan dan perkebunan

Struktur KUA PPAS Dinas Perkebunan Dan TPH

No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran		
		APBD 2022	RKPD 2023	Tambah /Kurang
	PAD	1.127.886.000	1.127.886.000	
1.	Program Penunjang Provinsi	53.957.357.733	66.766.085.651	12.808.727.918
2.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	78.516.911.000	21.591.028.349	(56.925.882.651)
3.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	67.020.268.000	28.255.000.000	(38.765.268.000)
4.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	2.825.000.000	2.260.000.000	(565.000.000)
5.	Program Perizinan Usaha Pertanian	250.000.000	100.000.000	(150.000.000)
6.	Program Penyuluhan Pertanian	9.346.039.000	12.027.886.000	2.681.847.000
	Jumlah	211.915.575.733	131.000.000.000	(80.915.575.733)

Terdapat pengurangan dana yang sangat signifikan, sehingga sektor pertanian dikhawatirkan tidak dapat melakukan program / kegiatan yang strategis, dimana untuk sektor Pertanian Pemerintah Daerah menganggarkan 10% dana APBD untuk Sektor Pertanian.

Rekomendasi Komisi II

1. Terhadap pengurangan anggaran yang sangat Signifikan sebesar Rp. **80.915.575.733** ini diharapkan kepada TAPD Provinsi Sumatera Barat agar dapat melakukan penambahan anggaran pada Dinas terkait, sehingga Program unggulan yang telah dicanangkan oleh Pemda Sumatera Barat dapat dilaksanakan.
2. Komisi II merekomendasikan penambahan anggaran untuk Dinas terkait, apalagi ada Program Pemerintah Daerah mengalokasikan dana untuk sektor Pertanian 10% dari Total APBD.
3. Untuk itu perlu dibicarakan secara serius antara Pimpinan Komisi, Pimpinan DPRD serta Ketua TAPD untuk penambahan alokasi dana untuk sektor pertanian.
4. Belum jelas progres dari Dinas terkait terhadap ketersediaan pupuk organik, sementara harga pupuk non subsidi sangat tinggi untuk itu diharapkan kepada Dinas terkait, agar dapat melakukan upaya agar pupuk

organik dapat dinikmati oleh petani dengan harga yang terjangkau dan memberikan solusi terhadap kelangkaan pupuk.

5. Perlu dilakukan inventarisasi terhadap bantuan alsintan yang tidak termanfaatkan oleh petani dan dialihkan kepada bantuan yang bermanfaat bagi masyarakat.
4. Dinas Peternakan dan Keswan

Pada OPD terkait untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur khususnya misi ketiga yaitu Meningkatkan nilai tambah dan Produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan Perikanan.

Struktur KUA PPAS Dinas Peternakan dan Keswan

No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran		
		APBD 2022	RKPD 2023	Tambah /Kurang
	PAD	2.022.000.000	1.331.594.276	(690.405.724)
1.	Program Penunjang Provinsi	23.064.260.820	28.050.536.885	4.982.276.066
2.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	78.516.911.000	21.591.028.349	(56.925.882.651)
3.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	84.250.908.661	66.977.807.915	(17.273.100.746)
4.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Veteriner	3.671.980.503	5.700.000.000	2.028.019.497
5.	Program Perizinan Usaha Pertanian	419.102.700	450.000.000	30.897.300
6.	Program Penyuluhan Pertanian	1.848.454.700	3.307.162.000	1.458.707.300
	Jumlah	135.116.893.384	112.771.318.000	(22.345.575.384)

Rekomendasi Komisi II

1. Dinas Peternakan dan Keswan sangat berpotensi untuk peningkatan PAD yang seperti pengadaan Semen Beku tapi tidak ada peningkatan PAD pada Semen Beku tersebut, padahal permintaan semen beku pada UPTD Dinas Peternakan yang berasal dari Provinsi lain sangat banyak peminatnya.
2. Untuk Kegiatan Pokir untuk tahun 2023, khususnya pengadaan sapi didatangkan dalam Provinsi Sumatera Barat saja karena jika didatangkan dari Provinsi lain akan beresiko terhadap hewan ternak tersebut dengan biaya yang cukup tinggi, dengan syarat berat dan umur sapi saja.

5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Untuk mewujudkan visi dan Misi Gubernur khususnya pada Misi ke 4 yaitu Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil / menengah serta ekonomi berbasis digital

Struktur KUA PPAS Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran		
		APBD 2022	RKPD 2023	Tambah /Kurang
	PAD	196.782.000	146.782.000	(50.000.000)
1.	Program Penunjang Provinsi	32.581.156.630	23.117.000.000	(9.464.156.630)
2.	Belanja Urusan	22.087.830.115	11.516.056.644	(10.571.773.471)
	a. Penunjang Urusan	5.581.409.808	4.872.535.494	(708.874.314)
	b. Urusan Perindustrian	10.930.623.446	2.825.000.000	(8.105.623.446)
	c. Urusan Perdagangan	5.575.796.861	3.818.521.150	(1.757.275.711)

Terdapat pengurangan anggaran yang cukup signifikan pada OPD terkait, sehingga dengan pengurangan anggaran sangat berdampak pada program dan kegiatan yang akan dilakukan.

Rekomendasi Komisi II

1. Untuk Perdagangan yang berbasis digital belum jelas arah program dan kegiatannya, maka untuk itu Komisi II mengharapkan agar OPD terkait dapat menyusun kegiatan untuk sektor perdagangan berbasis digital tersebut.
2. Daerah Sumatera Barat dikenal dengan beraneka ragam hasil kerajinan seperti tenun, songket dan kerajinan lainnya ataupun kuliner yang dikenali oleh masyarakat luas tapi belum ada program / progres dari Dinas terkait untuk memajukan sektor kerajinan khas Sumatera Barat.
3. Begitupun Sumbar sangat berpeluang untuk ekspor beberapa komoditi kerajinan tapi belum ada program untuk ekspor, maka diperlukan kerja keras agar produksi perindustrian dan makanan Sumbar dapat memberikan keuntungan bagi kalangan industri kecil dan menengah melalui program dan kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat pengrajin kecil dan menengah tersebut.

6. Dinas Kelautan dan Perikanan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur Sumatera Barat khususnya misi ke 3 yaitu Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas petanian, prkebuna dan peternakan serta perikanan dalam terwujudnya Sumbar Madani yang unggul dan Berkelanjutan

Struktur KUA PPAS Dinas Kelautan dan Perikanan

No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran		
		APBD 2022	RKPD 2023	Tambah /Kurang
	PAD	1.580.000.000	1.613.000.000	
1.	Program Penunjang Provinsi	23.934.996.519	28.512.915.542	4.577.919.023
2.	Program Pengelolaan kelautan dan Pulau – Pulau Kecil	2.940.225.150	3.630.000.000	(689.774.850)
3.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	24.415.082.028	17.334.820.000	(7.080.262.028)
4.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	4.466.786.228	8.120.000.000	3.653.213.772
5.	Program Pengawasan sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2.864.960.450	10.019.580.000	7.154.619.550
6.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	5.113.490.100	4.980.000.000	(133.490.100)
7.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.542.800.400	1.895.000.000	(1.647.800.400)
8.	UPTD KPSDKP	3.458.931.200	9.302.353.000	5.843.421.800
9.	Program Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	1.674.531.200	7.652.323.000	5.977.791.800
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.400.000.000	600.000.000	(800.000.000)
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.060.517.410	1.000.000.000	(60.517.000)
	Program Pengelolaan Perikanan tangkap	11.663.956.240	3.300.000.000	(8.363.956.240)

Rekomendasi Komisi II

1. Dalam paparan dari Dinas terkait belum ada memaparkan pengembangan Ikan Bilih yang merupakan endemiki satu – satunya di dunia, bahkan sejak dilaksanakan kegiatan Tour De Singkarak yang dilaksanakan di Danau Singkarak bahkan Ikan bilih belum menjadi target dari Dinas terkait agar pengelolaannya dapat ditingkatkan agar Ikan Bilih tidak punah.
2. Sebagaimana diketahui bahwa kewenangan ikan air tawar merupakan kewenangan Provinsi untuk itu diharapkan agar OPD terkait agar dapat

mengalokasikan dana untuk meningkatkan produksi ikan air tawar tersebut.

II. Komisi 3

1. Badan Pendapatan Daerah

Sinkronisasi RPJMD dan Renstra

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan

Misi 7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas.

A. Pendapatan

Pendapatan Daerah:

- Pendapatan Daerah Tahun 2022 : 5.924.281.123.951
- KUA PPAS Tahun 2023 target Pendapatan daerah :6.122.041.706.651
- Bertambah : 197.760.582.700 (3,34%)

Pajak daerah:

- Pajak Daerah Tahun 2022 : 2.014.441.883.000
- KUA PPAS Tahun 2023 target 2.264.441.883.000
- Bertambah :250.000.000.000 (12,41%)
- Retribusi Daerah:
- Retribusi daerah tahun 2022: 26.799.762.012
- KUA PPAS Tahun 2023 : 15.715.751.068
- Berkurang : (11.084.010.944) 41,36%

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan:

- Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2022: 102.737.922.173
- KUA PPAS Tahun 2023 : 101.211.000.000
- Berkurang sebesar (1.526.922.173) 1,49%

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah:

- Lain-lain PAD Yang sah tahun 2022 sebesar 469.783.649.506
- KUA PPAS Tahun 2023 : 473.417.982.983
- Bertambah sebesar :3.634.333.477 (0,77%)

BLUD:

- BLUD tahun 2022 sebesar 328.272.000.000
- KUA PPAS Tahun 2023 Sebesar : 374.873.889.521

- Bertambah : 46.601.889.521 (14,20%)

Dana Transfer:

- Dana Transfer Tahun 2022 Sebesar 3.227.209.603.600
- KUA PPAS Tahun 2023 Sebesar : 3.252.209.603.600
- Bertambah : 25.000.000.000 (0,77%)

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah:

- Lain-lain pendapatan yang sah tahun 2022 Sebesar 83.308.303.660
- KUA PPAS Tahun 2023 Sebesar: 15.045.486.000
- Berkurang Sebesar (68.262.817.660) 81,64%

Dari paparan yang disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah, Komisi III memberikan catatan dan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Jelaskan dengan data-data yang akurat sehingga terdapat analisa terjadinya penurunan target pendapatan yang cukup signifikan dari beberapa sektor.
- b. Terkait dengan terjadinya penurunan target pendapatan akan dibicarakan secara detail dan dilengkapi dengan data sandingan capaian dari tahun 2020 termasuk pengelolaan kekayaan daerah dari PT.Bank Nagari,PT.Jamkrida dan PT. Askrida.

B. BELANJA

Sinkronisasi RPJMD dan Renstra

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan

Misi 7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas.

Anggaran 2022 : 81.223.231.166

Pada KUA PPAS Tahun 2023

- Total anggaran : Rp.90.888.712.670,-
- Belanja Gaji dan Tunjangan : Rp. 57.462.144.298
- Belanja Kegiatan : Rp. 33.426.568.372

Terjadi Penambahan anggaran sebesar 9.665.481.504 (11,90%) dipergunakan untuk pelaksanaan 2 Program dan 10 Kegiatan Untuk Pengawasan kegiatan yang tertuang dalam RPJMD.

C. Kegiatan Strategi Yang Dilakukan Pada Tahun 2023

- (1) Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah melalui :

- a. Penyusunan kebijakan dalam bentuk Perda dan Pegub Pajak dan Retribusi daerah
 - b. Intensifikasi Pajak Daerah berupa :
 - Samsat keliling
 - Samsat Nagari
 - Samsat Wisata
 - Samsat MPP
 - Samsat Drive Thru
 - Samsat Gerai
 - Samsat weekend
 - Samsat Malam
 - Samsat Carefree day
 - Samsat Terminal
 - Hunting TDU
 - Razia kendaraan bermotor secara rutin dan berkesinambungan.
 - c. Koordinasi dengan TIM PEMBINA SAMSAT
 - d. Sosialisasi dalam rangka peningkatan pendapatan daerah
 - e. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat/kab/kota dan mitra kerja
 - f. Rekonsiliasi data dan pemutakhiran data
 - g. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pajak dan retribusi daerah
 - h. Peningkatan SDM Pendapatan Daerah
 - i. Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik pada 18 UPTD SAMSAT
- (2) Dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik melalui :
- a. Pengembangan sistem informasi e-SAMSAT
 - b. Pengembangan inovasi pelayanan pajak
 - c. Meningkatkan sarana prasarana pelayanan publik

Rekomendasi :

Support anggaran diberikan bagi program kegiatan yang memberi outcome berupa pelayanan publik yang dapat menyentuh masyarakat.

2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sinkronisasi RPJMD dan Renstra

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan

Misi 7 : Mewujudkan Tata Kelolah Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Anggaran 2022 : 25.868.278.993

KUA PPAS 2023 : Nilai Belanja : 31.345.173.855

Terjadi penambahan anggaran sebesar 5.476.894.892 untuk pelaksanaan 3 Program, 13 Kegiatan dan 87 sub kegiatan untuk pengawalan kegiatan kegiatan yang tertuang dalam RPJMD.

A. Pendapatan Dan Belanja Terkait Fungsi SKPD

Belanja meliputi:

3 Program, 13 Kegiatan, 87 Sub Kegiatan

(Nilai Belanja : Rp. 31.345.173.855)

Pendapatan dan belanja terkait fungsi skpkd (ppkd)

Pendapatan yang bersumber dari :

1. Pendapatan asli daerah (Rp.179,30 milyar)
2. Pendapatan transfer (Rp. 3,25 trilyun)
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah (Rp.15,045 milyar)

B. Belanja yang digunakan untuk :

1. Kebijakan & Alokasi Subsidi (Rp. -)
2. Perencanaan dan Penyaluran BKK (Rp. 75,35 Milyar)
3. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Rp.316,17 Milyar)
4. Pengelolaan Dana Bagi Hasil/DBH (Rp. 1,036 Trilyun)

Belanja Bantuan Keuangan Khusus pada APBD 2023 direncanakan akan dialokasikan pada 11 Kabupaten dan 5 Kota yaitu Kabupaten Agam,Kepulauan Mentawai, 50 Kota,Pasaman Barat,Pasaman,Solok, Solok Selatan,Tanah Datar,Pesisir Selatan,Sijunjung dan Padang Pariaman, serta Kota Bukittinggi,Padang Panjang,Pariaman,Sawahlunto dan Kota Solok Bagi Bagi Hasil Pajak akan dialokasikan pada 19 daerah Kab/Kota

C. Pembiayaan

- Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 bersumber dari Silpa Tahun sebelumnya sebesar Rp. 300 Milyar
- Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2023, direncanakan untuk penyertaan modal sebesar Rp. 20 Milyar

Rekomendasi:

Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat masih Perlu Pendalaman Pembahasan Pada Badan Anggaran Terhadap Usulan KUA PPAS Tahun Anggaran 2023,untuk Rencana Belanja Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat.

3. Dinas Koperasi dan UKM

Sinkronisasi RPJMD dan Renstra

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan

Misi 4 : Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital.

Perbandingan Pagu APBD 2022 Dengan Rancangan KUA PPAS 2023

PAD,Retribusi Penyewaan Bangunan Tahun 2022 Sebesar Rp.300.000.000,-

Pada Rancangan KUA PPAS 2023 Sebesar Rp.200.000.000,-

Anggaran 2022 : 31.643.676.184

KUA PPAS 2023 : 24.923.680.000

Pengurangan anggaran sebesar 6.719.996.186 disebabkan dari belanja Pokir dibandingkan tahun 2022 Sebesar 6.121.000.000 Pada Rancangan KUA PPAS Tahun 2023 sebesar 41.000.000,-

PAGU ANGGARAN 2023 : Rp. 24.923.680.000 dengan 8 program, 15 kegiatan, 39 sub kegiatan dengan Rincian:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat
Anggaran : Rp. 12.439.319.000 dengan 8 Kegiatan
2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Anggaran : Rp. 66.429.000
dengan 1 Kegiatan
3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Anggaran : Rp. 400.000.000
dengan 1 Kegiatan
4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Anggaran : Rp. 100.000.000
dengan 1 Kegiatan
5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Anggaran : Rp. 1.082.008.100
dengan 1 Kegiatan
6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Anggaran : Rp.
7.698.785.000 dengan 1 Kegiatan
7. Program Pemberdayaan Anggaran : Rp. 2.218.109.100 dengan 1 Kegiatan
8. Program Pengembangan UMKM Anggaran : Rp. 919.029.800 dengan 1
Kegiatan

Rekomendasi :

Mendorong Koperasi untuk memanfaatkan ilmu dan teknologi (IT) dalam menunjang usahanya untuk mengembangkan produk unggulan daerah (PUD)

4. Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Sinkronisasi RPJMD dan Renstra

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan

Misi 4 : Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah Serta

Ekonomi Berbasis Digital.

Anggaran 2022 : 12.628.886.119

KUA PPAS 2023 : 12.628.800.000

Target Pendapatan Tahun 2023 Sebesar Rp.500.000.000,- bersumber dari Retribusi Perikanan Rp.250.000.000,- dan Retribusi Izin Trayek Rp.250.000.000,-

Anggaran hampir sama namun terjadi penurunan anggaran sebesar 86.119.00, untuk

pelaksanaan 6 program,55 sub kegiatan namun semuanya telah sesuai tupoksi.

Rekomendasi :

- a. Menyusun regulasi yang terintergrasi dengan kabupaten dan kota untuk mendukung terciptannya iklim penanaman modal yang kondusif agar terwujudnya keamanan, kenyamanan, kemudahan dan kepastian berusaha untuk investor yang menanamkan modalnya di sumatera barat.
- b. Investasi yang dilakukan di Sumatera Barat harus membawa manfaat/keuntungan ekonomi dan sosial yang besar bagi masyarakat dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal baik jangka pendek maupun jangka panjang dan tidak merusak ekosistem alam serta tidak mematikan pengusaha lokal.

III. Komisi 5

1. Dinas Pariwisata

Pagu Indikatif KUA PPAS Tahun 2023 sebesar Rp. 20.000.000.000,-, dengan rincian :

- a. Gaji dan Tunjangan Rp. 7.227.300.284
- b. Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Rp. 3.634.699.716
- c. Prog. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Rp. 2.704.000.000
- d. Prog. Oemasaran Pariwisata Rp. 4.238.000.000
- e. Prog. Oengembangan Ekonomi Kreatif Rp. 922.000.000
- f. Prog. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rp. 1.274.000.000

Kebutuhan Dinas Pariwisata yang **belum tertampung** pada Rancangan KUA PPAS 2023 (dalam rangka mendukung *Visit Beautiful West Sumatra 2023*)

sebesar Rp. 20.410.000.000, dengan rincian :

No.	Uraian	Kebutuhan Anggaran
1	Minangkabau Fashion Festival	1.000.000.000
2	Event Pariwisata Sumatera Barat 2023 (Pendampingan Kharisma Even Nusantara, Launching Calender of Event Provinsi Sumatera Barat)	900.000.000
3	Promosi pariwisata oleh pelaku ekonomi kreatif ke luar negeri	1.800.000.000
4	Tour de Singkarak 2023 (Supporting Event)	750.000.000
5	Sumarak Ramadhan 2023	350.000.000
6	Pagelaran <i>Indonesia Channel 2023</i>	850.000.000
7	Pemilihan Uda Uni Duta Wisata Provinsi Sumatera Barat	700.000.000
8	Tour de PDRI 2023 (bersepeda menyusuri jejak perjuangan PDRI dan Ekspedisi Petualangan PDRI)	700.000.000
9	Persiapan Penyelenggaraan Visit Beautiful West Sumatra 2024	1.000.000.000
10	International Islamic Trade Forum	700.000.000
11	Festival Arung Jeram (lokasi: Kabupaten Sijunjung)	350.000.000
12	Festival Paralayang (lokasi: Kabupaten Solok)	250.000.000
13	World Surf League 2023 (lokasi: Kabupaten Kepulauan Mentawai)	700.000.000
14	Minang Geopark Cycling 2023 (lokasi: Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam)	700.000.000
15	Seven Summit's Sumatera Barat 2023 (lokasi: Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Solok, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman)	700.000.000
16	Jetsky (lokasi: Kota Padang dan/atau Kabupaten Pesisir Selatan dan/atau Kabupaten Kepulauan Mentawai)	500.000.000
17	Sumbar Rancak Ultra Trail 2023	350.000.000
18	Festival Art Tambo	350.000.000
19	Harau International Climbing Festival (lokasi: Kabupaten Lima Puluh Kota)	700.000.000
20	Lomba Selaju Sampan Batang Hari (lokasi: Kabupaten Dharmasraya)	280.000.000
21	Lomba Pacu Kudo Derby (lokasi: Kota Sawahlunto)	280.000.000
22	Lomba Triatlon (lokasi: Kota Pariaman)	400.000.000
23	Ultra Run (lokasi: Kabupaten Agam)	400.000.000
24	Muharam Light Festival	4.000.000.000
25	Penas Tani dan Nelayan	1.500.000.000
26	International Performing Art Market	200.000.000
	Jumlah	20.410.000.000

Rekomendasi:

- a. Kendala Provinsi Sumbar dalam rangka memulihkan kembali percepatan adalah dengan belum dibukanya BIM sebagai entry point bagi wisatawan mancanegara yang akan mengunjungi Sumbar, harapannya agar Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD Prov. Sumbar menyurati Menko Kmaritiman dan Investasi agar dapat membuka kembali BIM sebagai entry point yang diakui dan sah.
 - b. Dengan telah dilaunchinya visit beautiful west sumatera 2023, tentu harus didukung pula dengan kegiatan-kegiatan kepariwisataan lainnya yang harus direncanakan dengan matang dan anggaran yang memadai.
 - c. Merujuk pada KUA PPAS yang udah ditetapkan oleh TAPD Prov. Sumbar, anggaran yang **belum tertampung** pada Rancangan KUA PPAS 2023 Dinas Pariwisata (dalam rangka mendukung *Visit Beautiful West Sumatra 2023*) adalah **sebesar Rp. 20.410.000.000**. ini dapat dikaji kembali dan dialokasikan anggarannya terhadap apa-apa saja yang menjadi kegiatan pokok dalam menunjang peningkatan pariwisata Sumbar.
5. Dalam rangka mengikuti rapat pembahasan rancangan KUA PPAS tahun 2023 dengan Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat diikuti oleh :
- Ir. Benny Sakti, MM
 - Zuhelman
- a. Waktu dan Tempat :
- Pada tanggal 21 s/d 22 Juli 2022 di Istana Bung Hatta Bukittinggi
- b. Pendahuluan :
1. Salah satu fungsi DPRD sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan adalah fungsi Anggaran (Budgeting). Sesuai fungsi tersebut setiap tahunnya dilakukan pembahasan awal KUA-PPAS oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sebelum dilakukan pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah terhadap pembahasan awal Rancangan KUA-PPAS Tahun 2023, terlebih dahulu dilakukan pembahasan pendahuluan oleh Komisi-komisi bersama mitra kerjanya masing-masing. Hasil pembahasan dari Komisi-komisi tersebut akan menjadi acuan dan pedoman serta pertimbangan bagi Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah

Daerah untuk menyusun langkah-langkah kebijakan yang akan ditetapkan selanjutnya. Untuk itu Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan Rapat Kerja dengan Mitra Kerja.

2. Maksud dari pembahasan ini adalah untuk menyamakan persepsi dengan Mitra Kerja dalam menetapkan rencana penganggaran yang tertuang dalam Rancangan KUA/PPAS Tahun 2023 yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sedangkan tujuannya adalah sebagai bahan acuan dan pertimbangan oleh Badan Anggaran DPRD dalam melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 01 Tahun 2022 Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 11 Juli 2022 Tentang Penjadwalan Ulang Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022.

c. Hasil

1. Pembahasan rancangan KUA PPAS tahun 2023 antara Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan OPD Mitra Bappeda Provinsi Sumatera Barat setelah melalui pemaparan dan penjelasan dalam diskusi yang cukup harmonis dengan semangat kebersamaan, maka didapatkan hasil pembahasan sebagai berikut :
2. Pada Rancangan KUA-PPAS Tahun 2023 Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) terdapat 3 program, 14 kegiatan dan 78 sub kegiatan dengan plafon anggaran sebesar **Rp. 22.888.400.000,-** dengan rincian sebagai berikut :
 - Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 18.840.433.650,-
 - Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Rp. 1.854.805.000,-
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Rp. 2.193.161.350,-

Dari paparan yang disampaikan oleh Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat, terdapat beberapa permasalahan, antara lain :

- a. Proses tahapan perencanaan belum optimal.
- b. Dokumen perencanaan pembangunan daerah belum seutuhnya dijadikan pedoman oleh perangkat daerah
- c. Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal

3. Setelah melalui pembahasan yang dilakukan pada prinsipnya Komisi IV sangat mendukung dan memahami usulan program/kegiatan yang disampaikan serta merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bappeda harus menyusun program/kegiatan sebagai turunan dari RPJMD dalam mencapai target program unggulan Kepala Daerah
 - b. Bappeda harus mengkoordinasikan program dan kegiatan yang menjadi prioritas, dengan kabupaten/kota. Karena bisa saja kegiatan tersebut prioritas di provinsi tapi belum menjadi prioritas di kabupaten/kota.
 - c. Dalam menetapkan alokasi pagu masing-masing OPD, seharusnya dilakukan berdasarkan prioritas program/kegiatan masing-masing OPD.
 - d. Program/Kegiatan yang dibahas dalam rapat Badan Anggaran terlebih dahulu dibahas di komisi terkait. Sehingga untuk program/kegiatan yang masuk dalam pembahasan Badan Anggaran tanpa dibahas di komisi terkait akan sulit untuk dipertahankan dalam rapat Badan Anggaran.
6. Dalam rangka mengikuti Konsultasi Ranperda Perubahan APBD Tahun 2022 bersama Banggar DPRD ke Direktorat Perencanaan Anggaran Kemendagri di Jakarta 18 s/d 21 September 2022, diikuti oleh :
 - Ir. Benny Sakti, MM.
 - Steffi Amanda, ST.MPP.M.Ec.Dev
 - Nizhamul Bastian, SH
 - a. Dasar :
 1. Nota Dinas Kepala Bappeda Nomor 050/288/IX//TS/Eko-SDA/Bappeda-2022 tanggal 16 September 2022, perihal Mohon Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti Konsultasi Ranperda Perubahan APBD Tahun 2022 bersama Banggar DPRD ke Direktorat Perencanaan Anggaran Kemendagri di Jakarta
 2. Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Prov. Sumbar Nomor: 094.2/91/SPT/LD/Eko-SDA/Bappeda-2022 tanggal 18 September 2022.
 - b. Maksud dan tujuan:

memahami penyusunan anggaran perubahan jika tidak sesuai dengan asumsi yang ditetapkan dalam KUA, baik berupa pelampauan target maupun tidak tercapainya target pendapatan dan belanja yang ditetapkan dalam APBD awal.

Tujuan mengikuti Konsultasi Ranperda Perubahan APBD Tahun 2022 ini adalah agar diperoleh informasi terhadap tindak lanjut dari PMK Nomor 134/PMK.07/2022

yang menginstruksikan Kepala Daerah untuk menggunakan Dana Transfer Umum (DAU dan DBH yang belum ada peruntukannya) sebesar 2 % untuk penanganan inflasi dalam bentuk belanja wajib untuk kegiatan perlindungan sosial.

c. Hasil yang dicapai

1. Pada **Pasal 162 PP Nomor 12 Tahun 2019** dijelaskan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila ada perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi yang ditetapkan dalam KUA, baik berupa pelampauan target maupun tidak tercapainya target pendapatan dan belanja yang ditetapkan dalam APBD awal, terdapatnya SILPA yang harus digunakan serta perlu dilakukannya pergeseran kegiatan antar unit organisasi, antar program dan antar kegiatan. Sesuai dengan maksud ketentuan tersebut, maka esensi utama dari Perubahan APBD adalah bagaimana mengoptimalkan pendapatan daerah dan memaksimalkan realisasi belanja daerah pada akhir tahun anggaran.
2. Perubahan APBD Tahun 2022 memiliki fungsi tambahan, yaitu sebagai instrument untuk pengendalian inflasi, terutama pada Provinsi Sumatera Barat yang tingkat inflasinya menduduki rangking 2 tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 7.7 % pada bulan September 2022. Ada amanat PMK Nomor 134/PMK.07/2022 yang menginstruksikan Kepala Daerah untuk menggunakan Dana Transfer Umum (DAU dan DBH yang belum ada peruntukannya) sebesar 2 % untuk penanganan inflasi dalam bentuk belanja wajib untuk kegiatan perlindungan sosial.
3. Bagi Provinsi Sumatera Barat yang tingkat inflasinya tergolong tinggi dan dengan adanya kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi, maka tidak cukup hanya dengan re-alokasi DTU (Dana Transfer Umum) sebesar 2 % tersebut untuk penanganan inflasi. Perlu tambahan anggaran lain dari realokasi kegiatan lain yang sudah ada dalam APBD Tahun 2022 awal atau dalam Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2022.

d. Permasalahan

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan PMK Nomor 134/PMK.07/2022, dengan merealokasikan anggaran yang bersumber dari DTU sebesar 2 % pada Ranperda Perubahan APBD Tahun 2022 yang sebelumnya tidak masuk dalam kebijakan anggaran yang ditetapkan dalam Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tahun 2022.

2. Sesuai dengan amanat PMK Nomor 134/PMK.07/2022 tersebut, realokasi DTU sebesar 2 % digunakan untuk belanja wajib perlindungan sosial terutama untuk bansos, ojek, UMKM, nelayan, penciptaan lapangan pekerjaan dan subsidi sektor transportasi umum. Untuk efektifnya penempatannya pada Ranperda Perubahan APBD Tahun 2022, apakah penempatannya pada kegiatan di OPD atau pada pos BTT (Belanja Tidak Terduga).
 3. Pemerintah akan memberikan insentif kepada daerah yang mampu menekan inflasi sebesar Rp. 10 milyar. Provinsi Sumatera Barat termasuk daerah yang mampu menekan pertumbuhan inflasi, dimana pada triwulan ke dua tahun 2022 tingkat inflasi mencapai 8.02 % sedangkan pada triwulan III sudah turun menjadi 7.7 %. Apakah kami mendapat dana insentif tersebut yang bisa digunakan pada Perubahan APBD Tahun 2022.
 4. Dari laporan realisasi anggaran semester pertama tahun 2022 dan terakhir per 31 Agustus 2022 rata-rata realisasi belanja OPD baru mencapai 48,21 % dan masih cukup banyak yang realisasinya di bawah 40 %. Terhadap kegiatan yang realisasinya masih rendahnya tersebut, tidak diberikan tambahan anggaran atau bahkan dirasionalisasi yang anggarannya nanti digunakan untuk kegiatan penanganan dampak inflasi. Permasalahannya, kegiatan untuk penanganan inflasi tersebut, belum masuk dalam Perubahan KUA dan PPA Tahun 2022. Terhadap kondisi tersebut, bagaimana kebijakan yang akan dilaksanakan pada Ranperda Perubahan APBD Tahun 2022.
 5. Dengan dilakukannya realokasi atau refofusing anggaran pada Perubahan APBD Tahun 2022 untuk penanganan dampak inflasi, tentu akan berdampak nanti terhadap capaian target kinerja program yang telah ditetapkan pada RKPDP maupun Perubahan RKPDP tahun 2022. Bagaimana nanti penyesuaian target dalam RKPDP maupun Perubahan RKPDP Tahun 2022 tersebut yang tahapannya telah selesai.
 6. Melihat realisasi PAD per 31 Agustus 2022 telah mencapai 69 %, maka pada Perubahan APBD Tahun 2022 kami merencanakan menaikkan lagi proyeksi PAD dari target APBD tahun 2022 awal. Namun dengan tingginya tingkat inflasi di Sumatera Barat, apakah masih logis proyeksi PAD ditambahkan lagi dalam Perubahan APBD Tahun 2022
- e. Pemecahan Masalah

1. Dalam hal pengalokasian belanja untuk penanganan inflasi belum diakomodir dalam KUA-PPAS Perubahan maka sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kewenangan antara lain mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat. Pemerintah Daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2022 untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah mengenai perubahan APBD TA 2022 atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
 2. Pemerintah Daerah agar dapat menggunakan Dana Transfer Umum (DAU dan DBH yang belum ada peruntukannya) sebesar 2 % untuk penanganan inflasi dalam bentuk belanja wajib untuk kegiatan perlindungan sosial sesuai dengan PMK Nomor 134/PMK.07/2022 dan untuk pelaksanaannya agar berpedoman kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka pengendalian inflasi di daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 840/5412/SJ tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan bantuan Sosial dalam rangka Pengendalian Inflasi di daerah.
 3. Pemberian insentif kepada daerah akan dievaluasi berdasarkan data BPS dan kemampuan untuk menstabilkan harga sampai pada akhir tahun anggaran.
 4. Berdasarkan kajian terhadap dampak inflasi yang tinggi terhadap pendapatan daerah tidak terlalu berpengaruh sehingga masih dapat digali potensi peningkatan pendapatan bagi daerah.
- f. Kesimpulan

Pemerintah Daerah bertanggung jawab mutlak atas penganggaran belanja wajib perlindungan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2022 serta pelaksanaannya. Dalam hal alokasi anggaran dimaksud belum tersedia, dapat menggunakan sebagian alokasi anggaran belanja tidak terduga melalui pergeseran anggaran kepada perangkat daerah dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi

pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Saran

Pemerintah Daerah disarankan agar melakukan optimalisasi anggaran dalam APBD yang terkait dengan pengendalian inflasi daerah antara lain menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan ketersediaan bahan pangan terutama dengan kerjasama antar daerah serta memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi di masing-masing daerah.

7. Dalam rangka Identifikasi Permasalahan Penyusunan Background Study RPJMN 2025-2029 ke Kawasan Mandeh, Danau Singkarak, Kab. Pesisir Selatan dan Kab. Tanah Datar pada tanggal 26 - 27 Oktober 2022,

yang menugaskan :

- Ir Benny Sakti, MM.
- Steffi Amanda, ST., MPP., M.Ec.Dev.
- Erik Agustian

Kementerian Bappenas RI dalam rangka penyusunan Background Study RPJMN 2025-2029, akan dilakukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan daerah, identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan ke depan. Untuk identifikasi permasalahan diperlukan kegiatan kunjungan lapangan ke KSPN Mandeh Kab. Pesisir Selatan, KSPN Danau Singkarak di Kab. Tanah Datar.

1. Kawasan KSPN Mandeh

Pada Kawasan Mandeh, memiliki kondisi lahan yang perbukitan. Kondisi pada kawasan berupa lahan dengan permukaan rerumputan. Permasalahan pada kawasan Kawasan Mandeh ini adalah lahan masih di miliki oleh masyarakat setempat walaupun masyarakat telah menyampaikan surat kesediaan penyerahan lahan pada pemerintah daerah.

Selain itu, disekitar Kawasan Mandeh ini telah berkembang dengan pesat pariwisata baharai. Dimana sudah terdapat beberapa titik wisata dengan penginapan cottage dan homestay. Untuk pengembangan pokdariwisa, pada kawasna ini sudah bergerak cukup baik dengan pembinaan dari pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari

banyak nya paket-paket wisata yang ditawarkan oleh masyarakat setempat pada wisatawan yang berkunjung di Kawasan Mandeh.

Untuk aksesibilitas, pada kawasan ini telah memiliki jalan provinsi yang difasilitasi dari pembangunan hibah jalan daerah yang didanai oleh APBN. Sedangkan untuk kunjungan ke pulau-pulau yang ada di Kawasan Mandeh dapat dicapai dengan kapal-kapal yang disewakan masyarakat setempat melalui pelabuhan Carocok Tarusan. Namun untuk dermaga pariwisata pada kawasan Mandeh sendiri belum memiliki di setiap kawasannya. Hal ini salah satu fasilitas yang diharapkan oleh pokdarwis setempat agar mempermudah mibilisasi pemandu wisata dan wisatawan dari dan menuju pulau sekir di Kawasan Mandeh. Selain itu pada Kawasan Mandeh telah juga telah terdapat satu ampitheater di kenagarian Sungai Nyalo yang dapat digunakan oleh masyarakat setempat sebagai tempat pertunjukan kesenian tradisional di Kawasan Mandeh.

2. KSPN Danau Singkarak

Salah satu Desa Wisata yang dikunjungi pada pendampingan Bappenas ini adalah Desa Wisata Kampung Minang. Dewi ini merupakan salah satu dari 50 dewi terbaik nasional yang terletak di Nagari Sarumpun. Nagari ini memiliki potensi pertanian berupa tanaman padi dan sawo, dan potensi perikanan penangkapan bilih. Dimana dalam proses penangkapannya pemerintah Nagari telah memiliki aturan yang mengatur tata tertib penangkapan ikan di kawasan Nagari Sarumpun, yang dituangkan dalam Peraturan Nagari Nomor 3 Tahun 2004 tentang Tata Tertib Penangkapan Ikan Dalam Kawasan Nagari Sarumpun.

Dalam pengembangan ekonomi kreatif, masyarakat telah menjual hasil olahan produk pertanian sawo berupa dodol, kue, dan sirup sawo. Sedangkan untuk hasil penglolahn ikan bilih telah diproduksi dalam bentuk singgang bilih, bilih krispi, dan pabfgek bilih. Sebagian besar dari pelaku usaha UMKM tersebut telah memiliki PIRT dan beberapa telah memiliki label halal. Namun masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki label halal, sehingga perlu adanya bantuan dan panduan pemerintah dalam hal ini.

Dalam pengtembangan sektor pariwisata, Nagari Sarumpun mengembangkan Kampung Minang dengan konsep pelestarian budaya Minangkabau. Dalam hal ini pemaketan wisata yang dijual pada kampung minang tersebut berupa kehidupan masyarakat minang di Nagari Sumpur, seperti pembelajaran silat kumango,

penangkapan ikan bilih bersama nelayan setempat, makan bajamba dengan adat minang, dan penginapan homestay di rumah gadang.

Untuk homestay rumah gadang, saat ini telah terdapat tiga rumah gadang yang dapat menampung 150 orang pengunjung. Tahun 2023 akan dilakukan pembangunan satu rumah gadang lagi dengan anggaran dari bantuan Bank Indonesia. Adapaun kepemilikan dari homestay rumah gadang ini masih dimiliki oleh masyarakat secara probadi namun dibawah binaan pokdarwis nagari Sumpur. Sehingga terjadi kerjasama antara pokdarwis Sumpur dalam pemasaran dan penempatan tamu dengan masyarakat pemilik homestay.

Selanjutnya tahun 2023 Nagari Sumpur diwacanakan sebagai nagari ramah muslim. Hal ini didukung oleh pengalaman nagari Sumpur sebagai juara pertama dalam MTQ Kabupaten Tanah Datar.

3. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, perlu dilakukan pembangunan dan pengembangan pariwisata secara terpadu pada kawasan Mandeh dan Danau Singkarak. Sehingga adanya pengembangan yang bersinergi antar sektor pariwisata, pertanian, dan perikanan di kawasan tersebut.

8. Dalam rangka mengikuti rekonsiliasi data Simbangda di Kota Bukittinggi tanggal 10 s/d 11 November 2022 di Istana Bung Hatta Bukittinggi,

ditugaskan :

- Nizhamul Bastian, SH

- a. Aplikasi Simbangda adalah sebuah aplikasi berbasis teknologi informasi yang dimanfaatkan untuk mengukur capaian/realisasi kinerja pembangunan daerah (fisik/keuangan), dengan pendekatan bukti capaian kinerja secara nyata (evidence).
- b. Target dari penerapan aplikasi Simbangda adalah :
 1. mewujudkan sistem pelaporan yang papperless;
 2. mendukung penerapan sertifikat digital;
 3. pencantuman realisasi fisik lebih akuntabel;
 4. proses kegiatan sudah dikawal sesuai tahapan umum yang harus dilalui;
 5. pengelola kegiatan (pa/kpa/pptk) lebih tertib administrasi;

6. orientasi kerja tidak lagi fokus kepada pemenuhan administrasi keuangan semata, namun juga terhadap out come kinerja;
- c. diharapkan bisa menggeser paradigma perjalanan dinas sebagai out put kinerja, akan tetapi hasil dari perjalanan dinas lah yang menjadi out put sesungguhnya, seperti pembinaan, sosialisasi, pelaksanaan rakor, data, informasi, kajian, dll yang terdokumentasi dan tersampaikan kepada pimpinan sebagai laporan kinerja.
- d. Untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022 pada OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan data fisik dan keuangan pada APBD Perubahan 2022 sesuai dan berjalan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dan melalui tahapan yang benar serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan yang berlaku, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Biro Administrasi Pembangunan mengadakan kegiatan rekonsiliasi data melalui aplikasi Simbangda berbasis pembuktian (Simbangda Based Evidence) guna mengawal pelaksanaan program dan kegiatan pada OPD serta mengupdate data pagu anggaran dan target fisik dan keuangan yang terdapat pada APBD Perubahan 2022

Hasil :

1. Pelaksanaan Rekonsiliasi data simbangda diadakan oleh Biro Administrasi Pembangunan sebagai pengelola dan Admin Simbangda Provinsi Sumatera Barat. diikuti oleh Pejabat dan operator Simbangda seluruh OPD Provinsi Sumatera Barat. Untuk Bappeda Provinsi Sumatera Barat tergabung dalam kelompok Asisten Administrasi Umum dengan jadwal rekon pada tanggal 10 s/d 11 November 2022. Simbangda Based evidence adalah sebuah sistem berbasis teknologi informasi yang dimanfaatkan untuk mengukur capaian/realisasi kinerja pembangunan daerah (fisik/keuangan), dengan pendekatan bukti capaian kinerja secara nyata (*evidence*)
2. Peran OPD dalam menjalankan aplikasi Simbangda :
 - a. PA/KPA
mengontrol tugas PPTK dalam menjalankan kegiatan dari perencanaan hingga pelaporan pada aplikasi Simbangda
 - b. PPTK
menyusun dan menyampaikan time schedule, anggaran kas dan paket-paket pekerjaan baik konstruksi (pencantuman lokasi pada gis) maupun non

konstruksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan pimpinan. menginput realisasi/evidence.

c. Operator

Melakukan dukungan proses input paket pekerjaan serta upload dokumen *evidence* yang telah diberikan oleh KPA/PPTK.

d. Masing-masing PA/KPA dan operator memiliki user aplikasi Simbangda

3. Indikator penilaian capaian bobot fisik pekerjaan/sub kegiatan pada laporan realisasi fisik dan keuangan di ukur melalui dokumen pendukung yang harus disiapkan dan diserahkan kepada operator Simbangda untuk di upload ke Simbangda dan diverifikasi dan diapprove oleh admin di Biro Administrasi Pembangunan
4. Pada rekonsiliasi data tersebut diselesaikan dan disempurnakan pembuatan paket pekerjaan yang sudah ada, melihat kembali pelaksanaan paket pekerjaan yang sudah diupload tapi tidak disetujui, sehingga pelaksanaan paket tersebut dihapus supaya tidak menambah devisiasi. Rekon Simbangda kali ini juga difokuskan pada perubahan pagu anggaran, target fisik dan keuangan pada APBD Perubahan 2022, menginput aliran kas perbulan, merubah target fisik dan keuangan sesuai dengan aliran kas pada masing-masing sub kegiatan. Pagu kegiatan dan sub kegiatan Bappeda pada APBD Perubahan 2022 setelah input data Simbangda :

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
APBD PERUBAHAN Tahun Anggaran 2022

Laporan Perbandingan Pagu
 APBD AWAL Dan APBD PERUBAHAN

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		APBD AWAL	APBD PERUBAHAN	Bertambah / Berkurang
	72 Kode Rekening	Uraian	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6=5-4
1	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.975.122.932	12.947.122.532	-28.000.400
1.1	5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	328.647.104	296.860.544	-31.786.560
1.1.1	5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	209,821,900	143,577,050	-66,244,850
1.1.2	5.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10,165,000	7,771,550	-2,393,450
1.1.3	5.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7,500,000	7,280,350	-219,650
1.1.4	5.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7,218,000	4,447,150	-2,770,850
1.1.5	5.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7,593,600	5,063,700	-2,529,900
1.1.6	5.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keberhasilan Kinerja SKPD	58,160,000	26,820,840	-31,339,160
1.1.7	5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26,248,000	17,899,600	-8,348,400
1.2	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.042.289.068	8.713.234.918	-329.054.150
1.2.1	5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,426,142,668	8,400,814,329	-25,328,339
1.2.2	5.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	405,000,000	264,920,550	-140,079,450
1.2.3	5.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20,000,000	4,834,064	-15,165,936
1.2.4	5.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15,000,000	8,424,445	-6,575,555
1.2.5	5.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	11,500,000	2,461,322	-9,038,678
1.2.6	5.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Trimesterian SKPD	104,856,400	31,780,200	-73,076,200
1.3	5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	192.156.408	104.390.508	-87.765.900
1.3.1	5.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7,500,000	7,500,000	0
1.3.2	5.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	110,000,000	73,536,000	-36,464,000
1.3.3	5.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	49,656,400	8,724,500	-40,931,900
1.3.4	5.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25,000,000	13,630,000	-11,370,000
1.4	5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	165.704.208	117.624.238	-48.080.000
1.4.1	5.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	69,000,000	65,250,000	-3,750,000
1.4.2	5.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawalan	29,328,200	13,650,628	-15,677,572
1.4.3	5.01.01.1.05.10	Sosialisasi Penurunan Perundang-Undangan	43,950,000	21,104,400	-22,845,600
1.4.4	5.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	29,426,000	13,649,500	-15,776,500
1.5	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.154.541.978	1.093.978.252	-60.563.726
1.5.1	5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15,000,000	14,994,000	-6,000
1.5.2	5.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81,517,000	168,795,800	87,278,800
1.5.3	5.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25,177,000	204,180,600	278,003,600
1.5.4	5.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	311,946,100	296,378,122	-15,567,978
1.5.5	5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25,071,725	23,981,500	-1,090,225
1.5.6	5.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Baku dan Perabotan Perundang-undangan	10,500,000	10,500,000	0
1.5.7	5.01.01.1.06.08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	425,378,550	656,155,000	230,776,450
1.5.8	5.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	260,000,000	260,000,000	0
1.6	5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34.944.000	103.686.255	68.742.255
1.6.1	5.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	10,000,000	88,742,255	78,742,255
1.6.2	5.01.01.1.07.07	Pengadaan Asat Tetap Lainnya	4,944,000	4,944,000	0
1.7	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.574.920.794	1.319.266.809	-255.653.985
1.7.1	5.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,500,000	7,500,000	0
1.7.2	5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	379,380,000	270,970,500	-108,409,500
1.7.3	5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,188,040,794	1,040,820,309	-147,220,485
1.8	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	481.910.000	688.831.528	206.921.528
1.8.1	5.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43,190,000	40,843,155	-2,346,845
1.8.2	5.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	186,500,000	210,681,673	24,181,673
1.8.3	5.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58,220,000	32,620,000	-25,600,000
1.8.4	5.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	172,800,000	205,731,700	32,931,700
1.8.5	5.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23,200,000	98,145,000	74,945,000
2	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.713.869.627	1.911.786.283	197.916.656
2.1	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	894.233.377	1.144.474.479	250.241.102
2.1.1	5.01.02.1.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	104,474,277	185,385,898	80,911,621
2.1.2	5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	40,609,000	32,731,800	-7,877,200
2.1.3	5.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	182,257,600	187,596,840	5,339,240
2.1.4	5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	466,892,400	738,759,721	271,867,321

Laporan Perbandingan Pagu
APBD AWAL Dan APBD PERUBAHAN

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		APBD AWAL	APBD PERUBAHAN	Bertambah / Berkurang
	72 Kode Rekening	Uraian	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6=5-4
2.2	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	454,733,750	445,612,799	-9,120,951
2.2.1	5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	199,421,550	199,940,167	518,617
2.2.2	5.01.02.1.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SIKPD	114,871,000	105,631,000	-9,240,000
2.2.3	5.01.02.1.02.03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	65,151,500	74,151,900	9,000,400
2.2.4	5.01.02.1.02.04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	75,289,700	75,289,700	0
2.3	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	454,902,500	322,299,605	-132,602,895
2.3.1	5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	85,300,000	94,279,905	8,979,905
2.3.2	5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	75,494,500	136,437,000	60,942,500
2.3.3	5.01.02.1.03.04	Facilitas/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	294,100,000	90,582,100	-203,517,900
3	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5,099,419,779	4,048,235,444	-1,051,184,335
3.1	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1,551,548,967	1,400,992,617	-150,556,350
3.1.1	5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	250,398,000	298,550,950	48,152,950
3.1.2	5.01.03.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	163,757,000	65,636,000	-98,121,000
3.1.3	5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	29,874,400	72,927,700	43,053,300
3.1.4	5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	43,288,700	26,301,950	-16,986,750
3.1.5	5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	295,133,250	318,599,500	23,466,250
3.1.6	5.01.03.1.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	360,115,500	122,356,800	-237,758,700
3.1.7	5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	43,767,000	68,560,500	24,793,500
3.1.8	5.01.03.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	267,215,117	414,232,617	147,017,500
3.2	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2,234,616,963	1,158,887,644	-1,075,729,319
3.2.1	5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	149,880,353	150,815,750	935,397
3.2.2	5.01.03.1.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	150,777,700	90,131,500	-57,646,200
3.2.3	5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	44,450,300	77,779,750	33,329,450
3.2.4	5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1,244,555,644	336,345,444	-908,210,200
3.2.5	5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	200,863,200	145,031,300	-55,831,900
3.2.6	5.01.03.1.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	148,758,300	68,603,300	-79,155,000
3.2.7	5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	73,626,505	72,469,300	-1,157,205
3.2.8	5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	210,804,750	210,731,500	-73,250
3.3	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1,923,853,849	1,490,255,783	-433,598,067
3.3.1	5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	305,680,900	346,624,300	40,943,400
3.3.2	5.01.03.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	210,679,500	67,035,500	-143,644,000
3.3.3	5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	8,000,000	28,485,000	20,485,000
3.3.4	5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1,001,979,549	736,980,573	-265,999,020
3.3.5	5.01.03.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	183,435,700	197,681,800	14,246,100
3.3.6	5.01.03.1.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	40,151,435	21,471,300	-18,680,135
3.3.7	5.01.03.1.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	11,845,800	29,934,300	18,088,500
3.3.8	5.01.03.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	52,081,850	63,044,100	10,962,250
Total			20,388,412,338	18,908,144,259	-1,480,268,079

9. Dalam rangka Konsultasi Ranperda APBD Tahun 2023 di Kementerian Dalam Negeri Jakarta tanggal 16 s/d 19 November 2022,

diikuti oleh :

1. Ir. Benny Sakti, MM
2. Steffi Amanda, ST.MPP.M.Ec.Dev
3. Harry Febri, SE

a. Dasar

1. Surat Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor. 165/1188/FPP- 2022 tanggal 8 November 2022 perihal Pembahasan Ranperda APBD Tahun 2023
2. Nota Dinas Kepala Bappeda Nomor 050/316//ND/DD/Eko-SDA/Bappeda/XI-2022 tanggal 9 November 2022, perihal Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Mohon Izin Melakukan Konsultasi Ranperda APBD Tahun 2023 di Kementerian Dalam Negeri.
3. Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Prov. Sumatera Barat Nomor: 094.2/155/SPT/LD/Eko-SDA/Bappeda/XI/2022 tanggal 14 November 2022.

b. Maksud :

Melakukan Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi Ranperda Apbd Tahun 2023 di Kementerian Dalam Negeri

c. Tujuan :

Melakukan konsultasi penyalarsan kebijakan anggaran dan pola penggunaan TKDD. Dimana penyusunan KUA-PPAS Tahun 2023 dan Renperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dilakukan sebelum penetapan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023 dan lokasi TKDD Tahun 2023 yang pola penggunaannya (DAU) juga mengalami perbedaan dengan penggunaan DAU tahun-tahun sebelumnya.

1. Konsultasi Ranperda APBD Tahun 2023 di Kementerian Dalam Negeri

Beberapa hal yang menjadi pembahasan dan pertanyaan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

a. Penganggaran terkait dengan fungsi Pendidikan

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,

untuk itu alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas bidang pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

b. Penganggaran terkait dengan fungsi Kesehatan

Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

1. bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10% (sepuluh persen) agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi daerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap.
2. alokasi anggaran kesehatan dimaksud diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dan program prioritas bidang kesehatan lainnya yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

c. Penganggaran terkait dengan SPM

1. Dalam penyediaan anggaran untuk pemenuhan SPM harus memperhatikan kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
2. Angka pemenuhan standar pelayanan minimal serta pendanaan urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Penyediaan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dalam pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah

e. Masalah penganggaran untuk mengatasi inflasi (letak program dan kegiatan yang akan mendukungnya)

f. Mekanisme evaluasi APIP pada rancangan KUA-PPAS

g. Masalah pembiayaan bagi panti asuhan swasta (apakah dalam bentuk Hibah atau Bansos)

h. Ketentuan pembiayaan untuk paskibraka (0,6%) dari APBD

2. Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD dengan TAPD Provinsi Sumatera Barat untuk APBD Tahun 2023

a. Pembahasan Pendapatan RAPBD 2023

Disampaikan pendapatan pada tahun 2023 sebesar Rp. 6.412.982.717.986,- atau naik dari RAPBD 2023 sebesar Rp. 148.937.357.969,- dari 6.264.045.360.017,-, peningkatan yang paling besar berasal dari pendapatan transfer sebesar Rp.132.896.069.800,- secara jelas dapat dilihat pada tabel dibawah komponen pendapatan tersebut:

PENDAPATAN R-APBD TAHUN 2023 PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT				
URAIAN		R-APBD 2023	RAPBD 2023 (UPDATE TKDD dan PEMBAHASAN)	+/-
1	2	6	3	4
PENDAPATAN DAERAH		6.264.045.360.017	6.412.982.717.986	148.937.357.969
PENDAPATAN ASLI DAERAH - PAD		2.990.190.270.417	3.011.904.984.586	21.714.714.169
	PAJAK DAERAH	2.377.041.422.000	2.396.536.729.464	19.495.307.464
	RETRIBUSI DAERAH	22.181.478.405	22.181.478.405	-
	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	114.833.979.697	115.937.386.402	1.103.406.705
	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	476.133.390.315	477.249.390.315	1.116.000.000,00
PENDAPATAN TRANSFER		3.252.209.603.600	3.385.105.673.400	132.896.069.800
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT		3.252.209.603.600	3.385.105.673.400	132.896.069.800
	DANA PERIMBANGAN	3.227.209.603.600	3.385.105.673.400	157.896.069.800
	DANA TRANSFER UMUM	2.036.729.942.600	2.090.539.452.400	53.809.509.800
	DANA BAGI HASIL - DBH	149.696.031.600	137.459.354.400	(12.236.677.200)
	DANA ALOKASI UMUM - DAU	1.887.033.911.000	1.953.080.098.000	66.046.187.000
	DANA TRANSFER KHUSUS	1.190.479.661.000	1.294.566.221.000	104.086.560.000
	DAK FISIK	279.978.313.000	387.510.310.000	107.531.997.000
	DAK NON FISIK	910.501.348.000	907.055.911.000	(3.445.437.000)
	DANA INSENTIF DAERAH - DID	25.000.000.000	-	(25.000.000.000)
TRANSFER ANTAR DAERAH		-	-	-
	BANTUAN KEUANGAN	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	21.645.486.000	15.972.060.000	(5.673.426.000)

Beberapa catatan dalam pembahasan Pendapatan antara lain:

1. Terkait dengan BUMD yang ada di Pemprov Sumbar:

a. Balairung

- PT. Balairung; kaji ulang kembali terhadap Komisaris (Kepala Biro Perekonomian) yang ada disitu, Deviden harus dilihat kembali peningkatannya
- Kantor Badan Penghubung yang berada pada Hotel Balairung yang ada sewanya, dihentikan pembayarannya, setelah itu pemprov mengambil langkah-langkah terkait dengan keberadaan Kantor Badan Penghubung disitu

b. Grafika

BUMD Grafika; diusulkan dilikuidasi atau tidak, untuk itu perlu dilakukan audit, diminta Pemprov melakukan langkah-langkah untuk itu, terkait dengan hak dan kewajiban pegawai akan di siapkan sesuai dengan ketentuan

2. Pendapatan yang sah

Masalah kendaraan dinas yang akan dilelang, agar dilakukan percepatannya, BPKAD agar segera menyiapkan semua kendaraan yang sudah cukup umur dan telah diusulkan untuk di lelang

3. Masalah GOR Agus Salim sesuai rekomendasi dari komisi V adalah dipihak ketigakan, untuk perlu dilakukan kajian bagaimana baiknya dengan pengelolaan GOR tersebut. Dari sisi pendapatan diusulkan menjadi Rp.1,5 Milyar

4. Untuk Penyewaan Gedung Rohona Kudus diusulkan pada tahun 2023 pendapatannya sebesar Rp.1,2 Milyar

5. Pendatan dari pengelolaan Sampah di TPA Regional sebesar Rp.1,7 M, agar dilihat kembali potensinya, karena masih ada potensi peningkatanya (dilihat dari jumlah sampah yang dihasilkan oleh kabupaten/kota yang ada diwilayah TPA Regional Payakumbuh dan Solok

b. Pembahasan Belanja Pegawai

(1) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 1.374.124.458.091,- terdiri dari:

- Untuk belanja pegawai ASN dengan jumlah 17.922 orang sesuai dengan RAPBD 2023 sebesar Rp. 1.343.073.266.393,- yang dihitung untuk 14 Bulan sudah termasuk accres sebesar 1,5%.
- Kebutuhan Gaji PPPK dengan jumlah 1.829 orang untuk tahun 2023 sebesar Rp. 76.464.911.755,- untuk 14 Bulan sudah termasuk accres sebesar 1,5%.
- Mutasi Tambah dan Kurang sebesar -Rp. 45.413.720.057,-

(2) Tambahan penghasilan ASN sebesar Rp. 394.852.888.706,- terdiri dari

- Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp. 382.852.888.706,-
- Tambahan penghasilan guru daerah terpencil sebesar Rp. 12.000.000.000,-

(3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya sebesar Rp.531.155.244.857,- terdiri dari:

- Biaya Insentif Pemungutan Pajak Rp. 40.787.248.430,-
- Biaya Insentif Pemungut Retribusi Rp. 507.783.685,-
- TPG PNSD Rp. 462.211.209.000,-
- TKG PNSD Rp. 2.551.508.000,-

- TAMSIL GURU PNSD Rp.5.246.576.000,-
 - Honorarium pengelola keuangan Rp.
 - Jasa Pengelolaan BMD Rp. 696.200.000,-
- (4) Gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp.41.072.390.700,-
 - (5) Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp. 248.515.943,-
 - (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp. 4.485.285.406,-
 - (7) Belanja Peg.BLUD) sebesar Rp. 152.000.000,-

BAB III

PERMASALAHAN

Permasalahan yang ditemukan selama pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sangat beragam, bisa berasal dari faktor internal dan faktor eksternal yang berasal dari Kabupaten/Kota. Permasalahan yang dibahas disini adalah permasalahan secara umum dari keseluruhan Kabupaten/Kota sebagai Berikut :

1. Industri

- a. Daya saing produk Industri Kecil Menengah yang masih rendah (kualitas, desain, harga, kemasan, kontinuitas produksi).

Dalam kondisi persaingan yang semakin ketat, setiap IKM dituntut dapat meningkatkan daya saing produk-produk yang dihasilkannya. Karena dengan peningkatan daya saing membuat IKM dapat mengungguli usaha lain yang menghasilkan produk sejenis. Daya saing produk dapat ditelaah dari berbagai aspek; mulai dari mutu produk yang lebih baik, harga jual yang lebih rendah, desain yang lebih menarik, sampai pada pelayanan purna jual yang lebih terjamin. Inovasi secara berkesinambungan memungkinkan suatu usaha meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya. Hal ini dimungkinkan, karena melalui inovasi akan terjadi perbaikan-perbaikan dalam proses produksi, baik melalui adopsi teknologi maju diluar perusahaan, maupun melalui riset dan pengembangan dalam perusahaan sendiri. Dengan demikian dapat dihasilkan produk yang memiliki daya saing yang lebih tinggi, apakah berupa peningkatan kualitas produk, peningkatan desain produk, atau peningkatan efisiensi produksi. Peningkatan efisiensi produksi berarti produk tersebut dapat diproduksi dengan biaya yang lebih murah, sehingga produk tersebut memiliki daya saing dari segi harga jualnya. Suatu hal yang perlu diingat adalah bahwa setiap inovasi produk harus selalu diarahkan kepada kebutuhan pelanggan. Inovasi tanpa memperhatikan kebutuhan pelanggan hanya akan mengakibatkan produk tersebut gagal ketika dipasarkan. Akar dari lemahnya daya saing produk industry kecil menengah secara umum disebabkan karena terbatasnya kemampuan

dan ketrampilan industry, masih rendahnya penguasaan teknologi serta kurangnya promosi dan jejaring produk.

b. Pengembangan industri sesuai potensi daerah belum optimal.

Dalam memanfaatkan keunggulan komparatif suatu daerah, dalam hal ini diimplementasikan dalam pengembangan industri suatu daerah sesuai dengan potensi daerah tersebut, perlu disusun perencanaan pembangunan industri yang disesuaikan dengan keunggulan/kompetensi inti yang ada serta kendala dan prospek dari komoditi yang dikembangkan, sehingga dapat memberikan hasil yang optimal. Perencanaan tersebut dikoordinasikan secara intensif dengan daerah kab/kota sehingga dapat menghasilkan master plan yang rinci. Dengan master plan ini, pengembangan industry akan lebih terarah serta dapat memberikan manfaat yang besar terhadap pengembangan potensi daerah tersebut.

c. Jaringan kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar belum optimal.

Jejaring kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar merupakan salah satu hal penting dalam mengembangkan IKM kedepannya. Sektor IKM (Industri Kecil dan Menengah) diharapkan menjadi mitra bisnis bagi perusahaan besar. Namun kendala IKM untuk menjadi mitra bisnis bagi perusahaan besar adalah kurang optimalnya IKM dalam memenuhi persyaratan teknis maupun administrasi dan pasokan barang yang kurang kontinyu yang menyebabkan keterlambatan produksi. Hal ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah, sehingga IKM dapat tumbuh seiring dengan semakin majunya industri besar.

2. Perdagangan

a. Sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis belum efektif dan efisien.

Distribusi barang kebutuhan pokok yang efektif dan efisien merupakan Kebijakan umum pembangunan sektor perdagangan yang ditetapkan dalam rangka pencapaian kinerja. Belum Optimalnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis yang efektif dan efisien disebabkan karena belum memadainya sarana dan prasarana logistik, seperti sarana transportasi (jalan, akses dan alat angkut), sarana pergudangan dan ketrampilan SDM perdagangan. Permasalahan ini harus segera mendapatkan solusi, karena sistem distribusi bahan pokok yang tidak strategis menyebabkan kelangkaan dan harga barang pokok yang menjadi beragam.

b. Jaringan pasar dalam dan luar negeri belum optimal

c. Kualitas sarana dan prasarana dagang pasar rakyat masih rendah.

- d. Ekspor masih terkonsentrasi pada beberapa komoditi tertentu, barang setengah jadi dan negara tujuan ekspor masih terpaut ke negara tujuan tradisional.
- e. Barang beredar yang tidak memenuhi ketentuan, seperti barang yang tidak mencantumkan kode produksi, tanggal kadaluarsa, tanda SNI, manual dan garansi masih banyak ditemui di pasaran.

3. Penanaman Modal/Investasi

- a. Masih belum terwujudnya jaminan stabilitas politik, keamanan dan penegakan hukum yang pasti dan konsisten. Faktor ini berpotensi menjadi penghambat minat investor dalam melirik Sumatera Barat sebagai tujuan investasi. Kecenderungan setiap investor yang menghendaki stabilitas keamanan terhadap proses investasi mereka perlu menjadi perhatian penting bagi pemerintah.
- b. Regulasi yang belum efektif dan sering tumpang tindih berkaitan dengan penanaman modal baik pada tingkat pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Kefektifan regulasi tercermin dari kepastian pelaksanaan hukum dan peraturan. Kepastian tersebut memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dihadapi dan biaya yang ditimbulkan sehingga dapat risiko cenderung mudah dikalkulasi. Bagi investor, tingkat resiko bisnis sudah cukup besar untuk dikelola dan cenderung tidak menginginkan risiko tambahan lainnya yang tidak berkaitan dengan proses bisnis.
- c. Perlunya meningkatkan standar pelayanan optimal dan mekanisme kerja pelayanan satu pintu.
- d. Diperlukan pola insentif penanaman modal yang dapat diberikan oleh pemerintah kepada calon investor untuk menarik minat mereka menanamkan modal di Sumatera Barat.
- e. Masih belum tersedianya informasi yang akurat dan minimnya dokumen perencanaan pendukung investasi (master plan, feasibility study, DED, dan business plan) yang dibutuhkan oleh calon investor dalam kaitannya dengan penanaman modal di daerah.
- f. Diperlukan kebijakan yang terintegrasi antar daerah kabupaten/kota berkaitan dengan potensi dan daya saing unggulan yang dibangun oleh masing-masing daerah. Setiap daerah perlu memiliki potensi dan sumber keunggulan untuk bersaing yang dapat membedakan mereka dengan daerah lain baik antar daerah di dalam provinsi maupun dengan daerah lain di luar provinsi.

4. Koperasi

- a. Masih terbatasnya jumlah SDM yang kompeten tentang perkoperasian
- b. Data koperasi yang belum akurat dan update
- c. Masih terbatasnya bantuan dan fasilitasi dalam peningkatan kinerja usaha koperasi
- d. Data koperasi yang belum akurat dan update
- e. Masih terbatasnya bantuan dan fasilitasi dalam peningkatan permodalan koperasi
- f. Masih terbatasnya bantuan dan fasilitasi dalam peningkatan pembiayaan, pemasaran, standarisasi bagi UMKM
- g. Masih terbatasnya kompetensi pelaku UMKM
- h. Masih terbatasnya SDM yang kompeten dalam pembinaan koperasi dan UMKM
- i. Masih terbatasnya bantuan dan fasilitasi dalam peningkatan pembiayaan, pemasaran, standarisasi
- j. Masih terbatasnya bantuan dan fasilitasi dalam peningkatan pembiayaan, pemasaran, standarisasi bagi KUMKM

5. Pariwisata

- a. Pembangunan Destinasi Wisata belum berbasis keberlanjutan lingkungan dan aktivitas berbasis kearifan lokal dan budaya daerah;
- b. Promosi kepariwisataan masih belum efektif dan efisien.
- c. Belum tergalinya produk unggulan pariwisata dan ekonomi kreatif di masing-masing kab/kota;
- d. Kerjasama antara pentahelix pariwisata serta hexahelix ekonomi kreatif belum optimal
- e. Pengembangan ekonomi kreatif belum mengacu kepada industri budaya lokal.
- f. Pembangunan Pariwisata masih belum Terpadu dan masih bersifat sektoral.
- g. Belum optimalnya pengembangan potensi dan pengelolaan pariwisata halal.
- h. Belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata tematik berbasis alam, budaya, dan buatan;
- i. Belum terintegrasinya kawasan Geopark sebagai kawasan wisata tematik.
- j. Belum tersedianya aturan terkait standarisasi baku pembangunan dan pengelolaan daya tarik wisata.
- k. Masih rendahnya kapasitas SDM serta produk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berdaya saing.

BAB IV

PENUTUP

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi di Sumatera Barat perlu dilakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi dengan pemerintah pusat, regional dan kabupaten/kota se Sumatera Barat adalah pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM dan investasi, mengacu kepada kebijakan nasional dengan memperhatikan kondisi dan potensi daerah, dalam merumuskan kebijakan dan program kerja setiap tahun sesuai dengan tugasnya dan fungsinya, dan untuk menciptakan sinkronisasi program tahunan Bappeda diperlukan koordinasi antar OPD terkait dan lembaga swadaya masyarakat untuk menghimpun berbagai masukan baik di Provinsi maupun kabupaten/kota.

Untuk terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas program/kegiatan dengan Kementerian/Lembaga/SKPD Provinsi/Kab/Kota/Institusi Lainnya yang terkait dengan lingkup pembangunan bidang ekonomi, dilakukan melalui peran aktif dalam mengumpulkan data dan informasi, menghadiri rapat-rapat koordinasi ataupun berperan aktif untuk mengkoordinasikan program/kegiatan terutama untuk tahun berjalan serta perencanaan ke depannya, baik ke kabupaten/kota, Kementerian, Lembaga dan provinsi lainnya. Serta melakukan dan menghadiri rapat koordinasi terkait dengan pembangunan ekonomi baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Provinsi Lainnya, Kementerian/Lembaga serta stakeholder terkait.